

LAPORAN TAHUNAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGS



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**

SEKERTARIAT SDGS
Jl. Flamboyan No.2 Mataram

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan BerkelaJutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan BerkelaJutan hingga 2030.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTB, berdasarkan data capaian tahun 2022 adalah jumlah indikator yang tercapai 154 indikator, yang akan tercapai sebanyak 2 indikator dan sisanya adalah indikator tidak tercapai yang perlu perhatian khusus terutama intervensi program/kegiatan untuk mendukung pencapaian target pada masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan 57 indikator dan indikator yang tidak ada data karena indikator yang bukan kewenangan provinsi atau indikator yang sudah tidak ada lagi pada Perangkat Daerah sebanyak 56 indikator. Untuk capaian pada Empat Pilar; Pilar Sosial tercapai 66 indikator, akan tercapai 2 indikator, tidak tercapai 34 indikator dan tidak ada data 11 indikator. Pilar Ekonomi, Tercapai 37 indikator, Tidak tercapai 13 indikator dan Tidak ada data 14 indikator, Pilar Lingkungan Tercapai 34 indikator, tidak tercapai 9 indikator, tidak ada data 25 indikator. Pilar Hukum dan Tata Kelola, Tercapai 17 indikator, tidak tercapai 6 indikator dan tidak ada data sebanyak 7 indikator. Secara umum capaian indikator SDGs pada tahun 2022 adalah 56 persen.

Tinjauan status pencapaian 17 tujuan TPB/SDGs bisa dilihat dari keadaan dan kecendrungan (trend) dimana angka kemiskinan dan rawan pangan mengalami penurunan, target harapan hidup dan IPM meningkat, rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air layak minum, peningkatan rasio elektrifikasi listrik, jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan, pertumbuhan dan kontribusi PDRB industri pengolahan yang lebih tinggi, Ketimpangan ekonomi atau indeks gini mengalami peningkatan, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi mengalami tren peningkatan, kualitas tutupan lahan NTB lebih baik dan Indeks Kapasitas Fiskal daerah meningkat.

Tantangan yang cukup dinamis yang sedang dihadapi pemerintah provinsi NTB pada tahun 2022 yang masih sangat dirasakan dampaknya diberbagai sektor pembangunan, untuk itu Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan pemulihan sektor-sektor pembangunan yang terpuruk. Disamping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan strategi dan arah kebijakan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2023 yang

merupakan bagian internalisasi dan harmoninasi RAD tentang percepatan dan pencapaian TPB/SDGs Provinsi NTB tahun 2019-2023. Upaya percepatan dan pencapaian target indikator melalui intervensi program/kegiatan yang di fokuskan untuk mendukung program prioritas dan program unggulan. Keberhasilan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen bersama dengan memastikan sinergitas program/kegiatan dapat berjalan secara optimal.

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tanggal waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan SDGs Provinsi NTB tahun 2022 yang disusun menggambarkan progres capaian 17 tujuan SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB diharapkan dapat mendorong semua Pemerintah Daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya. Mengingat pada pencanangan MGDs sebelumnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup sukses dalam upaya pencapaian tujuan MDGs. Hal ini terlihat dengan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB selama lima tahun berturut - turut mendapatkan MDGs Award dari pemerintah pusat. Prestasi ini harus memacu NTB untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian pada TPB/SDGs saat ini dan dimasa mendatang. Adapun langkah startegis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB guna memastikan terlaksanakannya TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang rencana aksi daerah percepatan pencapaian TPB/SDGs tahun 2019 – 2023 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 dan telah di revisi menjadi Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2021 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun substansi muatan yang

diiintegrasikan dalam dokumen dimaksud diantaranya, sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.

Guna memastikan terwujudnya capaian tujuan TPB/SDGs, maka diharapkan peran masing-masing stakeholder yang terkait sesuai tupoksi dan kewenangannya agar mengoptimalkan implementasi kegiatan-kegiatan strategisnya dengan menggunakan instrumen analisa dan data yang terukur sesuai standar akademik. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan percepatan pencapaian TPB/SDGs maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah memfasilitasi terbentuknya riset center SDGs yang beranggotakan para pakar dari perwakilan Perguruan Tinggi yang ada di NTB.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan laporan Sekertariat TPB/SDGs tahun 2022 yang menggambarkan peran berbagai stakeholder dalam berkontribusi membangun daerah NTB dapat bermanfaat dan juga menjadi referensi pertimbangan perencanaan pembangunan daerah NTB di masa mendatang. Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini baik dari sisi konten, materi maupun tata naskah masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan laporan selanjutnya sangat kami harapkan.

Mataram, Maret 2023
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr.Ir.H.Iswandi,M.Si

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	<p>PENDAHULUAN Berisi : Latar belakang</p> 1
BAB II	<p>TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) Berisi : Capaian Target dan Indikator TPB/SDGs, Keadaan dan Kecendrungan (Tran), Tantangan dan Pembelajaran, Kebijakan dan strategi, dan Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs dari 17 Tujuan TPB SDGs</p> 5
BAB III	PEMBELAJARAN BAIK TPB/SDGS ————— 116
BAB IV	PENUTUP ————— 122
DAFTAR PUSTAKA	————— 123
LAMPIRAN	Indikator Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs), Realisasi Program Kegiatan Pemerintah Daerah, Realisasi Program Kegiatan Non Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang tidak tercapai. TPB/SDGs dalam pencapainnya mengutamakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah : Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ditingkat Nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaanya

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, adalah: "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang" yang akan diwujudkan melalui 6 misi, yaitu : 1) NTB Tangguh dan mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah 2) NTB Bersih dan melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi 3) NTB Sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah 4) NTB Asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 5) NTB Sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi 6) NTB Aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari visi dan misi ini, terlihat jelas keselarasan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023.

Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2019-2023, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif,

industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Sinergi antara RPJMN 2020-2024 RPJMD dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDGs, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDGs di daerah.

Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan agar dapat memfasilitasi generasi sekarang sekaligus generasi yang akan datang. Konsep pembangunan adalah mengurangi sampah dari hasil pembangunan yang tidak efisien, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, yaitu diantara kesetaraan, inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah terutama terkait data capaian indikator, program/kegiatan yang mendukung capaian serta pembelajaran dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun non pemerintah.

BAB II

TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)



Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.								
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.(PPP: \$ 1,9 per hari)	BPS/Suse nas	%	PM	PM	3,29 (TNP2K)	Semua OPD	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	TNP2K	jiwa	PM	PM	176,029	Semua OPD	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1.2.1*	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis Kemiskinan	BPS/suse nas, BDT	%	14,75 (2018)	10.75	13,82	Semua OPD	
1.2.2*	Penduduk Miskin	BDT	Orang	737.460	500.456	744.69	Semua OPD	
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS)/ P BPJS	BPS	%	PM	80	89,13	Dinas Kesehatan	
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJS N-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	%	68,83	89,29	22,69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan	Dinas Sosial Provinsi NTB	%	5,7	8,6	22,62	Dinas Sosial Provinsi NTB	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	inklusivitas / P DMMR							
1.3.1 (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial Provinsi NTB	Orang	165.362	479.429	1.233.587	Dinas Sosial Provinsi NTB	●
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat.								
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhinya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes (Kelompok Penduduk 40% Terbawah)	BPS/Suse nas	%	85.72 (2016)	88.54	95,91	Dinas Kesehatan	●
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)	%	PM	PM	67,4	BKKBN	●
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)	%	PM	PM	57,4	BKKBN	●
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Suse nas	%	69.58 (2016)	78.90	95,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan	●
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P	BPS/Suse nas	%	58.31 (2016)	70.00	83,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	LSL						Kesehatan	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	BPS/Susenas	%	PM	PM	7,85	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/sederajat / APM SD	BPS/Susenas	%	100.57	100.67	98,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/sederajat / APM SMP	BPS/Susenas	%	94.84	103.36	86,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/sederajat / APM SMA	BPS/Susenas	%	106.99	98.70	67,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	BPS/Susenas	%	PM	98	88,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Susenas	%	PM	PM	99,68	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi ketahanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan dan bencana								
1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BPBD	Resiko	PM	PM	119,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI/JITUPAS NA	Rupiah	PM	PM	5.885.35 9.309.96 7	Badan Penanggulangan Bencana	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
					-	3 (2013)	Daerah	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	2	-	Bima,Kota mataram ,Lombok Timur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	●

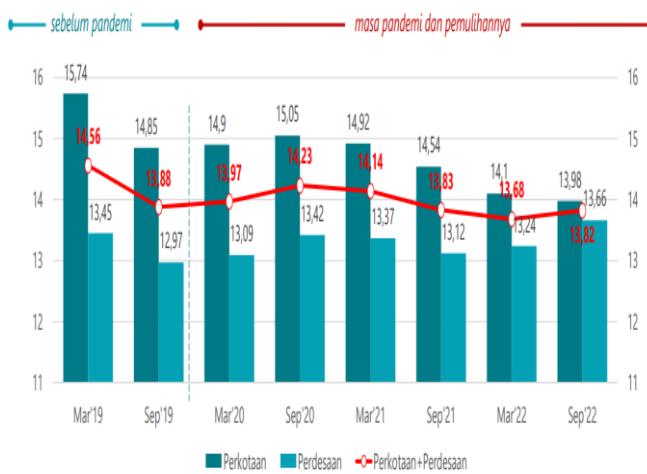
Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM adalah Prememory

● = Tercapai ▲ = akan tercapai ▲ = tidak tercapai

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022, penurunan angka kemiskinan Nasional berbanding lurus dengan Penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2018, persentase kemiskinan Provinsi NTB 14,63 dengan jumlah penduduk miskin 735,62 jiwa. Pada Tahun 2019 menurun menjadi 13,88 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 705.680 jiwa. Tetapi pada tahun 2020 terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,35 Persen dari tahun 2019. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 14,23 dengan jumlah penduduk sebesar 746.040 dan Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 13,83 dengan penduduk sebesar 735.300 jiwa menurun sebesar 0,4 persen dari tahun 2020 dan pada tahun 2022 persentase kemiskinan 13,82 dengan penduduk sebesar 744,69 menurun 0,1 persen dibandingkan tahun 2021 tetapi jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 9.390 jiwa. Kondisi ini sangat jauh sekali dari target nasional tahun 2022 sebesar 8,5 – 9,0 (RKP 2022).

Percentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019-September 2022



Percentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 13,82 persen, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 13,82 persen, meningkat 0,14 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun sebesar 0,01 persen terhadap September 2021. Jumlah penduduk

miskin pada September 2022 sebesar 744,69 ribu orang, bertambah 12,8 ribu orang terhadap Maret 2022 dan bertambah 9,39 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 14,10 persen, turun menjadi 13,98 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 13,24 persen, naik menjadi 13,66 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 2,22 ribu orang (dari 381,84 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 384,03 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 10,6 ribu orang (dari 350,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 360,66 ribu orang pada September 2022)

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah pemulihan pasca pandemi covid-19 yang masih cukup tinggi, belum optimalnya koordinasi TKPK provinsi dengan TKPK kabupaten/kota serta belum optimalnya sinergitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat

untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Amanat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas adalah secara garis besar memerintahkan kepada Daerah untuk penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan berbagai program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan memerlukan upaya antara lain; membangun

keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpilar, mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan survei dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah NTB tahun 2022 diantaranya adalah:

NO	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
				(Rp)	
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sarana Penyediaan Listrik Tenaga Untuk Masyarakat Kurang Mampu	350	587.386.200	APBD
		Perbaikan Rumah Layak Huni	92	3.131.876.564	APBD
		Penyediaan PSU	1160	202.033.477.814	APBD
		Jaminan Kesehatan Masyarakat		98.282.869.721	APBD
		Rehabilitasi Sosial		566.331.000	APBD
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		7.511.400.000	APBD
		PKH	310.623	222.301.425.000	APBN
		Bantuan Pangan Non Tunai	902.247	541.348.200.000	APBN
		Bantuan Sembako	3.750	512.500.000	APBD
		Bea Siswa		27.893.500.000	APBD
		Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		480.000.000	APBD
		Asuransi Kerja Bagi Pekerja Rentan	10.000	672.000.000	APBD

NO	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
				(Rp)	
2	Peningkatan Pendapatan	Penyediaan Air Minum (SPAM)		3.519.000.000	APBD
		Pengelolaan Persampahan		1.804.000.000	APBD
		Bantuan Sarana Pertanian		3.978.586.200	APBD
		Bantuan Yang Diserahkan Ke Masyarakat		3.278.229.997	APBD
		Belanja Bantuan Sosial		1.189.500.000	APBD
		Bantuan Modal Usaha Kepada Koperasi Syariah		900.000.000	APBD
		Pelatihan Kegiatan Manajemen Usaha		38.600.000	APBD
		Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		1.340.824.200	APBD
		Program Pengembangan Kawasan Transimigrasi		2.815.257.300	APBD
Total				1.188.106.002.396	



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	BPS	%	PM	4,77	2,24	Dinas Ketahanan Pangan	●
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita/PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,6	16,0	14,08	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan	●
2.1.2*	Parvelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,54	4,75	1,78	Dinas Ketahanan Pangan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400kkal/kapita/hari	BPS	%	7,54	4,77	2,24	Dinas Ketahanan Pangan	
Target 2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk pendek anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula								
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Balitban gkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), Direktora t Bina Gizi Melalui PSG	%	37,2	32	16,84	Dinas Kesehatan	
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/baduta	Balitban gkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), Direktora t Bina Gizi Melalui PSG	%	23,5	17	17.18	Dinas Kesehatan	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Balitban gkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), Direktora t Bina Gizi Melalui PSG	%	8,6	6	5.75	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), survei indikator kesehatan nasional (sirkesnas)	%	56,5	48	10.52	Dinas Kesehatan	
2.2.2 (b)	Presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), BPS/Susenas	%	41,2	75	80.15	Dinas Kesehatan	
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH Point)	DKP	%	78,3 (2018)	81.80	93,3	Dinas Ketahanan Pangan	
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	30,18	30.60	50,21	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sector pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian BPS/Sakernas	Rp	32.821,82	27.300	36.882.526,86 (2021)	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
2.3.1 (a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di	Data nilai tambah	%	107,63	>105	107,98	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	pertanian, BPS/Sakernas						
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Data nilai tambah pertanian, BPS/Sakernas	%			78	Dinas Pertanian dan Perkebunan	●

Keterangan : "a" adalah data realisasi; "PM" adalah Prememory

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat

Prosentase penduduk rawan



pangan NTB dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari tahun 2019 – 2022 penurunan angka rawan pangan mencapai 3,78 persen, tahun 2022 mencapai 2,24 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan pangan di NTB semakin terpenuhi. Sementara prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari tahun 2021 mencapai 13,77 persen dan meningkat 14,08 persen pada tahun 2022. Hal yang berbeda terjadi pada Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) penurunan tahun 2021 mengalami penurunan

menjadi 19,23 dan tahun 2022 turun menjadi 16,84. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah untuk menurunkan angka stunting telah berhasil.

Tantangan dan Pembelajaran

Pola konsumsi yang relatif sama pada antar-individu, antar-waktu dan antar-daerah mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Sehingga, mekanisme mekanisme pasar dan distribusi pangan antar lokasi dan antar waktu dengan mengandalkan stok akan berpengaruh pada kesetimbangan antara ketersediaan dan konsumsi serta pada harga yang terjadi di pasar. Faktor harga sangat terkait dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Sehingga, meskipun komoditas pangan tersedia di pasar namun jika harganya tinggi sementara daya beli rumah tangga rendah akan menyebabkan rumah tangga tidak bisa mengaksesnya. Kondisi ini memicu timbulnya kerawanan pangan.



Kebijakan dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan provinsi NTB untuk mencapai target adalah meliputi; adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan, serta meningkatkan diversifikasi pangan local, dengan proram-program pemanfaatan pekarangan yang ada dirumah-rumah masyarakat.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah provinsi NTB terus berupaya melalui program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan masyarakat, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, memperbanyak kawasan rumah pangan lestari, serta terpantau arus keluar masuk komoditas pangan strategis.



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SDKI (2012), AKI se-Nusa Tenggara, Papua Tahun 2015	orang	251 (2012)	223	257	Dinas Kesehatan	▲
		Dinas Kesehatan	%		84	85,3	Dinas Kesehatan	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (%)	BPS/Susenas	%	99,47	100	98,29	Dinas Kesehatan	△
3.1.2(a)	Percentase perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses	BPS/Susenas	%	90,42	94	95,91	Dinas Kesehatan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penganggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kehilangan Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN /SDKI	Orang	75 (2012)	70	29.37	Dinas Kesehatan	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN /SDKI	Orang	33 (2012)	30	343	Dinas Kesehatan	
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN /SDKI	Orang	57 (2012)	50	24.64	Dinas Kesehatan	
3.2.2(b)	Percentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	100	100	90	Dinas Kesehatan	
Target 3.3 Pada Tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	Kemenkes	Kasus	98	58	115	Dinas Kesehatan	
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Kasus	170	115	184.11	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	%	0,25	0.20	0,12	Dinas Kesehatan	●
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	3	7	6	Dinas Kesehatan	▲
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Kemenkes	%	90	100	100	Dinas Kesehatan	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta)	Kemenkes	Orang	221	160	247	Dinas Kesehatan	▲
3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	Kab/kota	0	0	8	Dinas Kesehatan	●
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis	Dinas Kesehatan (Survey Mikro Filaria Rate/MFR), BPS	%	PM	PM	10 (2021)	Dinas Kesehatan	●
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	Kab/kota	PM	PM	0 (2021)	Dinas Kesehatan	●
Target 3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1(a)	Persentasi merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,9	4.8	1.7	Dinas Kesehatan	●
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas dan Sirkesnas	%	42	22.15	7,19	Dinas Kesehatan	●
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Riskesdas	%	2,00	0,70	14.9	Dinas Kesehatan	▲
3.4.2*	Angka kematian (Insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian	Orang	13	1	NA	Kepolisian	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penganggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/kota	10	10	10	Dinas Kesehatan	●
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis	Dinas Kesehatan, BNN	Orang	PM	PM	108	BNN	●
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	Orang	20 (2018)	20	0	Dinas Sosial	
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas Sosial, BNN	Orang	PM	PM	15	BNN	●
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lembaga	8 (2018)	12	12	Dinas Sosial	●
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	PM	PM	2.	BNN	●
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas								
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Kepolisian	Orang	PM	PM	406	Kepolisian	●
Target 3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan Pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana	BKKBN	%	50,9	59,8	67,9	BKKBN	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern							
3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN	%	50,9	52,6	57,40	BKKBN	●
3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang sama dan menyatakan dalam persentase	BKKBN	%	74,77	76,48	67,9	BKKBN	▲
.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BKKBN	%	23,7	14.42	46,9	BKKBN	▲
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	%	2,5	1,5	2,43	BKKBN	▲
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/Susenas	%	6,49 (2016)	4.75	9,98	Dinas Kesehatan	▲
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	BPS/Susenas	%	PM	PM	85,72 (2021)	Dinas Kesehatan	●
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	66,74	77,00	89,13	Dinas Kesehatan	●
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥	Bappenas/Susenas	%	5,9	3,00	33,20	Dinas Kesehatan	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penganggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	15 tahun							
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	%	74,05	94	95,90	Dinas Kesehatan	●
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	%	PM	PM	12,8	Dinas Kesehatan	●

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah Prememory

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Target Angka Harapan Hidup (AHH) yang ditetapkan tahun 2022 adalah 67,08 tahun dan capaiannya 67,07 tahun. Meningkat 0,38 tahun dibandingkan pada tahun 2021. Dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2022 sebesar 10,68 juta meningkat 0,38 Juta dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 10,38 juta rupiah per orang per tahun.



Epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya mulai tahun 2019 – 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat semakin meningkat. Hal ini juga di dukung dengan sarana prasaran pendukung dan tenaga kesehatan yang semakin membaik di seluruh kabupaten kota di NTB.

Tantangan dan Pembelajaran

Tahun 2022 pada bidang kesehatan masih pada isu kematian ibu dan bayi yang masih tinggi disebabkan starting point penetapan target pada baseline data terlalu tinggi sehingga walaupun capaian sudah berprogres lebih baik tetapi masih tetap berada di bawah target RPJMD maupun secara nasional. Beberapa program yang telah mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan seperti program Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Tantangan yang masih dihadapi pada bidang kesehatan di NTB adalah angka Harapan Hidup masih jauh dibawah AHH Nasional, Masih tingginya jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi, Penyakit Menular dan Tidak Menular masih tinggi dan Stunting masih menjadi masalah.

Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai target Angka Harapan Hidup didukung dengan 8 (delapan) program yang tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit HL Manambai, RS Jiwa Mutiara Sukma dan RS Umum Daerah Provinsi NTB.

Pemerintah provinsi NTB telah menginisiasi program Generasi Emas NTB (GEN), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak. Program ini dimulai dari pemantauan ibu hamil yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh tenaga terlatih GEN, yaitu Kader GEN dan Pendamping Desa. Dengan Program “PARANA” yaitu Program Pasangan ramah anak, dari 8.366 sasaran program GEN yang mendapatkan intervensi GEN yaitu mendapatkan kelas parana dan multi mikro nutrient (MMN) berupa caviplex dan sasaran ini diintervensi pada tahun 2017 – 2018, Sehingga tahun 2019 mulai untuk



sertifikasi parana penentuan sasaran termasuk parana melalui penilaian skor 45 indikator, sasaran yang sudah teridentifikasi atau tersertifikasi sebanyak 3.993 dan yg sudah parana sebanyak 2009. Proporsi sampel atau sasaran terbanyak dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, masing-masing 26,3 %. Meskipun jumlah lokasi desa/kelurahan per kabupaten/ kota dalam program GEN adalah sama-sama 10, namun jumlah sasaran ibu hamil berbeda antar kabupaten/kota

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu program unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembangunan bidang sosial adalah revitalisasi posyandu. Terkait dengan pelaksanaan GEN, jajaran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB melaksanakan kegiatan Aksi Kepedulian yang dikenal dengan program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan bagian dari program Aksi Seribu Hari atau disingkat ASHAR. Program GEN merupakan program jangka panjang Pemerintah Provinsi NTB, dengan tujuan pada tahun 2025 akan lahir generasi unggul, generasi emas dari NTB.Untuk tahun 2022 Program GEN adalah Program PARANA. Selain konsumsi makan dan factor infeksi, stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makan bagi bayi dan Balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan. Intervensi utama Program Generasi Emas NTB (GEN) perbaikan pola asuh anak, sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan



standar. Untuk pertumbuhan, indicator yang digunakan adalah angka atau prevalensi stunting.



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 4.1 pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1*	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	PM	52,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.1(a)	Percentase SD/MI berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	68,32 (2018)	71.22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(b)	Percentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	63,53 (2018)	70.71		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(c)	Percentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	74,71 (2018)	80.21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	BPS/Susenas	%	109,63	115.00	107,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	107,83	108,13	104,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	BPS/Susenas	%	94,97	96,32	92,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	110,16	110,97	107,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	98,86	93,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	100,75	110,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	7,66	7,93	8,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.1 (h)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sederajat	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	100,75	93,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
4.1.1(i)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	68,3	86,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat,SMP/sederajat dan SMA/sederaja	BPS/survei sosial ekonomi Nasional (susenans)	%			98,71 (SD), 92,19 (SMP),65, 71 (SMA)		●
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.	BPS/survei sosial ekonomi Nasional (susenans)	%			SD (NA) SMP (0,98) SMA (1,22)		●
Target 4.2 pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
menempuh Pendidikan Dasar								
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/Susenas	%	37,57 (2016)	41.09	42,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	75,72	81.97		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.3 pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	98.86	93,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	100.75	93,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/Susenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	%	21,57 (2016)	25.6	31,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.4 pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	46,63 (2016)	66.23	88,55 (2021)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	23.71 (2016)	39.98	58,69 (2021)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 4.5 pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	BPS/Susenas	%	100,57	100,67	98,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100	93,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMP/MTs/Sederajat	BPS/Susenas	%	99,75 (2016)	100,50	86,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100	76,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMA/SMK/MA/ Sederajat	BPS/Susenas	%	86,18 (2016)	91	67,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	100	98,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/laki-laki di PT (%)	BPS/Susenas	%	118,84 (2016)	157,98	92,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
Target 4.6 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi								
4.6.1(a)	Percentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	87,14	95,18	88,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
4.6.1(b)	Percentase angka melek aksara	BPS	%	100	100	99,88	Dinas Pendidikan dan	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	penduduk umur 15-24 tahun						Kebudayaan	
	Percentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	BPS	%	87.14	95.18	93,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	98 (2016)	100			▲
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%SD	97,62	98.92		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	98,42	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) Internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	45,59	54.59	69.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
		Dapodik	%SMP	54,70	68.7	90.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	1,8	6.3	96.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	33,99	71.49	97,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	31,73	43.23		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c)Komputer tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	58,51	63,01	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	47,90	47,90	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	72,07	76,57	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke : (d) Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik	%SD	PM	PM	78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	PM	PM	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	PM	PM	81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	PM	PM	81	Dinas Pendidikan dan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
							Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	PM	PM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dapodik	%SD	100	100	51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	100	100	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100	62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri dari sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SD	100	100	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	100	100	69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100	73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami		%		PM	PM		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	perundungan dalam 12 bulan terakhir.							
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.								
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dikbud	%	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.c Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Percentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	51,42	68,42		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	94,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	98,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik		orang	3289	4814	98,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah Kepala SMK yang bersertifikat pendidik		orang	1741	2451	97,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	76,88	88,28		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase guru Dikdas dengan kualifikasi minima		%	83,26	96,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	S1/D4							
	Percentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	77,51	93,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	95,77	99,77		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase guru Dikmen dengan kualifikasi minima S1/D4		%	99,22	99,79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	99,48	100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4		%	98,96	99,58		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase Guru Negeri yang bersertifikat		%	80,03	95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Percentase Guru Swasta yang bersertifikat		%	13,89	19		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam setiap periode pemerintahan selama lima tahun, pembangunan manusia menjadi prioritas pemerintah dengan indikator pencapaiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM dijadikan sebagai salah satu target bagi perwujudan Visi "NTB

Gemilang” kaitannya dengan pembangunan manusia melalui program unggulan di sejumlah sektor terkait. Capaian IPM Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022, IPM Provinsi NTB mencapai 69,46. Capaian ini meningkat 1,18 persen dibandingkan tahun 2021. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Umur Harapan Hidup saat lahir: 67,07 tahun, Rata-rata Lama Sekolah: 7,61 tahun Harapan Lama Sekolah: 13,96 tahun. Pengeluaran per Kapita pertahun yang disesuaikan: Rp10.681.000.

Kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan status capaian IPM yang tinggi pada tahun 2022 sebanyak 3 kabupaten/kota. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya masih berstatus sedang.Tiga kabupaten/kota dengan status IPM tinggi di NTB, yaitu Kota Mataram 79,59, Kota Bima 76,84 dan Kabupaten Sumbawa Barat 72,65. "Sejak tahun 2017, IPM Kabupaten Sumbawa Barat mencapai status tinggi dan bersanding dengan Kota Mataram dan Kota Bima.Sementara 7 kabupaten/kota lainnya dengan IPM berstatus sedang adalah Lombok Barat 69,41, Lombok Utara 65,70, Lombok Tengah 67,57, Lombok Timur 67,59. Selanjutnya, Sumbawa 68,89, Dompu 69,15 dan Bima 67,57

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang di hadapi Provinsi NTB dalam rangka peningkatan IPM, di antaranya: (a) pola pikir masyarakat sulit diubah; (b) fungsi koordinasi dengan Kabupaten /Kota masih lemah; (c) partisipasi masyarakat dalam pengembangan SDM masih lemah. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mengatasi tantangan tersebut dengan terus menggiatkan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, koordinasi dan edukasi secara intensif. Secara umum Peningkatan IPM Provinsi NTB disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS dan RLS), serta dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan). Secara keseluruhan kinerja capaian program yang mendukung indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berada pada predikat kinerja sedang.

Perbedaan angka antara Provinsi NTB dengan provinsi di atas NTB. Paling tidak ada 3 provinsi yang selisih angkanya hanya kurang dari 1 poin, yaitu Provinsi Kalimantan Barat (terpaut 0,58), Gorontalo (terpaut 0,86) dan Maluku Utara (terpaut 0,87). Dan bila dilihat dari progres capaian nilai IPM ini, Provinsi NTB berhasil mereduksi dari terpaut 0,81 poin pada tahun 2010 menjadi 0,58 poin pada tahun 2014 selisih IPM dengan Provinsi Kalimantan Barat. begitu pula dengan Provinsi Gorontalo yang berhasil direduksi dari selisih 1,49 pada tahun 2010 menjadi 0,86 pada tahun 2014, dan Provinsi Maluku Utara yang berhasil direduksi dari terpaut 1,63 pada tahun 2010 menjadi tinggal 0,87 pada tahun 2014.

Bila dilihat pertumbuhan nilai IPM secara Nasional sejak tahun 2010 hingga 2014, Provinsi NTB mengalami peningkatan tertinggi se-Indonesia yaitu sebesar 3,15 poin, disusul Sulawesi Tengah sebesar 3,14 poin dan NTT sebesar 3,05 poin. Oleh karena itu, maka tidaklah mengherankan bila Provinsi NTB berhasil memperoleh penghargaan terbaik MDGs dalam upayanya mempercepat pembangunan.

Bila melihat dari semua angka-angka itu, maka kita optimis bahwa IPM Provinsi NTB dalam satu atau dua tahun ke depan dapat lebih meningkat lagi urutannya. Dukungan dari segenap lapisan masyarakat tentu sangat diharapkan agar kerja keras yang telah dilakukan Pemerintah selama ini dapat lebih memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat NTB sendiri

Kebijakan dan Strategi

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu memahami kondisi eksisting pendidikan NTB. Kondisi eksisting yang dimaksud adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan pembangunan pendidikan kita saat ini adalah (a) komitmen politik kuat, baik Gubernur-Wakil Gubernur maupun DPRD; (b) dukungan SDM dan sarana-prasarana relatif memadai; dan (c) aplikasi IT yang mudah diakses.

Selain itu pembangunan pendidikan NTB memiliki beberapa peluang, di antaranya (a) program pengiriman 1000 mahasiswa ke luar negeri; (b) NTB Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang erat kaitannya dengan penyiapan SDM; dan (c) SDA Nusa Tenggara Barat sangat

andal, baik sektor pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, maupun kelautan dan perikanan.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan selain untuk mendukung pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, juga untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah: Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas) tahun 2022 sebesar 100 persen dari target capaian 100 persen dan indikator persentase digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul) sebesar 32,76 dari target 31,89 persen.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya-upaya untuk percepatan pencapaian Peningkatan IPM adalah: Pertama, akselerasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Mengacu pada rapor mutu pendidikan NTB yang diterbitkan oleh LPMP NTB, mutu guru dan tenaga pendidik masih sangat rendah (mencapai 40% dari 100% yang diharapkan) diantaranya adalah: (a) peningkatan kapasitas guru (kuantitas dan kualitas); (b) peningkatan komitmen kerja Guru dengan pola “Penghargaan dan Hukuman”; serta (c) persemaian guru unggul dengan membidik siswa-siswi SMA terbaik, untuk dilakukan pembimbingan minat menjadi guru terutama untuk mata pelajaran sains dan matematika, atau pelajaran lainnya yang dipandang urgen.

Kedua Program revitalisasi SMK. Program ini dimaksudkan untuk memastikan agar output SMK siap menjadi pewirausaha muda berbakat, yang memiliki kompetensi kerja, dan dapat diterima di pasar kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (a) mengevaluasi kesesuaian program studi yang ada dengan minat masyarakat, relevansi permintaan pasar kerja, dan keseusian dengan sumber daya lokal dan potensi pendukung di lingkungan sekolah; (b) penguatan lembaga dengan pemenuhan 8 standar pendidikan, serta regrouping sekolah; (c) SMK harus menjadi lokomotif menumbuhkan sektor industry, setiap SMK diwajibkan membuat suatu produk unggulan sebagai hasil karya siswa atau “one school one product” (OSOP).

Ketiga, wajib belajar 12 tahun. Program ini diharapkan dapat mendongkrak APK-APM dan IPM (pada variabel angka lama sekolah [schooling year]). Secara kumulatif Angka Lama Sekolah (ALS) di NTB sekitar 8 tahun. Artinya, penduduk NTB tingkat pendidikan penduduk NTB rata-ratanya setara kelas VIII SMP/MTs (belum tamat SMP/MTs), yang jauh di bawah ALS provinsi lain. Program ini tidak terlalu mahal karena biaya PSB telah ditangani oleh BOS sehingga butuh penguatan dari Komite Sekolah dan BOS Daerah. Program ini harus dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai sosialisasi yang masif.

Keempat, gerakan penuntasan buta aksara. Gerakan Penuntasan Buta Aksara jauh lebih penting karena menyangkut kebutuhan literasi dasar masyarakat dan menjadi penyebab lemahnya kemajuan berinteraksi pada zaman serba digital ini dan penahan laju IPM. Implementasi program ini membutuhkan banyak pihak, yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta, Dinas Dikbud tetap sebagai pengendali program

Kelima, Persemaian Pemuda Bintang. Yaitu suatu program yang bertujuan untuk: (a) menemukan Siswa Berbakat (*gifted*) (untuk kemudian dibina, diarahkan dan dibiayai) dalam bidang sains, matematika, dan teknologi untuk dipersiapkan menjadi calon peserta kompetisi sains, matematika dan teknologi di tingkat nasional dan internasional; (b) menemukan calon siswa ataupun mahasiswa (lalu diarahkan dan dibiayai) yang siap dikirim ke luar negeri atau ke perguruan tinggi terbaik di luar maupun dalam negeri sehingga dapat menjadi andalan pembangunan, baik daerah maupun nasional. Data beasiswa Dalam Negeri tahun dari tahun 2018-2022 sebanyak 4872 orang sedangkan Beasiswa ke Luar sebanyak 723 orang; (c) mengefektifkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dapat membangun daya saing positif dan wadah aktualisasi (seperti Pramuka, PMR, Pencinta Alam, Kelompok Ilmiah Remaja, Sanggar Seni, klub-klub olahraga siswa, dan lain-lainnya); serta (d) menangkal serangan pemakaian narkoba dan kenakalan remaja dengan melahirkan segudang prestasi dari anak-anak berbakat (*gifted and talented student*).

Keenam, Persemaian Pelaku Budaya dan Kesenian Daerah. Program ini dimaksudkan untuk menemukan secara masif bibit-bibit pelaku seni dan budaya NTB baik Sasak, Samawa, dan Mbojo. Sebab, selama ini “kebudayaan” dipahami secara sempit sebagai “berkesenian” dan masih pola pembangunannya masih bersifat parsial. Transfer budaya harus dilakukan secara masif dan kontinyu sehingga beregenerasi serta dapat melahirkan pola budaya baru berkarakter Sasambo. Selain itu, program ini berorientasi pada apresiasi dan penguatan sanggar-sanggar seni dan budaya, baik yang dikelola oleh masyarakat, sekolah, ataupun kampus.

5 KESETARAAN GENDER		Tujuan 5. Kesetaraan Gender						
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2K B Provinsi NTB	%	0,069	0,061	0,37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	⚠
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	Anak	301	142	449	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial	⚠
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak	DP3AP2K B	%	0,014	0,015	0,012	Dinas Pemberdayaan	🟢

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Provinsi NTB					Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial	
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS melalui SPHPN	%	0,035	0,043	0,76	Dinas Sosial (Unit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun))	●
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun	BPS/Susenas	%	0,62 (2016)	0	0,58 (realisasi nasional 2021)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	▲
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.	BPS/Susenas	%	18.86 (2016)	8	16,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN	%	20 (2016)	20	NA	BKKBN	▲
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan	%	75 (2012)	<65	46,91	BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
		SUPAS					Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS melalui Susenas	%	91.25 (2016)	98.86	93,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara Nasional								
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)	KPU Provinsi NTB	%	21,43 (2014)	11	20 (2019)	KPU	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Provinsi NTB)	KPU Provinsi NTB	%	9.23 (2014)	65	1.54 (2019)	KPU	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD, BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	26	BKD	
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan Kesehatan	BKKBN, BPS melalui SDKI	%	77,9 (2012)	>82	NA	BKKBN	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang kontrasepsi modern).	BKKBN	%	15,6	4.95	9,98	BKKBN	●
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	99.6	100	NA	BKKBN	
	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual	Biro Hukum, BKKBN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UU / PP	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN	
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	BPN	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	BPS melalui Sesenas	%	48,96	61	61,11	Dinas Komunikasi, Informasi dan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PengungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.								
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana	OPD	2	2	2	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana	●

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022 sebanyak 418 kasus yang tersebar di 10 kabupaten kota di provinsi NTB. Angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak ada di kabupaten Lombok Timur dengan 95 kasus dan terendah ada di kota mataram dengan 14 kasus. Jenis kasus terdiri dari kekerasan fisik 81 kasus, psikis 69 kasus, seksual 95 kasus, eksploitasi 7 kasus, penelantaran 22 kasus dan kekerasan lain 62 kasus. Pelaku kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak paling besar dilakukan oleh orang tua kandung, paman dan kakak dari korban. Sedangkan kekerasan yang di alami oleh perempuan dewasa banyak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tantangan dan Pembelajaran

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam



Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN. Namun, dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, ternyata masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional disertai pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah nasional selama rata-rata sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan indikator ketimpangan dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki skor IDG sebesar 91,08 pada tahun 2022.

Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen yang paling rendah, dimana saat ini hanya ada 1 anggota perempuan dari total 65 kursi di DPRD. Hal ini menyebabkan keterlibatan 94 perempuan dalam parlemen turun signifikan di tahun 2019-2020, yakni hanya sebesar 1,52% - 1,54%, dimana pada periode tahun 2010 hingga 2018 berada pada level 9 – 10%. Selain itu, komponen ekonomi dan ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh sumbangsih pendapatan perempuan dan tenaga profesional perempuan juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, berdasarkan indikator ketimpangan yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG provinsi Nusa Tenggara Barat dalam tren meningkat dari tahun ke tahun meskipun masih di bawah rata-rata nasional. Sebagian besar indikator ketimpangan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat memperlihatkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan nasional. Sebanyak 6 (enam) indikator termasuk ke dalam

kategori yang memiliki ketimpangan di atas nasional, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Keluhan Kesehatan, Tenaga Profesional, serta Sumbangan Pendapatan. Sementara itu, hanya ada dua indikator yang relatif lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional, yakni indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengeluaran Per Kapita. Dapat disimpulkan dari indikator ketimpangan yang cukup besar terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan, sementara ketimpangan di sektor ekonomi relatif lebih baik. Tingginya ketimpangan gender dari sisi aspek pendidikan secara umum disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF memperlihatkan hanya 39 % anak SD mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 19 % anak dalam kemampuan matematika. Kondisi ketimpangan di sektor pendidikan tersebut diperparah dengan masih kentalnya budaya patriarki yang dianut masyarakat, sehingga hal ini turut membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, masyarakat Sasak sebagai suku terbesar di pulau Lombok (yang merupakan pulau terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat) mengantut sistem patrilineal, yakni menarik garis keturunan pihak laki-laki. Dengan adanya sistem patrilineal ini turut mendorong melekatnya budaya patriarki sehingga anak laki-laki akan menjadi prioritas pertama dalam mengakses pendidikan (Nursaptini,2019).

Di sisi lain, berdasarkan survei UNICEF terlihat bahwa akses terhadap proses persalinan di Nusa Tenggara Barat mencapai 93% kelahiran sudah dibantu oleh tenaga kesehatan, dimana hal ini memperlihatkan kecenderungan kematian 95 perempuan saat proses melahirkan sudah relatif kecil. Namun demikian, jika dilihat dari layanan kesehatan reproduksi masih perlu ditingkatkan, terutama akses alat kontrasepsi modern. Kurangnya penggunaan alat kontrasepsi disebabkan beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan laki-laki di Nusa Tenggara Barat terhadap program Keluarga Berencana (KB), masih adanya

keterbatasan distribusi alat kontrasepsi modern bagi laki-laki di provinsi Nusa Tenggara Barat, serta masih kentalnya budaya patriarki sehingga hal ini turut memaksa perempuan untuk tunduk kepada laki-laki (Permono, 2020).

Sementara itu, jika dilihat dari aspek ekonomi, ketimpangan di Nusa Tenggara Barat relatif lebih baik karena berada di bawah ketimpangan nasional. Hal ini salah satunya ditopang oleh rendahnya ketimpangan dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar perempuan di Nusa Tenggara Barat memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Meskipun angka TPAK di Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan cukup baik, namun sebagian sektor pekerja tersebut masih terpusat di sektor informal terutama di sektor pertanian, yang sebagian besar bekerja untuk mengolah lahan pertanian milik keluarga sendiri. Perempuan pedesaan di Nusa Tenggara Barat tersebut bekerja untuk membantu suami karena rendahnya pendapatan keluarga, sehingga banyak angkatan kerja perempuan yang berstatus menjadi pekerja keluarga tidak dibayar. (Kusuma, 2017). Ditambah lagi, tingkat pendidikan perempuan banyak didominiasi oleh pendidikan rendah, yaitu SD maupun tidak tamat SD sehingga hal ini juga turut menyebabkan masih rendahnya kualitas TPAK di provinsi Nusa Tenggara Barat (Permono, 2020).

Isu lain yang juga mengemuka terkait ketimpangan gender di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah isu perkawinan anak. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia setelah provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan anak merupakan permasalahan multidimensi yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan ketenagakerjaan.

Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mencapai target 100 % Perangkat Daerah dalam pembangunan berbasis responsif gender. Pencapaian 100 % Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama seluruh OPD terkait di

lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. dalam proses penganggarannya dan eksekusinya sehingga dapat mendorong terwujudnya indikator bidang pembangunan yang berbasis gender seperti adanya keterwakilan perempuan yang 30 % di legislatif.

Kesetaraan Gender dapat digambarkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sehingga menjadi output kegiatan dan outcome program responsif gender di instansinya. Setiap OPD harus menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), yaitu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dari analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga rencana aksi. Instansi juga mampu menyusun Gender Budget Statement (GBS), yaitu dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran sampai ke desa. Selanjutnya PPRG menjadi strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, yang secara konsisten tertuang dalam RPJMD 2019-2023 dan RKPD.

Kebijakan dan Strategi

Dari sisi penganggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan telah memiliki komitmen yang cukup besar untuk mengurangi ketimpangan gender, dimana hal ini terlihat dari adanya Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat serta tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023, yang secara eksplisit menyebutkan salah satu misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan 96 berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan gender yang proporsional. Meskipun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki political will terhadap anggaran yang responsif gender melalui regulasi dan misi pembangunan yang ditetapkannya, namun terlihat belum maksimal dalam perencanaan dan implementasi anggaran. Selain itu, komunikasi lebih banyak

berlangsung secara internal pemerintahan, sementara komunikasi eksternal dengan stakeholder yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan perempuan masih minim, sehingga hal ini menyebabkan masih terbatasnya informasi program kesetaraan gender kepada khalayak umum. Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah; perkuatan kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup Provinsi NTB, pada tahun 2020 telah diresmikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari kabupaten/kota. Selain itu, melalui APBD perubahan untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, telah didirikan UPTD bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten 9 Kabupaten/Kota kecuali Kota Mataram yang belum memiliki. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mencegah, menangani dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, perangkat daerah terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.



Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua..								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki	BPS : Susenas	%	69.58 (2016)	78.9	95,40	Dinas Pekerjaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.						Umum dan Penataan Ruang Penataan	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter /detik	299,196	299,196	N.A	Dinas PU	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	74.20	84.95	79,11	Dinas PU	▲
Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BBPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	43,07 (2016)	56.9	75,10 (2021)	Dinas Kesehatan	●
6.2.1.(b)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	BPS :Susenas	%	58,31 (2016)	70	83,12	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	●
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/Kelurahan	1100	1100	1151	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	●
6.2.1 (d)	Jumlah desa/Kelurahan yang Open Defacation free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	%	1100	81,79	100	Dinas Kesehatan	●
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur	Dinas PU	Kab/Kota	10	10	10	Dinas Pekerjaan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	air limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan dan komunal.						Umum dan Infrastruktur	
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	1	1	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	●
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM	
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM	
Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LHK	Jumlah RPDAST	1	1	1	Dinas LHK	●
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Stasiun	62	62	153	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	●
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan	Kegiatan	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
		Infrastruktur			-	NA		
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding(MoU) lintas Negara.	Dinas LHK	DAS	1	-	NA	Dinas LHK	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihian kawasan DAS.	Dinas LHK	Ha	200	200	NA	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Wilayah sungai	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	25	48	3444 (orang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	●
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas LHK	DAS	2	-		Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	●
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LHK	DAS	1	32	50	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	●
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang	Dinas	Danau	1	1		BPDASHL	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	dingkatkan kualitas airnya.	LHK					Dodokan Moyosari	
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LHK	NA	1	1		BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LHK	NA	1	1		BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LHK	NA	4090	6000	14.500	BPDASHL Dodokan Moyosari	●
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LHK	DAS	2	5		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi NTB pada tahun 2021 mencapai 69,89 poin atau melampaui target sebesar 67,98 poin. Tingginya angka IKLH Provinsi NTB menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi NTB.

Kondisi cakupan akses air minum bersih pada tahun 2022 sebesar 95,40 meningkat 16,64% dibandingkan tahun 2021 sebesar 78,76 persen. Nilai indeks kualitas air (IKA) yang cenderung meningkat dan berada pada kategori "Baik" dalam tiga tahun terakhir. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Terdapat peningkatan nilai IKA sebesar 3,16 poin dari

Tahun 2019 ke 2022. Peningkatan nilai IKKA diindikasikan adanya perbaikan karena adanya penanganan oleh pemerintah untuk perbaikan kualitas air, sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya.

Tantangan dan Pembelajaran

Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah terjadi penurunan kualitas lingkungan yang tergambar melalui kondisi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 56.53 (kurang baik). Parameter pembentuk kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Parameter IKTL adalah indeks kualitas tutupan lahan yang digambarkan melalui perbandingan luas lahan kritis dengan luas tutupan lahan. Berdasarkan data luas lahan kritis Provinsi NTB tahun 2016 mencapai 578.645,97 Ha atau sekitar 29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud adalah lahan kritis yang terdapat didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Kabupaten Lombok Utara memiliki persentase luas lahan kritis terbesar jika dibandingkan dengan luas wilayahnya yaitu sebesar 54.74%. Luas lahan kritis terluas didalam kawasan hutan berada di Kabupaten Bima seluas 57.554,79 Ha, sedangkan luas lahan kritis diluar kawasan hutan terluas berada di Kabupaten Sumbawa seluas 110.814,28 Ha. Jika akumulasi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, maka Kabupaten Bima memiliki luas lahan kritis terluas sebesar 161.120,5 Ha.

Faktor penyebab meningkatnya lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, dan aktivitas lain yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian,

penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

Ketersediaan air baku yang tidak merata dan banyaknya mata air yang hilang maupun tertutup akibat kerusakan tutupan lahan di daerah resapan dan tanah longsor akibat gempa menjadi tantangan dalam penyediaan layanan air bersih/minum. Di banyak lokasi juga didapatkan, bahwa infrastruktur penyediaan air minum terutama dari jaringan perpipaan banyak yang tidak berfungsi karena sambungan illegal dari oknum-oknum yang dilewati oleh jaringan pipa dan tidak berfungsinya lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga infrastruktur tidak berfungsi secara berkelanjutan.

Penurunan kualitas air juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, usaha peternakan/perikanan, industri, dan keperluan rumah tangga. Air sungai menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihian agar dapat layak digunakan. Selain itu, tingginya nilai E Coli disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

Dalam penyediaan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat dibutuhkan kerjasama antar daerah dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kesadaran kolektif kita untuk menjaga kelestarian lingkungan juga wajib untuk ditingkatkan, karena potensi dan ketersediaan sumber air baku ini sangat bergantung pada kelestarian alam. Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah memberikan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Provinsi NTB.

Kebijakan dan Strategi

Komitmen perencanaan dan penganggaran hijau Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditelusuri dari dokumen perencanaan

pembangunan daerah dan kebijakan alokasi anggaran tahunan bagi pendanaan aktifitas-aktifitas terkait ekonomi hijau terutama pada isu-isu perubahan iklim khususnya terkait dengan kualitas tutupan lahan di NTB. Dalam kurun waktu 2017 – 2019, pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan didukung oleh beberapa program dengan total realisasi belanja yang fluktuatif. Total realisasi belanja terbesar selama 3 tahun terakhir dialokasikan untuk mendukung Program Perlindungan Hutan Konservasi SDA dan Ekosistem (47,17%). Kemudian disusul dengan program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial (32.79%), program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (14,57%), dan program Pengelolaan Hutan (5,45%). Adapun strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Pelibatan semua sumberdaya terkait/lintas Perangkat Dinas sebagai pelaku utama dalam penyusunan kerangka peraturan perundangan tentang pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
2. Penambahan secara bertahap sarana dan prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan melalui tahapan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, perencanaan, pendanaan dan investasi di provinsi dan kabupaten/kota
3. Pelibatan pemerintah daerah bersinergi kuat untuk mewujudkan pengembangan lembaga layanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bekerjasama dengan pemerintah pusat

Pelibatan pemangku kepentingan Perumahan Permukiman Air minum dan sanitasi di masyarakat melalui edukasi, sosialisasi lingkungan yang bersih sehat kepada masyarakat dan kerja sama dengan lembaga swasta dalam penyediaan sarana prasarana Air Minum dan Sanitasi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan hidup merupakan tujuan pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan, kesehatan dan lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pada pasal 6 dan 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya taktis pemerintah dalam upaya mencapai target tersebut melalui kelembagaan program pembangunan Perumahan Permukinan Air Minum dan Sanitasi (PPAS) dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat sebagai asset bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam RPJMN 2020-2024 telah dituangkan melalui pilar ke-4 yaitu kesejahteraan yang terus meningkat. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN salah satu agendanya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

perlindungan mata air dilakukan pada zona perlindungan yang telah ditetapkan secara spasial. Setidaknya terdapat tiga zona perlindungan mata air yang harus didefinisikan. Zona perlindungan yang dimaksud adalah: zona I, zona perlindungan titik mata air; zona II, zona perlindungan; dan zona III, zona perlindungan DTA mata air. Zona I merupakan zona perlindungan yang bertujuan untuk melindungi air yang keluar di titik mata air dari semua zat pencemar. Penentuan zona I pada umumnya adalah radius 10-20 m dari titik mata air. Upaya perlindungan yang sering dilakukan pada zona ini adalah pembuatan bak penampung air sebelum didistribusikan. Hal lain yang penting dirumuskan adalah mekanisme pemanfaatan air, seperti mekanisme perizinan, penetapan aturan-aturan, dan bila perlu dilengkapi dengan standar pengelolaan yang ramah lingkungan. Zona II ditentukan dengan tujuan untuk melindungi mata air dari zat pencemar berupa bakteri *patoghen* yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air. Penentuan batas zona II diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri *colli* selama kurang lebih 60 hari ke titik mata air. Pada praktik di lapangan, batas zona ini ditentukan berdasarkan

jarak dari mata air ke arah hulu (*upstream*) sejauh 200-300 m. Pada zona ini, berbagai kegiatan yang berpotensi mencemari air tidak diperkenankan, termasuk kegiatan budidaya yang menggunakan pestisida atau pupuk berlebihan dan kegiatan antropogenik lainnya. Zona III merupakan DTA mata air, tempat dimana sebagian air hujan yang jatuh akan terinfiltasi dan memasuki sistem air tanah, hingga pada akhirnya muncul di titik mata air. Zona ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi mata air dari zat pencemar yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat.

Secara praktis di lapangan, zona III ditentukan berdasarkan luas tangkapan air mata air. Penentuan batas DTA mata air ini akan sangat tergantung pada pemahaman tentang mata air yang telah dikemukakan sebelumnya. Mata air yang mempunyai sistem aliran lokal dapat menggunakan pendekatan batas morfologi. Mata air dengan sistem aliran regional dapat menggunakan pendekatan geologi atau *tracer test*.

Pembangunan sektor Perumahan Permukiman air Minum dan Sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi NTB sudah menunjukkan komitmen kuatnya dengan penyiapan program-program terintegrasi dan peningkatan alokasi anggaran APBD untuk Perumahan Permukiman Air dan Sanitasi. Akan tetapi, dukungan dari masyarakat, pihak Swasta, maupun Lembaga swadaya masyarakat atau LSM masih diperlukan, karena keterbatasan ketersediaan fiscal daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan target pencapaian RPJMN dapat dilihat dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”.

Program Percepatan Pembangunan Perumahan Permukinan Air Minum dan Sanitasi (PPAS) merupakan program pembangunan Air minum dan Sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non-

pemerintah di seluruh tingkatan. Sebagai sebuah Program Nasional yang dirancang untuk kemaslahatan masyarakat, maka POKJA PPAS harus dipandang sebagai sebuah alat, peluang, atau momentum bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mulai melakukan perencanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan kinerja pengelolaan yang lebih baik kepada masyarakat Cakupan air minum menjadi salah satu indukator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023, Penyelenggaraan SPAM Regional menjadi jalan keluar jangka panjang yang harus diwujudkan untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang kita hadapi tiap tahun di NTB serta Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dan BUMDES yang akan mengelola SPAM yang dibangun di desa.

Kolaborasi dan sinergi antar sektor dalam penyediaan air bersih/minum, karena sumber pendanaan untuk infrastruktur air bersih/minum itu dari berbagai sumber seperti: Pengembangan SPAM dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Program PAMSIMAS, DAK Air Minum, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBD Desa, program dari CSR Swasta dan BUMN,dan NGO .

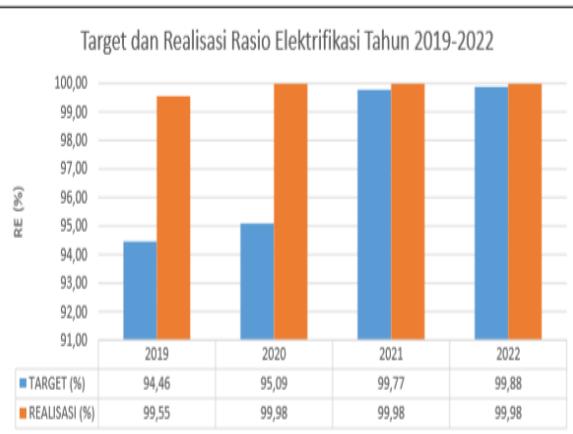


Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	87,78 (2018)	93.4	99,98	Dinas ESDM	●
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	kwh	579,05	687.61		Dinas ESDM	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas	%	54,76	55.18	91,16	Dinas ESDM	●

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Sampai Tahun 2022 Urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan target setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi kelistrikan di Provinsi NTB saat ini semakin baik baik dari sisi penyediaan pembangkit, ditribusi jaringan hingga kualitas listrik yang diikmati oleh masyarakat. Peningkatan rasio elektrifikasi selama empat tahun terakhir juga dibarengi adanya pemerataan distribusi listrik yang lebih merata. Tercatat sejak tahun 2018 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 desa/kelurahan mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber Non PLN.



Sebanyak 5 (lima) desa yang mendapatkan listrik dari sumber Non PLN berada pada Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulan teh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa tersebut berada pada wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut. Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten

Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut.

Tantangan dan Pembelajaran

Rasio elektrifikasi sampai dengan Akhir Tahun 2022 masih terdapat 34 Dusun yang belum berlistrik PLN dengan jumlah Rumah Tangga 2.751. Sejak tahun 2012 s/d 2022 telah dilaksanakan penyambungan Listrik Murah dan Hemat bagi 31.853 RTS masyarakat tidak mampu baik melalui sumber APBN, APBD dan Sumber lainnya. Untuk Tahun 2022 melalui APBD telah disambung untuk 125 RTS di Pulau Lombok. Namun demikian kenyataannya di beberapa daerah masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik terutama masyarakat miskin dan daerah terpencil dan perbatasan di samping itu juga perhitungan rasio elektrifikasi sebagian besar mengandalkan dari data jumlah pelanggan PLN yang belum memperhatikan klasifikasi berdasarkan identitas pelanggan PLN. Sehingga perhitungan jumlah masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik belum menggambarkan kondisi aktual dilapangan

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi bauran energi semester I tahun 2022 sebesar 19,16% dari target sebesar 17,43% capaian tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya 13,04% dari target 15,76%. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi bauran energi tersebut, salah satu yang terpenting dalam mencapai target bauran adalah adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong

pemakaian energi terbarukan dengan berbagai kemudahan salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi pengguna energi terbarukan. Namun demikian, hal yang menggembirakan adalah adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang bauran energi. Sampai dengan akhir tahun 2022 energi baru terbarukan yang digunakan oleh pembangkit PLN di wilayah NTB sebesar 7,50% target dari target 5,64% pada tahun 2022, hal ini disumbang dari adanya empat pembangkit tenaga surya berkapasitas 22,4 MW yang baru dibangun dan sudah mulai masuk sistem PLN pada tahun ini 2021. Hal lainnya adalah dengan digunakannya bahan bakar solar B30 bagi keperluan transportasi dan industri juga ikut berperan dalam menyumbang peningkatan bauran energy.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan penyambungan listrik murah dan hemat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui oleh jaringan listrik namun belum mendapat layanan listrik, maupun sudah mendapat layanan listrik tetapi masih menyambung pada tetangganya. Sejak tahun 2012 hingga 2022 Pemerintah Provinsi telah melakukan pemasangan listrik murah dan hemat pada 24.981 rumah tangga sasaran yang bersumber dari anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya seperti CSR BUMN.

Peningkatan bauran energi di sektor ketenagalistrikan juga didukung oleh beberapa program pemerintah maupun swasta diantaranya: - Pembangunan PLTS komunal dengan kapasitas 26,8 Mwe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk keperluan captive power pada operasi penambangannya. Pemanfaatan biomasa oleh PLTU Jeranjang melalui Program cofiring yang akan ditargetkan sebear 5% kebutuhan bahan bakarnya akan disuplai menggunakan biomassa dengan memanfaatkan sampah. - Pembangunan 6 unit PLTS rooftop kapasitas 20 kWp pada kantor-kantor pemerintah maupun lembaga pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2020.



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

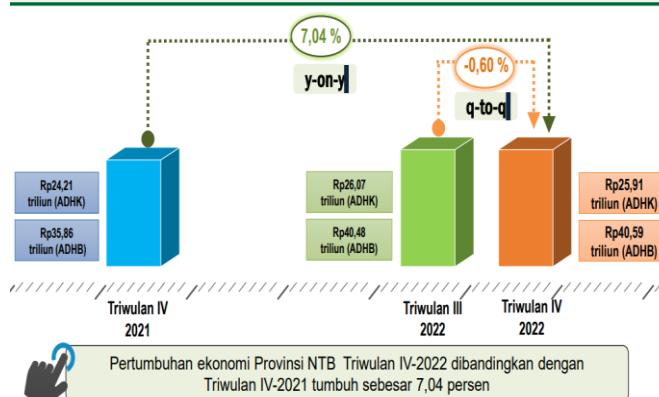
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	-1,09	0,96	5,32	Semua OPD	
8.1.1. (a)	PDB per kapita	BPS	Rupiah (ADH Berlaku)	25.008	34.985	28.673	Semua OPD	
8.2: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakern as	%	PM	PM	-0,83 (2021)	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakern as	%	58.42 (2016)	59,11	63,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui Sakern as	%	35,93	40.26	24,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakern as	%	96,81	96,01	98,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan	
8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan productif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakern as	Rupiah	10.628 (2016)	11.500	11.734	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sakern as dan Sensus Pendud uk	%	3,32	3,19	2,89	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakern as dan Sensus Pendud uk	%	17,27	17,08	13,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
Target 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS melalui Sakern as	%	19.53 (2016)	15	23,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.9 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	orang	1.858.24 2	7.538.2 50	126.539	Dinas Pariwisata	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susena s	orang	2.215.21 1	8.568.7 40	1.249.756	Dinas Pariwisata	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Bank Indonesia	Milliar US \$	13,139	PM	4,26	Bank Indonesia	
8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKP BU, OJK, BPS	Bank/ ATM	31/896 (2015)	PM		BI/OJK	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/St atistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	PM		BI/OJK	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	orang	PM	PM	8.488.125	BI/OJK	●

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

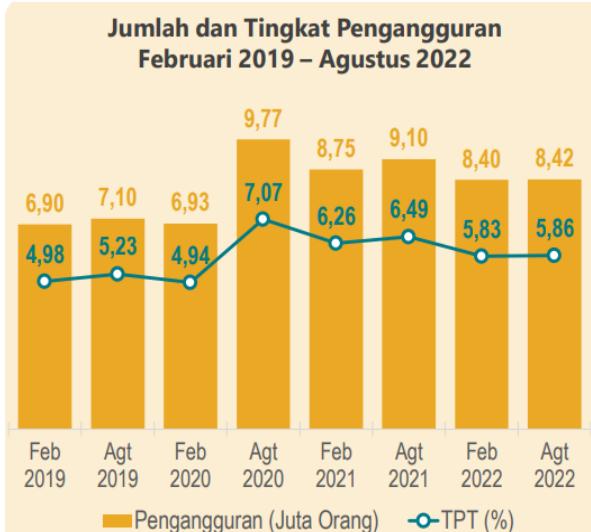
Pertumbuhan PDRB Triwulan IV-2022



Produksi padi triwulan IV/2022 mengalami peningkatan sebesar 0,18 persen dibandingkan dengan triwulan IV/2021. Sementara itu, secara tahunan produksi padi mengalami peningkatan 2,71 persen tahun 2022 ini dibandingkan tahun 2021.

Berdasarkan data angkutan udara, terjadi peningkatan jumlah penumpang berangkat sebesar 46,93 persen pada triwulan IV/2022 ini atau meningkat dari 188.388 penumpang pada triwulan IV/2021 menjadi 276.790 penumpang pada triwulan IV/2022 ini. Jumlah tamu menginap di hotel meningkat 31,36 persen pada triwulan IV/2022 dibandingkan triwulan IV/2021. Jumlah tamu menginap di hotel bintang meningkat dari 165 ribu tamu pada triwulan IV/2021 menjadi 236 ribu tamu pada triwulan IV/2022 (naik 43,24 persen) sedangkan jumlah tamu menginap di hotel non bintang

Jumlah dan Tingkat Pengangguran Februari 2019 – Agustus 2022



meningkat dari 147 ribu tamu menginap pada triwulan IV/2021 menjadi 173 ribu tamu menginap pada triwulan IV/2022 (naik 18,01 persen). Selama tahun 2022, Ekspor Barang dan Jasa mengalami peningkatan utamanya disebabkan oleh peningkatan Ekspor Barang LN yang tercatat sebesar 3.099 juta USD sedangkan Ekspor Barang LN pada tahun 2021 tercatat 1.140 juta USD. Selama tahun 2022, Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan. Impor Barang LN tahun 2022 tercatat sebesar 210 juta USD sedangkan Impor Barang LN pada tahun 2021 tercatat 151 juta USD

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,83 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,30 juta orang, naik sebanyak 4,25 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,57 juta orang). Hanya Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,05 juta orang. Sebanyak 55,06 juta orang (40,69 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,14 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,39 persen poin dan 1,77 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Persentase pekerja komuter Agustus 2022 sebesar 5,97 persen, mengalami peningkatan 0,37 persen poin dibanding Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,24 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,32 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,11 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,48 juta orang).

Pembangunan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan perolehan



Provinsi NTB optimis dengan adanya pengembangan KEK Mandalika dan Kawasan samota yang terus berbenah.

Tantangan dan Pembelajaran



Upaya untuk meningkatkan kunjungan wisataan ke NTB pada tahun 2022 salah satunya dengan memperbanyak perhelatan atau kegiatan wisata. Kemudian memperbanyak promosi di luar daerah dan luar negeri, meningkatkan pelayanan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nama-nama even tahun 2022 : Lombok-Sumbawa trevel mart, Mandalika surfing opan championship,Pra-musim MotoGP, L'etape Tour de France, Internasional Surfing Series Mandalika, Lombok Writer Festival, Festival Bau Nyale, Festival Desa Wisata, Pesona Budaya Lombok Sumbawa Moto GP, Pesantren EXPO, Parade seni dan budaya Islam, NTB Great Sale,Gebyar Tambora, Tambora Challenge, Pacua Jara,



MXGP Tambora/Moyo, Lakey Surfing Open Champioship,Rinjano Worls Musik, Geopark Rinjani Sport Tourism Festival, Gili Indah Begawe, Photography Contest, Sengigi-Pusuk Loop Challenge, Lombok Sharia Festival, HK Endurance Challenge, Festival Moyo, Mekaki Marathon, Maulid Adat Bayan,Maulid Senggigi, Festival Lasakosa, IATC & Worls Superbike, Kite Surfing Kaliantan-Jerowaru, mandalika Super Fest, Festival Taliwang/Lumpur, Kejuaraaan paralayang Mantar KSB, Pemilihan Putri Indonesia, Lombok Sumbawa Tenun Festival, Jambore IMI, Sembalun KOM, Tasyakuran HUT NTB.

Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung oleh unsur amenitas, aksesibilitas dan atraksi masih belum memadai sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan. Masih belum meratanya pengembangan pariwisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktivitas pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran Bersama dengan para pelaku pariwisata dan stakeholder pariwisata lainnya. Kualitas dan kapasitas sumber daya pariwisata yang di dukung kelembagaan yang mandiri, sarana dan prasarana yang memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya dimaksud melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi kompetensi. Perlunya fasilitasi dalam penyelenggaraan atraksi sebagai daya tarik pariwisata di lokasi-lokasi destinasi wisata sebagai upaya untuk menarik tingkat kunjungan serta untuk mengoptimalkan pemasaran industri kreatif. Investasi pada sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang kondusifnya iklim invenstasi, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan iklim



investasi yang kondusif melalui perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta penyediaan informasi potensi kepariwisataan yang memadai. Kemitraan atau Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau Kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah. Adanya potensi penyelenggaraan event internasional dan nasional yang membutuhkan dukungan dalam rangka memperkuat kepariwisataan NTB dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan

Kebijakan dan Strategi

Salah satu upaya pemerintah NTB untuk mengembangkan sector pariwisata adalah dengan ditetapkannya Penetapan Surat keputusan Gubernur nomor: 050.13-366 tahun 2019.Tentang pembentukan 99 Lokasi desa wisata di Provinsi NTB tahun 2019-2023. Sektor pariwisata di Provinsi NTB menjadi program prioritas dengan mengusung branding *Pesona Lombok Sumbawa* sebagai turunan dari program pusat dalam pembangunan pariwisata Indonesia yaitu “*Pesona Indonesia*”. Memaksimalkan potensi budaya, alam serta karakter masyarakat yang religius merupakan modal yang kuat untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Gelar Destinasi Pariwisata Halal yang telah disandang Nusa Tenggara Barat, semakin memperkuat arah pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pariwisata dirasakan didaerah terus berkembang yang dirasakan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan. Masyarakat secara perlahan menerima dampak positif pembangunan pariwisata terutama dalam hal kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Strategi pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTB dilakukan melalui : Pengembangkan destinasi kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; Pengembangkan industri pariwisata yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan

potensi seni dan budaya Indonesia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Pengembangkan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan tata kelola destinasi yang nyaman dan aman, Pengembangkan promosi dengan menggunakan Tehnologi digital sebagai respon dari tolls pemasaran pariwisata "Low Budget High Impact".

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kunjungan wisatawan tahun 2022 dengan melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi wisata secara bertahap, meningkatkan fasilitas pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi Nusa Tenggara Barat dan citra kawasan pariwisata daerah.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan, Dilaksanakan dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Adanya pengembangan KEK Mandalika memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 60% untuk tenaga kerja lokal dan 40% untuk tenaga kerja non lokal dan asing. Terlebih lagi pada akhir tahun 2021 dilaksanakan WSBK di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan tenaga kerja di sector-sektor pariwisata baik didalam maupun diluar kawasan KEK Mandalika. Mandalika menjadi magnet pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat yang diharapkan memberikan dampak penguatan destinasi, peningkatan angka

kunjungan wisatawan, penggunaan tenaga kerja serta pengembangan daya tarik pariwisata.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Termasuk : Penataan 3 Gili KLU&Pulau-Pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &Tambora, Revitalisasi Islamic Centre), Program Pemasaran Pariwisata (Termasuk: Wisata Halal&Sehat), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota).

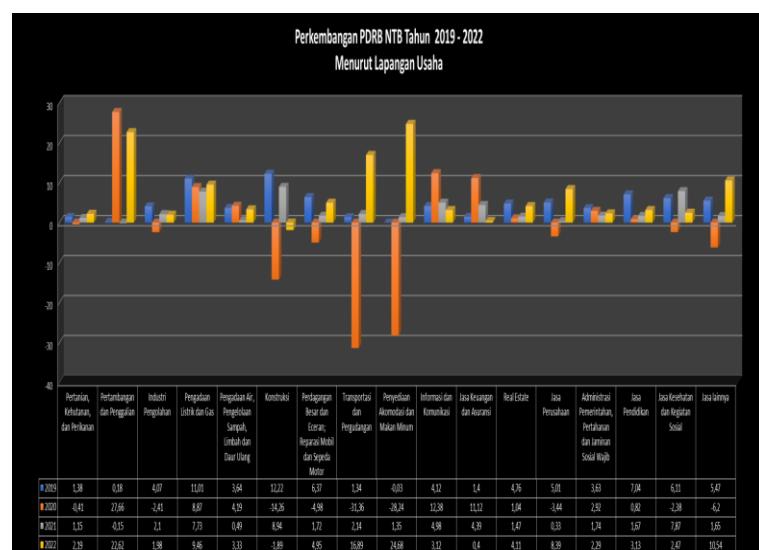
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur								
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1	Jalan Mantap Provinsi	Dinas PU	%	-1,09	87.55	85,36	Dinas PU	
9.1.2 (a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	9.1.2 (a)			5	Dinas Perhubungan	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	7	10	7	Dinas Perhubungan	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	7	8	7	Dinas Perhubungan	
9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri	BPS :	%	4.2 (2016)	4.5	4,66	Dinas Perindustrian	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Makro dan Kecil						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	BPS	%	PM	PM	1,98	Dinas Perindustrian	
	Pertambahan nilai sector industry pengolahan	Dinas Perindustrian	Rp (Milyar)	-	166,39	87,90	Dinas Perindustrian	
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS, Dinas Perindustrian	%	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Komite Kebijakan KUR	Rp (Juta)	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian	
Target 9.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas LHK	%	1,27	0,83		Dinas LHK	
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	%	PM	PM	0,0017	Bappeda	
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Bappeda	Orang	PM	PM	31	Bappeda	
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile	Dinas Komunikasi	%	PM	PM	39,16 (2019)	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	broadband.	Kasi dan Informatika						
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	48	59	87	Dinas Komunikasi dan Informatika	
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	21	45	53,39	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Pertambahan nilai PDRB sektor industri ditahun 2019 sebesar 174 miliar, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -107,30 miliar dibandingkan tahun 2019. Hal ini diakibatkan adanya pandemi global yang mengakibatkan



perekonomian negara secara menyeluruh lumpuh tidak bisa berkembang. Setelah pandemi covid-19 mulai pulih, ditahun 2021 pertumbuhan PDRB sektor industri mulai meningkat sebesar 94,60 miliar. Sedangkan ditahun 2022 sampai laporan tahunan ini tersusun belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Provinsi NTB merupakan daerah pariwisata, sehingga sebagian besar perekonomian digerakkan sektor pariwisata. Rendahnya angka pariwisata sudah tentu berimbang pada angka

pertumbuhan industri mengingat di provinsi NTB belum menjadi daerah industri dengan skala yang besar.

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan daya saing industri; meningkatkan kualifikasi IKM; dan meningkatkan pertumbuhan IKM. Peningkatan kualifikasi IKM merupakan upaya mendorong industri kecil yang telah ditumbuhkan oleh Kabupaten/Kota sebagai jembatan untuk menaikkan skala usaha industri menjadi skala industri menengah melalui kerjasama antara Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian di masing-masing Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan industri baru mutlak diperlukan. Selain itu, konsep industrialisasi yang mendorong pengolahan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk menjadi sasaran yang harus menjadi acuan perencanaan di Kabupaten/Kota. Seluruh potensi lokal harus diolah dengan menggunakan permesinan sehingga dapat terstandarisasi dan diproduksi secara massal. Peningkatan skala produksi akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing produk pelaku industri. Peningkatan daya saing ini akan secara simultan mendorong meningkatnya nilai PDRB sektor industri terhadap PDRB NTB secara keseluruhan.

Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata belum maksimal seperti yang diharapkan dalam menanggulangi penganguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkar destinasi. Adapun tantangan yang dihadapi adalah: a. Kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis masih rendah. b. Desain dan packaging kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar. c. Peluang pembiayaan IKM yang masih lemah karena belum memenuhi standar kelayakan kredit pembiayaan perbankan. d. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.(termasuk packaging produk). e. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk bersaing di pasar nasional. f. Masih rendahnya penggunaan sarana prasarana mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk

Kebijakan dan Strategi

Untuk mempersiapkan Industrialisasi Permesinan, sudah melakukan: Tenaga Kerja untuk mendukung permesinan sudah dilatih dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli dibidangnya, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja dibidang permesinan, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi peralatan pengolahan pangan, sebanyak 222 IKM, Program inkubasi bisnis “sekolah wirausaha baru” selama 2 tahun, sebanyak 20 IKM, (sedang proses pembelajaran In 1), Program rintisan produksi mesin dan rintisan karoseri truck, dalam tahap pembelian material pabrikasi .

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua melalui pembangunan jalan provinsi, dermaga penyebrangan dan pelabuhan startegis Pemerintahan NTB periode 2019-2023 memperioritaskan program industrialisasi untuk lima tahun kedepan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam mendorong untuk meningkatkan jumlah industri di Provinsi NTB, dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi dan UKM, dimana dinas perindustrian sebagai lokomotif terbentuk dan berkembangnya di sektor Industri, baik Industri olahan maupun industri permesinan.

Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di NTB dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan

Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan								
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pen anggungJawab	Status
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	%	0,371	0,362	0,392	Semua OPD	▲
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	14,75 (2018)	11,75	13,82	Semua OPD	▲
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	8	8	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	▲
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	3,62 (2014)	-	5,47 (55 desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	%	4,22 (2014)	-	13,83 (139 desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	-	24,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari	BPS	%	PM	PM	16,3 (2021)	Dinas Sosial	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	melalui Susenas						
10.3: Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan	BPS : IDI	%	79,40	92	77.41	Bakesbangpold agri	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Kebijakan	PM	PM		Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	
10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetara								
10.4.1.(b)	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	orang	68.832	100.1	365.177	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala								
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	Dokumen	8	18	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)



Gini Ratio September 2022 sebesar 0,374 persen. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,374. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini

Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,373 dan menurun 0,010 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,384. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,392, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,420. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,341, naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,325 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,331.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,60 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,58 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,00 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Tantangan dan Pembelajaran

DISTRIBUSI PENGELOUARAN PENDUDUK

Daerah	Susenas	Kelompok Penduduk			Gini Ratio
		40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	September 2021	16,33	35,37	48,30	0,420
	Maret 2022	17,58	33,84	48,58	0,406
	September 2022	17,47	35,71	46,82	0,392
Perdesaan	September 2021	19,33	40,15	40,52	0,384
	Maret 2022	20,00	39,49	40,51	0,325
	September 2022	19,69	37,94	42,38	0,341
Perkotaan + Perdesaan	September 2021	17,59	37,1	45,31	0,331
	Maret 2022	18,60	36,26	45,14	0,373
	September 2022	18,30	36,56	45,14	0,374

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori: ketimpangan tinggi jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di bawah

12 persen, ketimpangan sedang jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) antara 12-17 persen, ketimpangan rendah jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di atas 17 persen. NTB pada September 2022 Kelompok Penduduk sebesar 40% Berpengeluaran Rendah sebesar 18,30. Kelompok Penduduk 40% Berpengeluaran Menengah sebesar 36,56 dan Kelompok penduduk 20% Berpengeluaran Tinggi sebesar 45,14 sehingga tingkat ketimpangan NTB berada pada ketimpangan rendah.

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga ada upaya yang sistimatis untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB, disamping itu juga Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) harus selalu diperbaharui sehingga sasaran penanggulangan bisa tepat. Untuk mengkondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Mewujudkan NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industri. Industrialiasi merupakan kunci mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri. Indikatornya adalah pertumbuhan industri, dan sasarannya adalah mengembangkan industri olahan dan permesinan. Serta meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, diikuti kemudahan perizinan dan bermuara pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Industri yang dikembangkan, fokus pada industri olahan dan permesinan yang mendukung nilai tambah terhadap berbagai produk dari sektor Pertanian, pariwisata dan lapangan usaha industri lainnya. Misalnya

mesin-mesin untuk sarana produksi pertanian, seperti traktor, alat angkut, mesin perontok, pengering, pabrik penggilingan dan industri pengolahan lainnya, harus diproduksi atau di assamble oleh putra-putri NTB di daerah sendiri. Dan sedapat mungkin dikurangi import dari luar. Di dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, telah ditetapkan 18 (delapan belas) Program unggulan Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri. Terdiri dari: (a) Melawan kemiskinan dari desa; (b) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul; (c) E-Commerce; (d) Bumdes Maju; (e) Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif; (f) Koperasi Aktif; (g) Keluarga Sasambo Gemilang; (h) NTB ramah investasi; (i) UMKM Bersaing; (j) 99 Desa Wisata; (k) Perda Produk Lokal; (l) Rumah Kemasan; (m) Pertanian Lestari; (n) Kampung Unggas; (o) Revitalisasi BLK; (p) Apartemen Ikan; (q) KRPL; dan (s) Industrialisasi Produk Pertanian.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh TKPKD Provinsi NTB yang meliputi laporan rutin OPD pelaksana kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, pendataan oleh BPS, penelitian dan kajian kemiskinan daerah yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, pemberitaan media massa, hasil koordinasi dengan TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB, dan laporan kelompok masyarakat. Tim TKPKD menyiapkan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi juga memuat rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah untuk ditindaklanjuti.



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 11.1 : Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan								
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	96,52 (2016)	100	62,30	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR	Kawasan perkotaan metropolitan	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang & Kota Baru	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Persentase pengguna modaltransportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan	
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	%	PM	PM	PM	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Metrop olitan	PM	PM	PM	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	institusi	PM	PM	90	Bappeda	●
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	11	11	90	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	1	1	2	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	●
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kerentan dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	orang	8	2	2	BPBD	●
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	%	PM	PM	119,83	BPBD	●
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Desa/Kelurahan	5	4	74	BPBD	●
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas ESDM.	EWS	1	2	2	BPBD	●
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rupiah	PM	PM	5.885.35 9.309.96 7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	%	39.72	65	42.50	Dinas LHK	
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas LHK, PU	Kota Hijau	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK	
Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat, LHK	Kota	10	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK	
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS melalui Susenas	%	12.87 (2016)	13.2			
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030								
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	90	100	100	BPBD	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRb) tingkat daerah.	BPBD	%	2 (2015)	-	-	BPBD	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)



Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022 yang tersebar di 7 kabupaten/kota telah mencapai 1189 unit yang tersebar di Kota mataram 55 unit, Lombok Barat 234 unit, Lombok Utara 20 unit, Lombok

tengah 338 unit, Lombok Timur 367 unit, Sumbawa 60 unit, Kabupaten Bima 106 unit. Meskipun RTLH di Provinsi NTB berjumlah sebanyak 206 ribu unit, namun secara nasional posisi NTB sudah membaik yaitu di urutan ke 21. Dimana rata-rata Rumah Layak Huni (RLH) secara nasional 60,90 persen, sementara di NTB sudah berada di angka 62,90 persen.

Atau dengan kata lain kondisi RLH NTB sudah di atas rata-rata nasional.

Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, topografis dan sosiologis termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Dari 14 jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia, 11 diantaranya terjadi di Provinsi NTB.

Secara geografis, Provinsi NTB terletak pada lempengan bumi yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) sehingga rentan dengan gempa bumi. Begitu pula dengan kondisi klimatologis yang dapat menimbulkan cuaca ekstrim dan angin puting beliung. Dari segi kondisi topografis yang berbukit-bukit memberi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.



Berdasarkan target pembentukan Destana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) adalah sebanyak 434 Desa/kelurahan. Keberadaan Desa Tangguh Bencana di Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 192 desa/kelurahan tersebar di sepuluh Kabupaten/Kota, dan enam puluh tujuh kecamatan. Pada indikator kinerja Persentase terbentuknya Destana dan SMAB pada tahun 2021 menjadi 25,48 dan 40,09 pada akhir periode RPJMD Tahun 2023, dimana sebelumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah desa dan jumlah sekolah atau madrasah. Begitu pula dengan indikator Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, dan Jitupasna dimana sebelumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah-satu program unggulan dari pemerintah NTB.

Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mempermudah informasi kondisi perumahan di NTB diperlukan sistem informasi manajemen secara online dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Perumahan. Sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 Poin d, Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang baik, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui kondisi perumahan secara pasti serta proses pengajuan usulan bantuan dapat efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sasaran bantuan tepat sasaran. Penyelenggaraan Sistem Informasi ini perlu didukung oleh semua pihak baik Pemerintah maupun para pelaku pembangunan serta masyarakat, sehingga Sistem Informasi ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Tantangan terbesar dalam program Destana di NTB yang sudah berjalan selama ini, terutama terletak di (i) Lemahnya pembinaan Destana oleh instansi atau organisasi yang membentuknya. Destana hanya sampai tahapan pembentukan saja tanpa disertai proses pendampingan dan advokasi kebijakan

di level desa untuk menjamin keberlanjutan Destana; (ii) Sinergisitas dan koordinasi antar instansi ataupun organisasi dalam pembentukan Destana, terlihat adanya lebih dari satu instansi/organisasi yang membentuk Destana di 1 desa yang sama; (iii) Belum adanya penilaian ketangguhan Destana yang sudah terbentuk; (iv) Kurangnya inovasi dan pelibatan unsur Akademisi dan Dunia Usaha dalam implementasi Destana, pembentukan Destana apabila mengacu pada 6 komponen Destana sesungguhnya bisa dikerjakan secara parsial melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas dan Program tanggung jawab social Perusahaan/Dunia Usaha; dan (v) Pembentukan Destana kadang mengabaikan ketangguhan Desa yang telah terbentuk melalui kearifan local dan modal sosial di desa.

Adapun Tantangan yang harus di selesaikan oleh Provinsi NTB adalah : Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di kabupaten/kota se NTB.Kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana masih kurang memadai. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Kebijakan dan Strategi

Koordinasi pendataan dengan kabupaten/kota terkait updating data rumah tidak layak huni. Meningkatkan Anggaran Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Diperlukan pelibatan Kepala Desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Penanganan RLTH diantaranya melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota di NTB, pemanfaatan anggaran DBH-CHT, intervensi pembiayaan dari APBN, Dana Desa hingga penanganan rumah tak layak huni oleh Baznas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat salah satu program teknis yaitu Program Penanggulangan Bencana yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi NTB ke dalam tiga

kegiatan serta beberapa sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2022 yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh bencana antara lain: 1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender dalam program. 2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin. 3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan. 4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat. 5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan kerentanan warga. 6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana. 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana. 8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko. 9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan. 10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan

Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi NTB. Melalui program Sejuta Rumah ini seluruh kabupaten/kota dapat. Kalau tahun ini kan hanya tiga kabupaten saja yang dapat yaitu Kabupaten Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat

Pelaksanaan pembangunan desa tangguh bencana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 2011 hingga 2022 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Non Governmental Organization (NGO). APBD bisa berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berasal dari perangkat daerah terkait seperti BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan NGO berasal dari Islamic Relief, Palang Merah Indonesia (PMI), PSP, Muslim Aid, Yayasan Skala, Konsepsi, Berugaq Desa, Samawa Center, World Relief, dan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER). Dalam hal pengurangan resiko bencana maka upaya yang dilakukan adalah dengan Pembinaan dan pelatihan personil teknis secara proporsional, Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan memaksimalkan peran Forum PRB sebagai wadah koordinasi lintas sector serta Diseminasi Pengurangan Risiko Bencana dalam peningkatan fungsi lingkungan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program Destana, maka perlu dibentuk kelembagaan seperti forum Pengurangan Risiko Bencana dan atau Tim Siaga Bencana Desa. Kelembagaan ini adalah organisasi yang mengawal kebijakan dan penganggaran di tingkat desa untuk berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Pembentukan kelembagaan menjadi tolok ukur adanya keberlanjutan dari program Destana. Dalam menjamin keberlanjutan DESTANA, beberapa peluang yang dapat dioptimalkan adalah: 1. Mendorong kelembagaan Relawan TSBD untuk bertransformasi menjadi lembaga sosial desa dan memainkan peran strategis sebagai katalisator agenda PB dan PRB di level desa; 2. Pemanfaatan Bidang 5 dalam nomenklatur keuangan desa memberi ruang besar bagi penguatan dan keberlanjutan destana; 3. Pelibatan aktor kunci

pembangunan desa mulai BPBD, Tim Pendamping Profesional, dan Tim Pendamping Desa menjadikan DESTANA sebagai model yang diinternalisasikan dalam agenda pembangunan desa.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PengungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 12.1: Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Kolaborasi tematik	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.								
12.2.1	Jejak material (material footprint).terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER		PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.								
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan	%	PM	PM	PM	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan	
Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Peserta Proper	14	14	15	Dinas LHK	●
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri).	Dinas LHK	Ton	1226	1.974	142	Dinas LHK	▲
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (3R)								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LHK	%	6,75	26	12.78	Dinas LHK	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LHK	Perusahaan	PM	PM	PM	Dinas LHK	
12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesedaran terhadap pembangunan berkelanjutan								
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LHK	Fasilitas Publik	PM	PM	PM	Dinas LHK	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Berdasarkan data tahun 2022, sampah yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah pada TPA Kebon Kongok hanya sebesar 12,78% sedangkan sisanya 87,22% yang tidak mampu terangkut sarana prasarana yang tersedia, tertumpuk di sekitar permukiman, di lahan-lahan kosong, di pinggir-pinggir jalan bahkan di sekitar daerah aliran sungai yang akhirnya terbawa air sungai menuju ke laut. Penanganan selama 3 tahun ini yaitu memaksimalisasi operasional TPA sebagai upaya penanganan utama permasalahan sampah Tahun 2022 persentase pengurangan sampah mencapai 9,34% atau meningkat 2,15 poin dari tahun sebelumnya.

Tantangan dan Pembelajaran



Permasalahan pembuangan limbah menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk, bending, laut, dan juga tempat-

tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat NTB. Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi NTB adalah Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa, Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan sampah, Skema pengurangan sampah berbasis desa, sedangkan saat ini Pemdes masih fokus BTT untuk stimulus ekonom dan Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya reduce, reuse, recycle).

Tingginya persentase sampah yang tidak terkelola disebabkan karena NTB lebih banyak fokus pada kegiatan penanganan, utamanya pemrosesan akhir. Berdasarkan terminologi pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan di mulai dari pemilahan, pewaduhan, pemindahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.



Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk penanganan, perlu untuk meningkatkan efektifitas pengurangan sampah di NTB. Kegiatan pengurangan adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali.

Kebijakan dan Strategi

Sejak tahun 2019, pemerintah Provinsi NTB mencanangkan “NTB Zero Waste” sebagai program unggulan Provinsi NTB. Harapannya, program ini menjadi model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumberdaya. NTB Zero Waste merupakan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkular (circular economy).

Untuk melegitimasi Program Zero Waste, pemerintah provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah No 5 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai pendukungnya juga diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah tangga.

Melalui kebijakan dan Program Zero Waste, Bank Sampah, TPS 3R, TPST, Kelompok Swadaya Masyarakat pengelola sampah, dan Komunitas memiliki peran besar dalam proses pengurangan sampah. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan penanganan persampahan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan beberapa TPA regional dan TPST di beberapa kabupaten/kota.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Sebagai langkah akselerasi dan realisasi, pemerintah Provinsi NTB melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan beberapa pihak termasuk Kabupaten/Kota, di antaranya: 1. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) 2. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah menuju NTB Zero Waste Province 2023 3. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah dari Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk ke Bank Sampah Induk Regional 4. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kerjasama pengelolaan sampah dari bank sampah unit dan bank sampah induk ke bank sampah induk regional 5. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Sekolah Tinggi Teknik PLN tentang Pengolahan Sampah menjadi Sumber Energi.

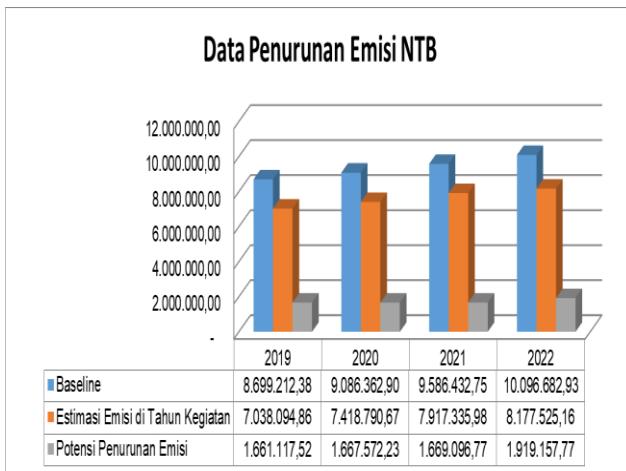


Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRБ) tingkat nasional dan daerah..	BPBD	Dokumen	2 (2015)	PM	1 (2020)	BPBD	●
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	8	2	0	BPBD	●
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	Dokumen	PM	PM	PM	BPBD	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	DLHK	ton	PM	PM	10.096.6 82,93	DLHK	●
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	DLHK	ton	PM	PM	8.177.52 5,16	DLHK	●
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	DLHK	ton	PM	PM	1.919.15 7,77	DLHK	●
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLHK	Lembaga	PM	PM	2	DLHK	●

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Pemprov NTB telah berkomitmen mencapai pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Salah satunya dengan mewujudkan NTB yang asri dan lestari dengan berbagai program yang selama ini digesa, misalnya NTB Zero Waste. melalui program NTB Zero Waste, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023, NTB menetapkan target pengelolaan sampah



100% lebih cepat dua tahun daripada yang telah ditetapkan dalam Jakstrada dan Jakstranas. Walaupun dalam realisasinya belum mencapai target, namun dari tahun ke tahun, capaian realisasi neraca persampahan terus mengalami peningkatan.

Perubahan iklim saat ini sudah

dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas. Saat musim hujan tiba, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana selalu khawatir akan terjadinya bencana banjir lantaran curah hujan yang sering tinggi dan disertai dengan angin kencang. Sementara di musim panas, cuaca yang dirasakan oleh masyarakat sering mengganggu aktivitas. Tren peningkatan suhu udara $0,5^{\circ}\text{C}$ pada tahun 2030, Curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20% dari kondisi saat ini. Peningkatan nilai suhu rata-rata tahunan sebesar $0.9 - 1.1^{\circ}\text{C}$ di wilayah NTB, Kenaikan suhu udara minimum rata-rata tahun 2001 - 2010 sebesar 0.7°C , tertinggi 1.4°C di tahun 2010. Proyeksi peningkatan nilai suhu minimum tahunan di tahun 2020-2049 sebesar $2.3 - 2.7^{\circ}\text{C}$ di wilayah NTB.

Tantangan dan Pembelajaran

Efek perubahan iklim global yang berdampak terhadap sumber daya air di wilayah NTB : Pola curah hujan mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi

secara tepat waktunya, Peningkatan intensitas kejadian bencana banjir, kekeringan, badai dan tanah longsor, Pengurangan jumlah mata air di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 750 buah pada Tahun 1980 menjadi sekitar 300 buah pada Tahun 2006, Meningkatnya percepatan sedimentasi pada sarana dan prasarana sumber daya air seperti embung, waduk dan saluran irigasi.

Kebijakan dan Strategi

NTB turut mendorong target pengurangan emisi karbon nasional yang telah disepakati dalam Paris Agreement, yaitu 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk itu, paling tidak terdapat tujuh program pembangunan lingkungan di NTB yaitu NTB Zero Waste, NTB Hijau, Mencapai IKLH, Hutan Tanaman Energi, Waste To Energy, Net Zero Emission, dan Ekonomi Hijau. Untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama, salah satunya dari mitra pembangunan. Pemerintah Daerah NTB telah mengeluarkan banyak kebijakan, antara lain Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Selanjutnya Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2018 tentang RAD SDGs Tahun 2019 – 2023. Ada juga Peraturan Gubernur Tahun 2019 Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. “NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTB.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Ekonomi Hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam ujarnya. Sementara itu terkait pengembangan Hutan Tanaman Energi, program ini akan dilaksanakan di Kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di wilayah Balai KPH di NTB. Dengan jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan cepat seperti lamtoro, komoditi ini akan mensubstitusi batubara sebagai bahan bakar. Berkolaborasi dengan PLN, kegiatan ini akan

melibatkan masyarakat sekitar hutan. Telah di susun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi Nusa Tenggara Barat. RAD-API menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta *pelaku* usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.

14 EKOSISTEM LAUTAN		Tujuan 14. Ekosistem Lautan						
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PengungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	225.965 ,32	843.384	143.710,91	Dinas kelautan dan Perikanan	
Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yg berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	98	100	100	Dinas kelautan dan Perikanan	
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	17794	28.025	39316	Dinas kelautan dan Perikanan	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Ekosistem lautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove yang menjadi satu kesatuan dalam sistem ekologi perairan laut. Mengingat fungsi dan perannya sangat strategis maka beberapa kawasan di perairan laut NTB telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah provinsi NTB dengan



luasan pada tahun 2021 jumlah luas Kawasan konservasi perairan NTB mencapai 126.311 ha dan tahun 2022 mencapai 143.710,91 terdapat peningkatan luas Kawasan konservasi sebesar 17.399,91 ha sehingga penetapan sebagian luasan perairan tersebut tidak menghambat aktivitas kegiatan usaha disebagian besar perairan laut NTB. Hal ini terlihat dari kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan mengalami tren peningkatan yang signifikan seperti di tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu dari target 99,91% dan terealisasi mencapai 99,91% dan tahun 2022 dari target 100% tercapai 100%. Sedangkan terkait dengan indikator jumlah nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi pada tahun 2022 sebanyak 39.316 orang.

Tantangan dan Pembelajaran



Pengelolaan ekosistem lautan sangat ditentukan sejauh mana komitmen semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam di laut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pola pemanfaatan lestari yang senantiasa memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi mendatang. Pola pelestarian atau dikenal dengan istilah



konservasi pada sebagian perairan laut tentu akan menimbulkan pro dan kontra antar pihak yang berkepentingan. Misalnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha merasa dibatasi menggunakan ruang laut. Namun sebaliknya pemerintah berhak melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan laut guna memastikan tidak terjadi over eksploitasi yang melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga pada suatu saat perairan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dapat menjadi kawasan Bank Ikan yang pada akhirnya berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlangsungan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan dan Strategi

Guna mewujudkan ekosistem lautan yang lestari di Provinsi NTB salah satunya adalah memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi yang mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan lautan. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi NTB sudah memiliki peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai salah satu instrument untuk mengatur pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut di NTB. Namun untuk memastikan aspek ketataan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan perlu didorong terbitnya peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembinaan dan pengawasan yang merupakan salah satu amanat Perda 12 Tahun 2017 tersebut. Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Guna mendorong terwujudnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 14 ekosistem lautan adalah memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola kawasan konservasi,

mendorong terbitnya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta memfasilitasi perluasan pelayanan asuransi nelayan dan juga mendorong peningkatan investasi usaha sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan								
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	4,87 (2018)	5,47	43.91	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestatasi dan reforestasi secara global..								
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LHK	Ha	-	-	71	BKSDA NTB	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LHK	Ha	PM	PM	402,11	Dinas LHK	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LHK	KPH	11	15	15	Dinas LHK	
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.pasar.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	0,142 (2018)	0,160	0,72	Dinas LHK	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Parameter pembentuk kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Parameter IKTL adalah indeks kualitas tutupan lahan yang digambarkan melalui perbandingan luas lahan kritis dengan luas tutupan lahan. Berdasarkan data luas lahan kritis Provinsi NTB tahun 2016 mencapai 578.645,97 Ha atau sekitar 29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud adalah lahan kritis yang terdapat didalam Kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Kabupaten Lombok Utara memiliki persentase luas lahan kritis terbesar jika dibandingkan dengan luas wilayahnya yaitu sebesar 54.74%. Luas lahan kritis terluas didalam kawasan hutan berada di Kabupaten Bima seluas 57,554.79 Ha, sedangkan luas lahan kritis diluar kawasan hutan terluas berada di Kabupaten Sumbawa seluas 110,814.28 Ha. Jika akumulasi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, maka Kabupaten Bima memiliki luas lahan kritis terluas sebesar 161.120,5 Ha. Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.Indeks tutupan lahan tahun 2021 mencapai 65,59 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 65,61 terjadi peningkatan sebesar 0,02% yang artinya ada usaha dari pemerintah untuk memperbaiki indeks kualitas lahan.



Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang mengembangkan inisiatif Provinsi Hijau, diperlukan analisis yang utuh terhadap semua komponen permasalahan yang terkait dengan degradasi hutan, lahan dan lingkungan. Sehingga elaborasi komprehensip dari masing-masing faktor

pengungkit/penyebab permasalahan tersebut dapat dirumuskan alternative pengurangan dampak dan solusi penanganan melalui intervensi program pembangunan baik yang bersifat governmental driven inisiatif maupun kontribusi dan entitas eksternal pemerintah. Formulasi intervensi ini tentunya harus mendapat dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, masyarakat, mitra pembangunan dan swasta. Untuk mendukung hal tersebut, skema insentif fiskal perlu dikembangkan sebagai bentuk pembiayaan/anggaran yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB. Masih dijumpai terjadinya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk menekan tindak pidana kehutanan tersebut Dinas LHK melakukan operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan di areal hutan seluas 129.250 hektar.

Kebijakan dan Strategi

Program Perlindungan Hutan Konservasi SDA dan Ekosistem menjadi program dengan realisasi belanja terbesar dikarenakan adanya alokasi untuk pembayaran honorarium tenaga pengamanan hutan. Kegiatan lainnya ialah terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem berupa pemantauan dan evaluasi cadangan karbon (2017-2018) dan fasilitasi pembentukan Kelompok Ekosistem Esensial (KEE), dan penegakan hukum kehutanan. Program lainnya ialah program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial yang didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain penanaman luar dan dalam kawasan hutan, pembuatan bangunan KTA sebagai salah satu upaya menjaga DAS, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada Kelompok Tani Hutan melalui pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok. dalam pencapaian target Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan cara:

1. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
2. Pengembangan Jasa Lingkungan Wisata Alam
3. Pengendalian Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
4. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

5. pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
6. Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
7. Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan
8. Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air
9. Pengelolaan DAS
10. Operasi Pengamanan Hutan Partisipatif
11. Pemantauan evaluasi dan Pelaporan Cadangan Karbon
12. Fasilitasi Penyelesaian Tenurial Kawasan Hutan
13. Sosialisasi batas Kawasan Hutan
14. Perencanaan dan Tata Hutan
15. Pengembangan Usaha Kehutanan
16. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
17. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
18. Penegakan Hukum
19. Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati
20. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diikhtiarkan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi NTB, hal ini termuat dalam RPJMD Provinsi NTB periode 2019-2023 melalui misi ke-4 yaitu “NTB Asri dan Lestari”. Indikator utama dari misi ke-4 adalah meningkatnya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indikator kinerja ini merupakan upaya pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan hal tersebut, program-program yang mendukung pencapaian indikator di atas antara lain Program Unggulan NTB Hijau, NTB Zero Waste, Industri Pengolahan Sampah, Taman Asri dan HHBK Unggul. Berdasarkan data tahun 2021 program dan kegiatan dimaksud telah mampu meningkatkan IKLH dari

65,59 menjadi 65,61 pada tahun 2022 Upaya lain yang dilakukan adalah melalui kegiatan rehabilitasi daerah tangkapan, dengan membuat bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	Kasus	20	10	7	Kepolisian	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian	orang	14	PM		Kepolisian	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS :	%	15 (2016)	0,9	0,98	Kepolisian	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	kepolisian	orang	5.466.688	6.339.055	67,27% (2020)	Kepolisian	
Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	PM	PM		Kepolsian	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pena ngungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	setahun terakhir.							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kepolisian	Anak	391	165	165	Kepolisian	●
Target 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisian	orang	19	13	176	Kepolisian	●
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM	1	Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB	●
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA	Perkara	PM	500	611	Pengadilan Tinggi Provinsi NTB	●
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM		Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB	
Target 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	indeks	PM	PM	17,24	KPK NTB	●
Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BPKAD	%	PM	PM	PM	BPKAD	

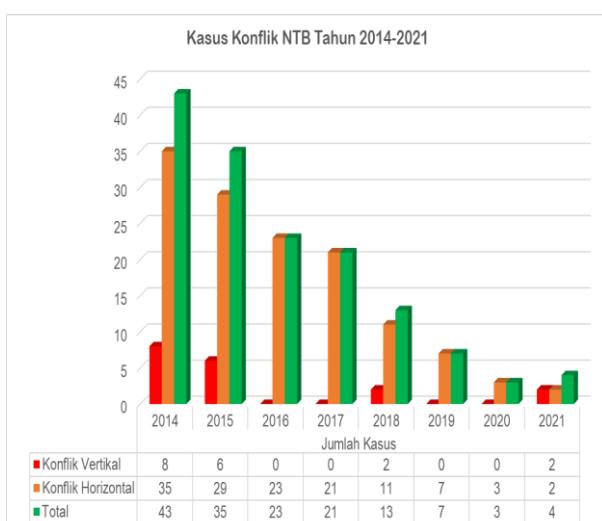
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
16.6.1.(a)	Percentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/n/Kota).	BPK	%	PM	PM	PM	BPK	
16.6.1.(b)	Percentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/n/Kota).	Inspektorat	%	B	BB	BB	Insepkorat	●
16.6.1.(c)	Percentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE	%	PM	PM	70	BPKAD, LPSE	●
16.6.1.(d)	Percentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/n/Kota).	Biro organisasi	%	BB	BB	BB	Biro organisasi	●
16.6.2.(a)	Percentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Ombudsman RI	%	PM	PM	80.71	Ombudsman RI	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	(Provinsi/Kabupaten/n/Kota).							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU	%	10 (2014)	PM	18,18 (2019)	KPU	●
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi NTB).	KPU	%	9,23 (2014)	PM	1,54 (2019)	KPU	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	13,04	16	13,46	BKD	▲
16.7.2.(a)	Aspek Kebebasan	BPS : IDI	%	93,98	77	77,41	Bakesbangpolida gri	●
16.7.2.(b)	Aspek kesetaraan	BPS : IDI	%	79,40	92	80,15	Bakesbangpolida gri	▲
16.7.2.(c)	Aspek kapasitas Lembaga Demokrasi	BPS : IDI	%	62,08	64.02	59,10	Bakesbangpolida gri	▲
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	58,39	70	97,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	●
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0- 17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota diProvinsi NTB	BPS : Susenas	%	74,66	83.07	88,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/PengungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional HAM	Berkas Pengaduan	PM	PM	29	Komisi Nasional HAM Perwakilan NTB	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	PM	PM		Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	65	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	100	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	PM	PM	0	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pena ngungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB	

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)



Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud pluralisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa

sektor ekonomi menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat diantaranya, perkelahian antar remaja kampung, antar suku dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak.

Jumlah konflik sosial adalah indikator yang dapat mencerminkan situasi dan kondisi keamanan di daerah. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Provinsi NTB dalam 3 tahun terakhir berhasil menurunkan angka konflik sosial, dari 7 kasus pada tahun 2019 menjadi 3 kasus pada tahun 2020 dan 4 kasus pada tahun 2021.

Indeks kriminalitas dipengaruhi oleh seberapa banyak kasus kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun yaitu kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik dengan kekerasan, kejahatan terhadap barang/hak milik tanpa kekerasan dan kekerasan narkotika. NTB menargetkan pada Tahun 2022 adalah 14,05 dengan capaian yang diharapkan di Tahun 2023 adalah 13,25. Dalam mewujudkan kondusivitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1380 kasus atau 20%. Penurunan kasus kriminalitas berimpilkasi pada penurunan indeks kriminalitas dari 13,09 poin pada tahun 2020 menurun menjadi 10,67 poin pada tahun 2021. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bertanggung-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan

implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap

Adapun untuk keterwakilan perempuan NTB menduduki keterwakilan terendah di Indonesia, dengan prosentase perwakilan hanya 1,54% pada tahun 2019 atau berdasarkan hasil perolehan suara calon legislatif perempuan pada pemilu 2019. Pada Tahun 2014-2019 perwakilan jumlah perempuan sebagai anggota berjumlah 6 orang.

Tantangan dan Pembelajaran

Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu juga belum dibuatnya peraturan tertulis berupa Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga ada pengendalian dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak merugikan masyarakat lainnya.

Hasil Pemilihan Legislatif 2019 DPRD Provinsi NTB terdapat data di KPU bahwa hasil rekapitulasi dari daftar calon tetap (DCT) sebanyak 914 orang, 563 diantaranya laki-laki dan 351 perempuan atau sebanyak 38,40%. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB disebabkan stigma masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki, sistem dan struktur sosial patriarki dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap perempuan, serta faktor logistik calon legislatif perempuan sebagai modal utama maju dalam kontestasi masihlah belum mencukupi kebutuhan biaya politik.

Kebijakan dan Strategi

Melakukan mediasi antar warga kampung yang berkonflik maupun yang berpotensi terjadinya konflik terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik. Selanjutnya BPSDM dalam RPJMD Tahun 2019-2023 menetapkan

program pendukung utama untuk pencapaian Sasaran Penataan Sistem Manajemen SDM dengan indikator Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tenram.

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Daerah NTB untuk melindungi anak dari berbagai macam kekerasan yang terjadi.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditegakkan adalah dengan penegakan Perda/Pergub serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Pergub kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain: a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Prov. NTB sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Upaya lain untuk meredam dan meminimalisir potensi konflik adalah: Mengoptimalkan peran Mitra Kerja Bakesbangpoldagri seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jejaring, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk mendeteksi dan cegah dini setiap potensi konflik yang ada di lapangan, Melakukan koordinasi yang

intensif dengan semua Kesbangpol seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mencegah lebih dini potensi konflik maupun untuk mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi.



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	1,21	1.30	-	BAPPENDA	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB.	Bappenda	%	0,95 (2018)	1	1.20	BAPPENDA	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 12 bulan terakhir.	Bappenda	%	24,40	32.4	33.43	BAPPENDA	
Target 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2T KI, BI	US\$	12.556,94	6.691,97	606.84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BI	
Target 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS	%	PM	PM	4,44	Dinas Pekerjaan Umum	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS, Dinas Perhubungan	%	PM	PM	52	Kominfo	●
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Perhubungan	%	PM	PM	39,16 (2019)	Telkom	●
Target 17.8 : Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	22,64	45	59,39	Dinas Komunikasi dan Informatika	●
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	●
Target 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.								
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia	Bappeda	Rupiah	PM	PM	PM	Bappeda	
Target 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	-96,33 (2016)	11	18,49	Dinas perdagangan	●
TARGET								
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda	Dokumen	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	a, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP					Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	Dokumen	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	
Target 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(d)	Percentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	BPS	%	34	40	N.A	BPS, OPD sumber data	
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	BPS	Strategi Daerah	PM	PM	NA	Bappeda	
Target 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022		Pelaksana/Pengunggahan Jawab	Status
					Target	Realisasi		
pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Sensus Penduduk	PM	PM	ya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	●
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	Data registrasi	PM	PM	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	507,744	111.729	138.732	Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, Biro Umum	●
17.19.2.(d)	Percentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	98	99	100	BPS	●
17.19.2.(e)	Percentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	6,03 (2016)	24,5	95	BPS	●

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)



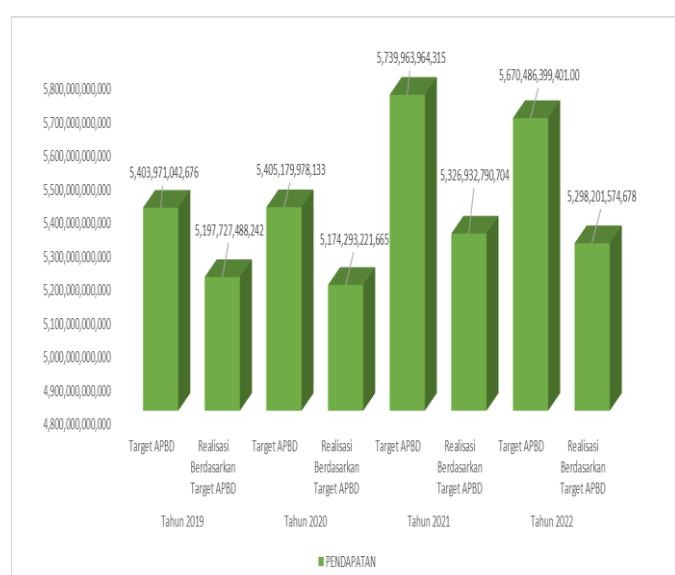
Katagori rendah. Terdapat perubahan rentang katagori IKF tahun 2021 dan 2022 dimana pada tahun 2022 sesuai dengan PMK no.193/PMK.7/2022 katagori IKF $1,442 \leq 1,756$ masih dalam katagori rendah. Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 1,20 pada tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 1,12 terjadi peningkatan sebesar sebesar 0,08 persen. Lebih dirinci, Pertumbuhan pajak daerah tahun 2022 Adalah sebesar 74,58% atau terealisasi Rp. 1.706.111.440.816,-.

Pada tahun 2022

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB sebesar 1,465 atau masuk dalam kategori “Rendah”. Sedangkan pada tahun 2021, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB sebesar 0,408 dan masih dalam

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2020-2021 ini penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemic covid-19, dimana sebagian besar asset dan potensi penerimaan PAD mengalami penurunan yang mengakibatkan penerimaan PAD tidak dapat optimal seperti yang direncanakan. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021



menurun sampai dengan 21,31% dari periode yang sama tahun 2020 akibat menurunnya deviden hampir semua BUMD.

Kebijakan dan Strategi

Program pendukung untuk mencapai indikator ini yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Melakukan dengan peningkatan kualitas layanan yang inovatif dan modern, yaitu e-Pendapatan (sudah termasuk e- Samsat dan Samsat Delivery) yang dihajatkan untuk mendekatkan pelayanan Bappenda kepada masyarakat wajib pajak, sekaligus untuk menunjang optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. diantara layanan pembayaran pajak daerah (e-Samsat), layanan jemput antar pembayaran PKB (Samsat Delivery), serta layanan penyetoran retribusi daerah (e-STS Retribusi). Untuk itulah Bappenda Provinsi NTB mengintegrasikannya ke dalam aplikasi e-Pendapatan merupakan program digitalisasi pendapatan daerah yang mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) guna menghasilkan pengelolaan pendapatan yang akurat, kuat, responsif, efektif dan efisien

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan yang dilakukan adalah; Menambah jam layanan yakni Samsat Night Music setiap sabtu malam yang beroperasi didepan kantor Bappenda Provinsi NTB (jalan Majapahit) dengan menghadirkan music dan penyanyi yang menghibur masyarakat/Wajib Pajak serta pemberian Door Price, Memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan OPD yang potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD, Melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bank NTB dan Instansi terkait lainnya untuk memantapkan e-sts Online Retribusi.

BAB III

PEMBELAJARAN TPB/SDGS

Tujuan Dalam SDGs	: Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Nama Instansi	: LPA NTB bekerjasama dengan UNICEF untuk Program Child protection emergency and recovery-reconstruction interventions in Lombok Islan
Nama Program	: Gawe Gubuk
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lombok Utara
Waktu Kegiatan	: Mulai Januari 2019

Proses Pelaksanaan

Tujuan Program Gawe Gubuk adalah : (1) Mendekatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak secara integratif kepada masyarakat, meringankan biaya serta memangkas alur birokrasi kepengurusan administrasi layanan. (2) Memaksimalkan sumber daya daerah dan menguatkan kerjasama lintas sektor dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang maksimal dan efisien. (3) Meningkatkan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pendataan, penyelesaian penanganan kerentanan anak. (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok anak untuk menciptakan



lingkungan yang aman dan ramah anak. (5) Update DTKS tingkat desa. (6) Percepatan kabupaten / kota dan provinsi layak anak

Gawe Gubuk (Layanan integrasi perlindungan anak) merupakan sistem layanan pemenuhan hak-hak dasar anak rentan yang melibatkan seluruh potensi



sumber daya daerah dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Seluruh sumber daya pendukung pelaksanaan Gawe Gubuk terlembaga dalam sistem dan kebijakan daerah dan desa, antara lain : Tim P4AI (melalui SK Bupati KLU), memiliki SOP layanan, Aparat Desa, Forum Anak dan PATBM (SK Kepala Desa). Dengan demikian sumber daya tersebut menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan dan legalitas yang dimiliki seperti Perbup P4AI dan Perdes Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tingkat Desa.

Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh stakeholders Lembaga Layanan (OPD) terkait hadir di desa untuk melakukan pelayanan, antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DP3AP2KB, BAZNAS, dan lain-lain (sesuai kebutuhan layanan yang diperlukan). Lembaga Layanan melakukan pelayanan di stand / meja masing-masing sesuai yang sudah disiapkan oleh panitia. Meja Input data DTKS berada pada bagian terdepan setelah meja registrasi. (Jika diperlukan ada kegiatan seremoni), maka kegiatan



Pelaksanaan layanan diistirahatkan / jeda sebentar guna mengikuti acara seremonial pembukaan dan penyerahan secara simbolis dokumen yang telah diterbitkan dari pelaksanaan sebelum acara pembukaan.

Setelah itu kegiatan layanan dilanjutkan sampai selesai. Evaluasi pasca kegiatan dengan seluruh panitia (panitia tingkat desa dan tim P4AI).

Hasil dan Dampak

Secara umum Gawe Gubuk memiliki daya efektifitas dan efisiensi kerja yang sangat baik, karena kompleksitas persoalan yang dialami oleh satu orang anak dengan kerentanan tinggi dapat diselesaikan dalam waktu singkat, murah dan memangkas birokrasi yang panjang antara OPD layanan yang satu dengan yang lainnya. Contoh satu orang anak dengan kondisi disabilitas, tidak sekolah, dan tidak memiliki akta kelahiran. Cukup dengan data lengkap dan dirujuk ke Tim P4AI, maka atas koordinasi dan verifikasi datanya di tingkat kabupaten oleh OPD layanan terkait, anak tersebut mendapatkan



layanan sekaligus dari tiga atau lebih OPD layanan tingkat kabupaten. Capaian yang dirasakan adalah efisiensi kerja yang lebih baik, rentang Koordinasi yang lebih mudah, pengetahuan, ketrampilan dan etika yang bertambah, serta membaiknya jejaring antar OPD layanan terkait

1. Melibatkan seluruh sumberdaya potensial dari masyarakat dan kelompok anak, aparat desa dan berbagai stakeholders OPD terkait di kabupaten.
2. Menjadi sebuah sistem layanan di daerah yang tertuang dalam regulasi / kebijakan daerah dan desa.
3. Mudah, murah, luas, menjangkau lebih banyak, dan adaptatif / fleksibel

Mudah : memangkas birokrasi yang biasa dilalui oleh masyarakat penerima layanan pada masing-masing OPD terkait. Mudah, karena masyarakat tidak perlu mengurus ke ibu kota kabupaten (sumber layanan), cukup sampai tingkat desa dan Lembaga Layanan turun ke desa (pendekatan layanan).

Murah: Masyarakat tidak mengeluarkan biaya transportasi untuk mendapatkan layanan dasar yang dibutuhkan. Efisiensi anggaran desa dan anggaran daerah dirasakan melalui pelaksanaan Gawe gubuk.

Luas : dalam waktu yang sangat singkat (waktu satu bulan) seluruh OPD terkait dapat melakukan layanan langsung secara bersamaan ke 5 desa sekaligus.

Menjangkau lebih banyak : Dalam waktu yang singkat dapat menjangkau hampir 1.000 anak rentan dengan berbagai layanan kebutuhan.

Adaptatif / fleksibel : Inovasi layanan Gawe Gubuk dapat dilakukan pada lintas isu kesejahteraan masyarakat bahkan dapat dilakukan melalui intas inovasi seperti **inovasi Posyandu Keluarga** (untuk isu stunting), **inovasi Jaring Pekat** (isu adminduk Dukcapil KLU) dan **inovasi Yandu (Layanan Terpadu) Itsbat Nikah dan pencatatan kelahiran**

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan

- Gap atau kesenjangan kapasitas masyarakat untuk merespon kompleksitas isu kerentanan anak dan perkawinan anak
- Mindset integrasi layanan belum terlembaga
- Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM layanan yang professional

Startegi Keberlanjutan

- Gawe Gubuk (layanan integrasi perlindungan anak) terus dikawal sebagai sebuah sistem layanan perlindungan anak secara kontinuitas
- Tim kabupaten dan tim desa yang solid dibangun melalui penguatan kapasitas yang berkala.
- Kebijakan penganggaran yang terintegrasi
- Regulasi dan kebijakan daerah yang ditujukan kepada Camat dan pemerintah desa
- Regulasi tingkat desa serta pelibatan anak dan perempuan secara khusus dalam musyawarah desa.
- Data DTKS yang terapdate
- Monitoring dan Evaluasi yang bersifat partisipatif

Peluang dan Reflikasi

Replikasi sangat dimungkinkan karena, Inovasi GAWE GUBUK (layanan integrasi perlindungan anak) memiliki segudang keunggulan dan mudah diimplementasikan oleh bebagai level daerah, jenis isu dan berbagai model inovasi sebelumnya.

Inovasi Gawe Gubuk (Layanan integrasi perlindungan anak) mudah direplikasi oleh daerah lain, karena program prioritas nasional dan daerah terkait SDGs dan provinsi, kabupaten / kota layak anak melalui kebijakan nasional dan daerah yang ada saat ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk cepat dan terintegrasi untuk mempercepat capaian program prioritas dimaksud. Inovasi Gawe Gubuk salah satu upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan capaian tersebut.

Pemerintah KLU telah melihat dan merasakan manfaat inovasi Gawe Gubuk antara lain:

1. Efisiensi anggaran daerah

2. Program yang tidak tumpang tindih
3. Cakupan pelayanan publik yang baik
4. Masyarakat merasakan manfaat langsung, lebih cepat, mudah dan murah.
5. Aparat desa terbantu oleh kelompok masyarakat dan pemerintah kabupaten

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah terkait organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk percepatan pencapaian target –target indikator sesuai Rencana Aksi Daerah 2019-2023. Hal ini penting dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunci keberhasilan percepatan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB adalah dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergitas program/kegiatan yang mendukung capaian indikator agar tepat sasaran dapat dicapai dengan komitmen pimpinan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi NTB Tahun 2022 ini merupakan upaya sistematis dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk percepatan pencapaian target indikator SDGs sesuai dengan perkembangan lingkungan, potensi wilayah, karakteristik, dan sosial budaya masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut serta dapat dijadikan untuk pembelajaran kedepan termasuk diharapkan sebagai acuan juga untuk lahirnya inovasi-inovasi dalam mempercepat capaian target SDGs pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Maret 2022
2. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 7 Februari 2022
3. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 2 Februari 2022
4. Laporan akhir dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2022
5. Laporan akhir dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2022
6. Laporan akhir dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2022
7. Laporan akhir dinas Perdagangan Provinsi NTB tahun 2022
8. Laporan akhir Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2022
9. Laporan akhir dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2022
10. Laporan akhir dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2021
11. Laporan akhir dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2021
12. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTB tahun 2022
13. Laporan akhir dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2022
14. Laporan akhir dinas Sosial Provinsi NTB tahun 2022
15. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB tahun 2022
16. Laporan akhir dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2022
17. Laporan akhir dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2022
18. Laporan akhir Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2022
19. Laporan akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2022

20. Laporan akhir Inspektorat Provinsi NTB tahun 2022
21. Laporan akhir Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB tahun 2022
22. Laporan akhir dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi NTB tahun 2022
23. Laporan akhir dinas Perpustakaan Daerah Provinsi NTB tahun 2022
24. Laporan akhir dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun 2022
25. Laporan akhir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tahun 2022
26. Laporan akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB tahun 2022
27. Laporan akhir Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2022
28. Laporan akhir Sekertariat Daerah Provinsi NTB tahun 2022
29. Laporan Bank Indonesia Provinsi NTB tahun 2022.

Lampiran :
**Indikator Pilar Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)**

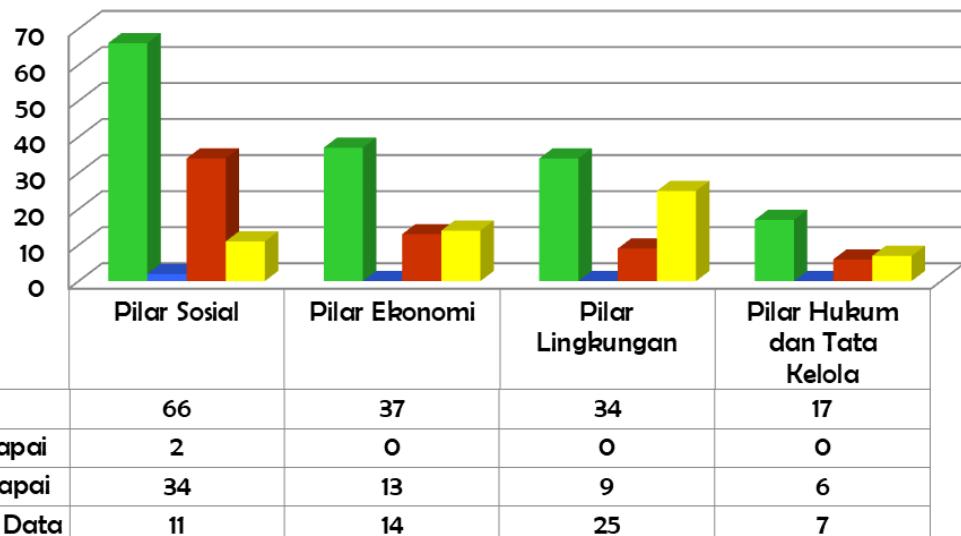
Lampiran 1

Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2022

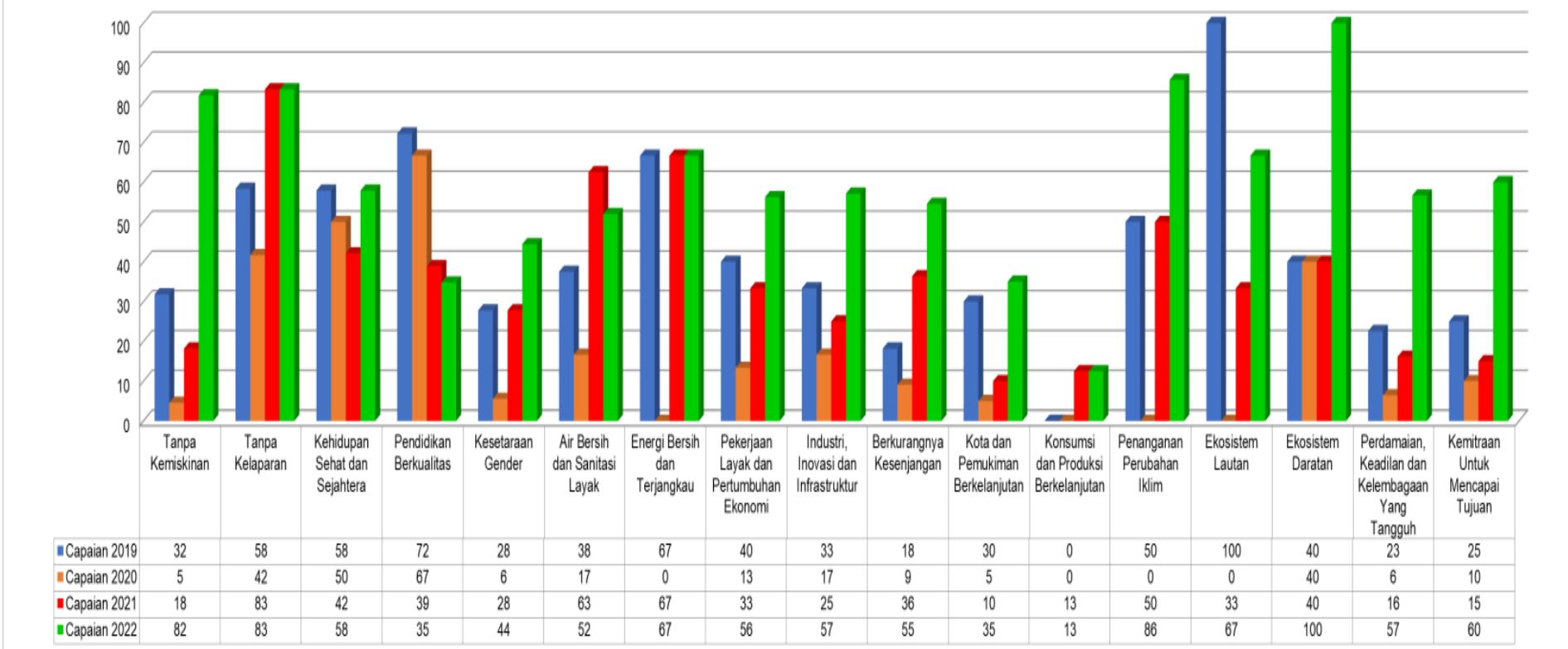
No	Tujuan	Target	Indikator	Capaian				% Capaian
				Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak ada Data	
1	Tanpa Kemiskinan	5	22	18	1	3	0	82
2	Tanpa Kelaparan	2	12	10	0	2	0	83
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8	38	22	1	14	1	58
4	Pendidikan Berkualitas	8	23	8	0	10	5	35
5	Kesetaraan Gender	7	18	8	0	5	5	44
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	25	13	0	1	11	52
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	3	2	0	0	1	67
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Eko	7	16	9	0	5	2	56
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	6	14	8	0	3	3	57
10	Berkurangnya Kesenjangan	5	11	6	0	4	1	55
11	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	8	20	7	0	5	8	35
12	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	7	8	1	0	2	5	13
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	7	6	0	0	1	86
14	Ekosistem Lautan	3	3	2	0	1	0	67
15	Ekosistem Daratan	3	5	5	0	0	0	100
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	8	30	17	0	6	7	57
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	9	20	12	0	1	7	60
Total		96	275	154	2	62	57	56

**Capaian Pilar SDGs NTB
Tahun 2022**



Lampiran :
Program Kegiatan Yang Mendukung
Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)

Capaian SDGs NTB Tahun 2019 - 2022



REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan								
INDIKATOR SDGs :	1.2.1*		Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis Kemiskinan					
	1.2.2*		Penduduk Miskin					
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1 : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	%		100	100	3.978.586.200	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	%		100	100	451.300.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase Mutu Benih Tanaman	%		100	100	24.966.475.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
PROGRAM . 2 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1. Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang dibangun	paket	271	206	330	49.768.950.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
PROGRAM 3 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1 : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	ekor			14.514	24.972.086.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 2 : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan hijau pakan	paket		1	125.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	
PROGRAM 4 : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
Kegiatan 1 : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil peternakan yang tersertifikasi	Paket		3	3	300.000.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
PROGRAM 5 : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
Kegiatan 1 : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Jumlah pengembangan dan pemasaran hasil Ternak	Paket			825.000.000	APBN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	
PROGRAM 6 : PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS								
Kegiatan 1 : pengelolaan air irigasi untuk Pertanian	Jumlah pengelolaan air irigasi untuk Pertanian	Unit		3	3	764.000.000	APBN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
PROGRAM 7 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat								
Kegiatan 1 : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Konsumsi Pangan per kapita /Tahun	Paket		24	24	480.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
PROGRAM 8 : Program Penanganan Kerawanan Pangan								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	orang		45	2750	362.500.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
PROGRAM 9 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
Kegiatan 1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	unit			1760	6.643.000.000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
PROGRAM 10. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
Kegiatan 1.Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	tahun		1	1	1.705.950.000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
PROGRAM 11. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri	orang			36	79.000.000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
		lembaga			99	1.110.500.000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
PROGRAM 12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Paket			296	6.546.499.997	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
PROGRAM 13. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota	jumlah destinasi pariwisata di 10 kab/kota	Desa wisata			93.879.792.520	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	
Kegiatan 2. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata	jumlah kawasan strategis pariwisata	KSPD			8.893.347.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	
Program 14. Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata								
Kegiatan 1. Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif	jumlah fasilitas ukm yang tersedia serta dukungan industri kreatif dalam event	lokasi			4.911.828.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	
PROGRAM 15. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan								
Kegiatan 1.Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang terlayani	RTS		30	350	587.386.200	APBD	Dinas ESDM Prov. Ntb
PROGRAM 16. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	unit		40	178	3.101.011.500	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 17. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	unit			27417	524.600.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
PROGRAM 18. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		klp			12	3.305.500.000	APBD
PROGRAM 16. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Termasuk : Industri Perikanan : Garam, Tepung Ikan, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil)							
Kegiatan 1.Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi	%		20	85	1.804.000.000	APBD
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)							
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		60	70	3.148.514.551	APBD
		%		60	60	252.000.000	APBD
PROGRAM 18. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		unit		9	9	316.532.000	APBD
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		unit			24	615.488.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik BKPH MARIA DONGGOMASA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			27	821.010.000	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	wilayah DAS pada balai KPH Rinjani Timur
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			110	2.535.240.000	DANA TRANSFER KHUSUS - DAK KHUSUS	BKPH Tambora
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			42	1.462.277.000	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Kabupaten Sumbawa Barat (Wilayah DAS pada Balai KPH Sejorong Mataiyang)
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			6	239.596.000	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Kab.Sumbawa
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			35	397.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab.Sumbawa (wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Ampang Plampang)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			16	524.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	KPH Orong Telu
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			35	826.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Ropang
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			84	2.063.344.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Toffo Pajo Suramandi
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			13	276.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Lunyuk Rea; Kab. Sumbawa, Lunyuk, Lunyuk Ode; Kab. Sumbawa, Lunyuk, Jamu;Kab. Sumbawa, Lunyuk, Emang Lestari
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	unit			10	199.304.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	wilayah Daerah Aliran Sungai pada Balai KPH Pelagan Tastura
PROGRAM 19. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
kegiatan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	%			0,67	850.000.000	DAK Non Fisik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK)	unit			3	30.000.000		
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK)	unit			6	425.370.000	DANA TRANSFER KHUSUS - DAK KHUSUS	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	%			10	5.639.249.000	DANA TRANSFER KHUSUS - DAK KHUSUS	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (BKPH Ampangriwo)
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			500	4.250.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS - DAK KHUSUS	KPH Dompu
Kegiatan 2. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK)	%			0,67	37.020.000	PAD	Unit pengolahan HHBK di tingkat tapak
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			650	5.525.000.000	PAD	KPH Maria Donggomasa
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			120	1.020.000.000	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Kabupaten Lombok Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			150	1.275.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Ai Kangkung; Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Talonang Baru; Kab.Sumbawa Barat, Brang Ene, Mujahiddin; Kab. Sumbawa Barat, Maluk, Pasir Putih
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			30	255.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KPH Batulanteh
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			100	850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	KPH Ampang Plampang
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			100	850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	KPH Orong Telu
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			275	2.337.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Sumbawa, Moyo Hulu; Kab. Sumbawa, Ropang; Kab. Sumbawa, Lopok; Kab. Sumbawa, Lenangguar; Kab.Sumbawa, Lantung
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			1115	9.477.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Bima

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			100	850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Balai KPH Brang Beh	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	ha			275	2.550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	KPH Pelangan Tastura	
PROGRAM 20 .PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		%		1,77	350.404.400	PAD	Kabupaten Lombok Timur	
PROGRAM 21. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelo-laan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	paket		34	21	3.519.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 22. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang		132.403	4.470.371	98.282.869.721	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 23. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Rehabilitasi social Penyandang disabilitas terlantar di dalam pantai	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	paket	800	600	559.250.000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah anak dan perempuan terlantar diberikan penuhan kebutuhan dasar dalam pantai	jiwa	5500	400	7.081.000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	lembaga	60	316	3.995.000.000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
PROGRAM 24. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang terlayani	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang terlayani	Paket		112	7.511.400.000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Jiwa		869			
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Lembaga		116			
	PKH (Bantuan Program Keluarga Harapan)	KPM		310623	222.301.425.000	APBN	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 25. Program Penanganan Fakir Miskin								
Kegiatan 1. Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	KPM			902247	541.348.200.000	APBN	Dinas Sosial Provinsi NTB
PROGRAM 26. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang di latih	orang	30	160	1244	1.340.824.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 27. Program Penempatan Tenaga Kerja								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		orang			16	20.186.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB
Kegiatan 2. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		orang			80	362.283.300	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 28. Program Hubungan Industrial								
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten		orang			10000	672.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 29. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan Kabupaten		orang		60	44.823.300	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		orang		350	2.611.260.000	APBN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan transmigrasi		orang		28	159.214.000	APBN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 30. Program Pengelolaan Pendidikan							
Kegiatan 1. Pengelolaan Pendidikan SMA		paket		1	376.696.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan SMK		paket		1	354.088.800	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengelolaan Pendidikan SLB		paket		1	173.253.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 31. Program Indonesia Pintar							
Pemberian bantuan biaya untuk kebutuhan sekolah bagi peserta didik miskin (SMA)		orang		20.269	15.090.500.000	APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Pemberian bantuan biaya untuk kebutuhan sekolah bagi peserta didik miskin (SMK)		orang		12.247	7.926.500.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS)/ P BPJS					
PROGRAM 31. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1.Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kabupaten/kota	10	10	10	142.013.257	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K						
PROGRAM 31.								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat						
PROGRAM 31. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK			301.100	527.488,812	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
PROGRAM 29. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	60		100	743.997.600,00	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 30. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	50	1,055	1,115	3.466.483.655,89	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan								
INDIKATOR SDGs :	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita/PKG AB (5)						
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
Kegiatan 1 : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kabupaten/kota)	Kabupaten/Kota	3	10	10	23.370.196.967	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 2: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	Lokasi	1	150		592.598.199.217	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	KK dengan Akses Jamban Sehat	%	82,67	94		106.178.491.448	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Investigasi		10	10	86.531.220	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Kegiatan 1: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	375	28	10	461.776.478	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan						
	2.1.2*	Parvelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan						
	2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400kkal/kapita/hari						
PROGRAM 4 : PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Kegiatan 1:Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					173.854.542	APBD	DKP Provinsi NTB
PROGRAM 5 : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						156.929.650	APBD	DKP Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					138.526.466	APBD	DKP Provinsi NTB	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					1.382.420.818	APBD	DKP Provinsi NTB	
INDIKATOR SDGs :	2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)						
	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/baduta						
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita						
PROGRAM 5: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Kegiatan 1 : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan Germas	(Kab/Kota)	3	5	7	333.081.723	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 6. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1.Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	Lokasi	1	150	150	592.598.199.217	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
PROGRAM 8. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
Kegiatan 1: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	375	17	28	4.383.435.000	APBD
INDIKATOR SDGs :	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil					
PROGRAM 9. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas		40	50	2.224.630.000	APBD
INDIKATOR SDGs :	2.2.2(b)						
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH Point)					
Program 10 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	%		90	90	9.373.297.884	APBD
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup					
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (%)					
	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan					
PROGRAM 1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	30	40	106.178.491.448	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup					
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup					
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup					
	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi					
PROGRAM 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	30	40	812.360.027	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.3.1(a)	Inisiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk					
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang					
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria					
	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B					
	3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta					
	3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis					

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
	3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)						
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi						
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun						
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa						
PROGRAM 3. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	Kab/Kota	1	9	10	115.471.298.897	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskesmas		151	151	725.818.000	APBD	RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis						
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi						
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan						
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu						
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba						
PROGRAM 4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas	89			432.173.492	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas					
PROGRAM 5. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
Kegiatan 1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	2		690.000.000	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
Kegiatan 2. Pengelola terminal Penumpang type B	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen	6		3.098.450.200	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
Kegiatan 3.Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah dokumen manajemen rekayasa lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	21		2.495.663.200	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern					
	3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin					
	3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang sama dan menyatakan dalam persentase					
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun					
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan					
PROGRAM 6: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	unit	4	4	106.178.491.448	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	
Kegiatan 4 : Pengadaan Alat Kesehatan/AI at Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang diadakan	Paket	1	1	170.209.853	APBD	RS Mandalika	
Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis Sarana yang diadakan	jenis	2	2	142.283.000	APBD	RS Mandalika	
Kegiatan 4. Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang diadakan	jenis	4	4	8.139.749.400	APBD	Dikes Induk, RS Mandalika	
Kegiatan 5 : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	jenis	120	120	266.673.000	APBD	Seksi Farmasi	
INDIKATOR SDGs :	3.8.2(a)							
PROGRAM 7. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyedian Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kabupaten/ Kota	10	10	10	592.598.199.217	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
INDIKATOR SDGs :	3.a.1*	Percentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun						
INDIKATOR SDGs :	3.b.1.(a)	Percentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas						
PROGRAM 8: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	3	10	10	106.178.491.448	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2: Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit	unit	15	13	13	13.946.396	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan						
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA								
Kegiatan 1: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	2	83	84	72.589.651	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas								
INDIKATOR SDGs :	4.1.1*	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan (ii) matematika						
PROGRAM 1. PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)								
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung baru SMA	Unit		1		2.260.620.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang		47		17.658.959.850	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3 : Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	ruang		2		542.546.800	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	ruang		27		14.619.560.427	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	ruang		1		650.716.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat						
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun						
PROGRAM 2. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)								
Kegiatan 1: Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Jumlah peserta seleksi	Orang		28		62.172.320	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Jumlah siswa yang memiliki Bakat, Minat dan Kreatifitas	Orang		90		134.213.760	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Peniaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dupak yang dinilai	dupak		50		60.444.450	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK- PLK	Jumlah peserta	Orang		50		49.953.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Jumlah sekolah yang dipantau	Sekolah	47		308.368.786	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sekolah yang pantau	kali	2		24.402.400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)							
Kegiatan 1. Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah dibangun	ruang	6		1.088.342.509	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SMK dibangun	ruang	14		3.572.969.400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah yang terbangun	Jumlah ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terbangun	ruang	1		276.033.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah Ruang laboratorium yang dibangun	ruang	26		16.578.939.146	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Jumlah alat Praktik dan Peraga siswa	Set	5		43.923.251.700	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi	unit	4		2.201.486.940	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang terehabilitasi	ruang	7		1.792.511.037	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 4. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Jumlah Dok manajemen BOS	Dokumen	12		40.076.016	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)					
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)					
PROGRAM 5 : PROGRAM PENINGKATAN BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN							
Kegiatan 1 : Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi yang diadakan	unit	48		62.400.000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kegiatan 2 : Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah SDM pengelola balai TIK yang dtingkatkan	Orang	70		1.248.073.500	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	Telaksananya pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	kali	16		330.720.000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kegiatan 4 : Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah media pembelajaran (master) berbasis TIK yang digandakan	keping	700		21.000.000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
INDIKATOR SDGs :	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					
PROGRAM 6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	Jumlah Produk hukum yang disusun	Produk hukum		4		500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah peserta seleksi	orang		200		756.219.200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3.Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta lomba	orang		20		,427,487,600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4.Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	sekolah		3981		965.647.284	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5.Penyediaan Beasiswa S, S, dan S	Jumlah peserta	orang		76		3.545.721.480	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6.Pengembangan Mutu Pendidikan	Jumlah jam tatap muka	jam		313.966		48.318.471.718	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7.Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Jumlah dokumen manajemen BOS	Dok		12		40.076.016	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 7. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)								
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung baru SMA	Unit		1	1	2.260.620.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang		47	47	17.658.959.850	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan ruang guru, ruang kepala	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	ruang		2	2	542.546.800	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
sekolah							
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah yang dibangun	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	ruang	27	27	14.619.560.427	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5.Pembangunan perpustakaan sekolah yang dibangun	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	ruang	1	1	650.716.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.					
Program 8							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik					
PROGRAM 9. PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAAN							
Kegiatan 1. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi S1/DIV	orang	486		115.057.229	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	orang	876		84.306.722	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3.Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Dokumen Data guru dan tenaga kependidikan	Dok	0		0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 4. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi	Orang	140		1.079.469.846	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	Jumlah Pengawas yang dinilai	orang	200		554.961.924	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Calon kepala sekolah yang bersertifikat	orang	0		300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen penilaian Angka Kredit Jafung	Dok	12		77.185.122	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 8. Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah calon kepala sekolah SMA, SMK dan PKPLK yang mengikuti bimtek	orang	300			APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 9 .Peningkatan Kompetensi Pendidik,Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	Jumlah Guru yang mengikuti	orang	350		2.498.820.562	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
	peningkatan kompetensi jenjang regional/nasional						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 10.Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Jumlah Guru tidak tetap (GTT) dan Pengawai TU tidak tetap	orang		200		330.764.400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 11.Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Workshop Sistem kendali pendidikan kinerja	orang		100		255.450.060	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 12. Olimpiade Sains Guru	Jumlah Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional	orang		120		362.254.717	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Tujuan 5. Kesetaraan Gender								
INDIKATOR SDGs :	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.						
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir						
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.						
PROGRAM 1. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Termasuk: PAUD HI)								
Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan	orang		72		1.169.138.976,42	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Provinsi							
Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS	orang		400	399.398.968,89	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
PROGRAM 2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	orang		237	285.696.385,20	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	orang		30	1.238.611.765,60	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 3.	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	orang	500	500	352.230.721,68	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun					
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.					
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.					
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).					
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.					
PROGRAM 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	orang	80		528.765.061,36	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Kegiatan 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	orang	80		475.093.499,25	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs : 5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.						
PROGRAM 4. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)							
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung baru SMA	Unit	1	1	2.260.620.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang	47	47	17.658.959.850	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	ruang	2	2	542.546.800	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	ruang	27	27	14.619.560.427	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5.Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	ruang	1	1	650.716.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 5. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)							
Kegiatan 1. Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah dibangun	ruang	6	5	1.088.342.509	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2.Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SMK dibangun	ruang	14	14	3.572.969.400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3.Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terbangun	ruang	1	0	276.033.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah Ruang laboratorium yang dibangun	ruang	26	26	16.578.939.146	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Jumlah alat Praktik dan Peraga siswa	Set	5	5	43.923.251.700	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi	unit	4	4	2.201.486.940	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang terehabilitasi	ruang	7	7	1.792.511.037	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							
Kegiatan 1. Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Jumlah Dok manajemen BOS	Dokumen	12	12	40.076.016	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)					
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.					
PROGRAM 7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Kegiatan 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	43,7	45	6.125.755.923,31	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewangan Provinsi	Proporsi kader perempuan di partai politik	%	38,2	39,2	105.355.836,51	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan					
	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang kontrasepsi modern).					
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.					
PROGRAM 8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Kegiatan 1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Design Program KIE KKBPK Yang dihasilkan	%	8	8	606.036.292,73	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dlm pembinaan kesertaan ber KB		200	250		APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	5.a.1						
	5.a.2						
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	5.b.1*						
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	5.c.1						
PROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Kegiatan 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Data Gender dan Anak	orang		60	60	200.537.839,51	APBD
PROGRAM 10. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	43,7	45	6.125.755.923,31	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Proporsi kader perempuan di partai politik	%	38,2	39,2	105.355.836,51	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak							
INDIKATOR SDGs :	6.1.1.(a)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.					
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.					
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan					
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR	10	240	240	3,395,737	APBD
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(b)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak					
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).					
	6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan dan komunal.					
PROGRAM 2 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regiona	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%		98,79	313,005	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Cipta Karya)	
PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)								
Kegiatan 1.Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary	ruang		3	3	142.776.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.NTB
Kegiatan 2 Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Jumlah sekolah sekolah sehat yang dibina	Sekolah		1	1	241.767.360	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
PROGRAM 4. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)								
Kegiatan 1 : Pembangunan sarana air bersih dan sanitary yang tersedia (Kamar/Toilet/WC	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang tersedia (Kamar/Toilet/WC	ruang		44	44	4.313.320.070	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.NTB (Seksi Kesling, Kesjaor)
Kegiatan 2 : Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah sekolah sehat yang terbina	sekolah		3	3	116.477.589	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
PROGRAM 5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1 : Penyedian Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kabupaten/kota)	Kab/Kota		10	10	11.865.262.000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB/Dinas PUPR Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).						
Program 1								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.						
PROGRAM 6 :								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.						
PROGRAM 7 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Buah		11	11	37.749.587,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 8 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	buah		11	11	37.749.587,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).						
PROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit	247	247	905.081.587.000	APBN	BPDASHL DMY	
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.						
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.						
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	bah	28	40	40	37.749.587,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Cipta karya)
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding(MoU) lintas Negara.						
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihian kawasan DAS.						
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit	3	3	140.573.548	APBD	Dinas LHK Prov.NTB	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (TERMASUK: NTB HIJAU, INDUSTRI KEHUTANAN: HASIL HUTAN KAYU, HHBK UNGGUL, GEOPARK-CAGAR BIOSFER RINJANI & TAMBORA)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		9	34	158,673,000	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		1	1	149,328,460	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi	%		41	41	719,225,974	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		12	11	2.068.695.441	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 5. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		12	12	321.310.968	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri		11	24	147,726,328	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 7.Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		2,896	14,550.16	147,726,328	APBD	Dinas LHK Prov.NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.					
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.					
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.					
PROGRAM 13. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit	2	50	135,485,800	APBD	Dinas LHK / Dinas LH Kab. Sumbawa Barat sebagai pelaksana kegiatan
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.					
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.					
	6.6.1.(c)	jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.					
PROGRAM 14. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha	25	56	996,658,861	KSB APBD Dinas LH	Dinas LHK / Dinas LH Kab. Sumbawa Barat sebagai pelaksana kegiatan
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.					
	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.					
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit	2	50	135,485,800	APBD	Dinas LHK / Dinas LH Kab. Sumbawa Barat sebagai pelaksana kegiatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau								
INDIKATOR SDGs :	7.1.1*	Rasio elektrifikasi						
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Termasuk: Nusa Tenggara Benderang)								
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	%		30	45	34.027.500,00	APBD	Dinas ESDM Prov.
Kegiatan 2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan (izin)	%		30	5	17.204.000,00	APBD	Dinas ESDM Prov.
Kegiatan 3. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS		900	125	236.863.775,00	APBD	Dinas ESDM Prov.

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								
INDIKATOR SDGs :	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita						
	8.1.1. (a)	PDB per kapita						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian,berdasarkan jenis kelamin						
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal						
PROGRAM 1 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang		300	300	667.772.367	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	Orang		40	0	0	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal)	OT		20	20	54.860.000	APBD	Disnakertran
INDIKATOR SDGs :	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian						
Program 1.								
Kegiatan 1.	Indikator 1.							
INDIKATOR SDGs :	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja						
PROGRAM 2 : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	90	19	46.340.000	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	11	381.100.000	APBD	Disnakertran
INDIKATOR SDGs :	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.					
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran					
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)					
PROGRAM 3 : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Kegiatan	160	109	2.830.000	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1,75	0	96.000	APBD	Disnakertran

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang		23,31	810	245.520.500	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang		75	0	0	APBD	Disnakertran
PROGRAM 4 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang		300	446	667.722.367	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	Orang		40	-	-	APBD	Disnakertran
Kegiatan 3 Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang		128	-	-	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal)	OT		20	20	54.860.000	APBD	Disnakertran
PROGRAM 5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK	20	20	2.500.000	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Jumlah peserta Bimtek	orang	20	60	26.124.900	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs :	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status					
	8.8.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.					
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.					
PROGRAM 6 : PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	200	1055	785	312.616.280	APBD
INDIKATOR SDGs :	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara					
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara					
Program 7 : Program Pemasaran Pariwisata							
Kegiatan 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%			42,76	3.066.792.323	APBD
Dinas Pariwisata Provinsi NTB							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Program 8. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
Kegiatan1. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		%		12,5	138.673.880	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					99.930.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					1.839.854.213	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 4. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					99.418.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 9. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
Kegiatan 1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang tersetifikasi HAKI	orang		45	342.865.486	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau					

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
		lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur								
INDIKATOR SDGs :	9.1.1.(a)	Jalan Mantap Provinsi						
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.						
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan						
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis						
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terselenggaranya Jalan Provinsi	km		168,00	540.56	409,013,548	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
Kegiatan 1. Kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi	Jumlah dokumen fasilitasi perizinan angkutan laut	Dokumen		38	40	16.812.000,00	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 2. Kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	unit		23	25	20.825.100,00	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
Kegiatan 3.Kegiatan Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah armada ASDP yang dievakuasi	unit		22	22	149.357.900,00	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
Kegiatan 4. Kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkaitberupa bongkar muat barang, jasa perguruan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo petik emas	Jumlah dokumen study tariff penyebrangan	dokumen		1	1	36.555.700,00	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 5. Kegiatan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan regional	Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan	1	2	103.540.000,00	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita					
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri					
PROGRAM 3. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	5	5	136.622.211.222	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2 Koordinasi, Terselarasnya, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya Koordinasi, Terselarasnya, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	sentra	18	18	13.479.993.997,1	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 3	Terlaksananya	IKM	18	18	15.964.823.372,7	APBD	Dinas Perindustrian

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						Provinsi NTB	
Kegiatan 4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	sentra		3	3	30.258.820.821,1	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM		450	450	20.442.030.525,8	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 6.	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dok		8	8	783.518.857,22	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
PROGRAM 4. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi	IKM	64	1600	1850	6.818.338.891,51	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
PROGRAM 5 . PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	dok	1	1	7.408.870.833,79	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.					
	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam					
	9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet					
PROGRAM 6 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	tersantandarisasi	Terstandarisasi	Terstandarisasi	6.229.379.684	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan							
INDIKATOR SDGs :	10.1.1*	Koefisien Gini					
INDIKATOR SDGs :	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur					
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Termasuk: Nusa Terang Benderang)							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	%	30	45	34.027.500,00	APBD	Dinas ESDM Prov.
Kegiatan 2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan (izin)	%	30	5	17.204.000,00	APBD	Dinas ESDM Prov.
Kegiatan 3. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS	900	125	236.863.775,00	APBD	Dinas ESDM Prov.
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Keg	2		313.005.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan	2		0	APBD	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
PROGRAM 4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	132.403	160.207	10,295 ,601	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
Kegiatan 2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani	Orang	4320	4363	400.303	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
PROGRAM 5. REHABILITASI SOSIAL							
Kegiatan 1. Rehabilitasi social Penyandang disabilitas terlantar di dalam pantai	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	jiwa	800	800	1,128,953,535	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Rehabilitasi social dasar anak terlantar didalam dalam pantai	Jumlah anak dan perempuan terlantar diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pantai	Jiwa	5500	5500	2,812,925,574	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3.Rehabilitasi social bagi penyandang masalah kesejateraan social (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam pantai	Jumlah penyandang masalah kesejateraan social (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitasi dalam pantai	jiwa		60	60	1.264.230.300	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
PROGRAM 6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Kegiatan 1.Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	jiwa		24800	25425	12.415.846.603	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
	Jumlah korban bencana yang diberikan sandang							
	Jumlah korban bencana alam							
	Jumlah kelompok rentan yang tertangani							
	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan							
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal						
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri						
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal						
PROGRAM 7. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Fasilitasi Kerjasama antar desa menjadi kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar Desa yang tersusun	Dokumen	160	40	242.812.003	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
PROGRAM 8. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA							
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kali	5	5	1.178.776.642	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
INDIKATOR SDGs :	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas					
PROGRAM 11. REHABILITASI SOSIAL							
Kegiatan 1. Rehabilitasi social Penyandang disabilitas terlantar di dalam pantai	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	jiwa	800	800	12.415.846.603	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil					
Program 1							
Kegiatan 1.	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					
Program 1							
Kegiatan 1.	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	10.4.1	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan					
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.					
Program 1							
Kegiatan 1.	Indikator 1						
INDIKATOR SDGs :	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan					
Program 1							
Kegiatan 1.	Indikator 1						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana			
			Target	Realisasi						
Tujuan 11.Kota dan Pemukiman yang Berkelaanjutan										
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.								
PRGRAM 1.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										
Kegiatan 1.Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang ditingkatkan huniannya	Unit	1083	538	132	3.092.189.460,000	APBD			
PROGRAM 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
Kegiatan 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan rumah terdampak bencana yang terdata dan tervalifikasi	%		100	100	171.151.500,00	APBD			
Kegiatan 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan masyarakat terdampak bencana/terdampak relokasi program provinsi yang tersosialisasi	%		100	100	23.582.600,00	APBD			
Kegiatan 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan penanganan rumah terdampak bencana yang tertangani	%		100	100	240.264.400,00	APBD			
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).								
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.								
PROGRAM 3. PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Tersedianya Perda RTR yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok		1	1	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen materi teknis, album peta, Ranperda RTR Provinsi NTB	Dok		1	1	327.951.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan))	KSP		1	1	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.2.1.(a)	Persentase pengguna modal transportasi umum di perkotaan.						
PROGRAM 4 PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
Kegiatan 1. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Prosentase keselamatan fasilitas jalan	jenis		2	1	5.294.906.660	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Kegiatan pengelolaan terminal penumpang type B	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang baik	dokumen		6	3	703.215.000	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Poresntase usulan manajemen rekayasa lalu lintas dan pelanggaran angkutan	dokumen		21	3	793.241.471	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.						
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).						
	11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.						
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
		dan kota kecil.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).						
Program 1.								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).						
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.						
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.						
PROGRAM 5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen		38	24	431.764.500	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Frekuensi Kejadian Bencana Yang Tertangani	kasus		99	99	3.480.489.500	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	Kegiatan		1	1	0	APBD	BPBD Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.						
PROGRAM 6. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		60	49,02	5,067,219,508	APBD	Dinas LHK Prov.
INDIKATOR SDGs :	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRБ) tingkat daerah.					
Program 1. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan							
Tujuan 12.Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab							
INDIKATOR SDGs :	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwinsprogram.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	12.2.1	Jejak material (material footprint).					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.					
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri).					
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Termasuk : Taman Asri/Indah)							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi		2	2	182,578,000	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 3. PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
Kegiatan 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pengumpul limbah B3 lintas daerah kab kota yang tertib aturan	unit usaha		210	115	11,370,000	APBD	Dinas LHK Prov.
INDIKATOR SDGs :	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.						
PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		60	49,02	5,067,219,508	APBD	Dinas LHK Prov.
INDIKATOR SDGs :	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim								
INDIKATOR SDGs :	13.1.1*	Dokumen strategipengurangan risiko bencana(PRБ) tingkat nasional dan daerah.						
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
PROGRAM 1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen	38	24	431.764.500	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Frekuensi Kejadian Bencana Yang Tertangani	kasus	99	99	3.480.489.500	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	Kegiatan	1	1	0	APBD	BPBD Provinsi NTB
Tujuan 14. Ekosistem Lautan							
INDIKATOR SDGs :	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.					
INDIKATOR SDGs :	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.					
INDIKATOR SDGs :	14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.					
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
Kegiatan 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	ha	2	101,24	2.658.921.500	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Kegiatan 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Percentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	%	10	100,08	3.124.980.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	unit	1	1,00	1,00	9.570.448.100	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
Tujuan 15. Ekosistem daratan								
INDIKATOR SDGs :	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.						
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.						
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.						
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		9	25,76	158,673,000	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		1	1	149,328,460	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		1,78	1,805	719,225,974	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	luas kawasan hutan yang dilindungi	%		41	41	719,225,974	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 5.Pelaksanaan Pengolahan Hasil	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		12	11	38,448,671	APBD	Dinas LHK Prov.NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Hutan Bukan Kayu (HHBK)							
Kegiatan 6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	24	147,726,328	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 2. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)							
Kegiatan 1.Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyanga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	kelompok	8	8	110,613,800	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Termasuk : Taman Asri/Indah)							
Kegiatan 1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	2	2	182,578,000	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
Kegiatan 1.Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit	247	50	135,485,800	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
INDIKATOR SDGs :	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
	Indikator 2							
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
INDIKATOR SDGs :	16.1.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
	16.1.2.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.						
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.						
	16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						
PROGRAM 12. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	desa		1	2	224.276.077	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
PROGRAM 13. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	lembaga		1	1	680.901.494	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Tim Jejaring yang difasilitasi	orang		85	85			
	Mediasi Konflik	kali		20	20	273.338.331		
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok		1	1	113.253.755		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana			
			Target	Realisasi						
INDIKATOR SDGs :	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.								
	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.								
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.								
Program 1										
Nama Kegiatan 1	Indikator 1									
	Indikator 2									
INDIKATOR SDGs :	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).								
PROGRAM 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
Kegiatan 1. Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asisten	Dok.laporan		172	122	2.529.078.823	APBD	Inspektorat Provinsi		
INDIKATOR SDGs :	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.								
Program 1.										
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(a)	Percentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).								
PROGRAM 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pengawasan internal	Percentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	%		4	2,07	851.642.520	APBD	Inspektorat Provinsi NTB		
	Percentase Permintaan ADTT oleh APH yang ditindaklanjuti	%		85	70	263.408.150				
Kegiatan 2.Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dok. laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan		25	10	187.238.130	APBD	Inspektorat Provinsi NTB		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
Kegiatan 3. Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asisten	Laporan		11	8	409.711.915	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
PROGRAM 5. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasa	Persentase Peningkatan Level Masing-masing Elemen Kapabilitas APIP	Dok. Regulasi dan Laporan		100	100	90.000.000	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
PROGRAM 6. PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN								
Kegiatan 1 Penyelegaraan Pengawasan internal	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	%		4	2	851.642.520	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
	Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang ditindaklanjuti	%		85	70	263.408.150		
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.						
PROGRAM 7. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	standar		terstandarisasi	terstandarisasi	860.050.103	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
PROGRAM 8. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	%	100	100	800375600	APBD	Biro Pengadaan Brang dan Jasa
Kegiatan 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan	%	100	100	276599400	APBD	Biro Pengadaan Brang dan Jasa
Kegiatan 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ di NTB yang memenuhi level kematangan minimal 3	%	20	30	294123400	APBD	Biro Pengadaan Brang dan Jasa
Program 1.							
Kegiatan 1.							
INDIKATOR SDGs :	16.6.2.(a)	Percentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).					
Program 1.							
Kegiatan 1.							
INDIKATOR SDGs :	16.7.1.(a)	Percentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)					
	16.7.1.(b)	Percentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.					
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.					
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.					
PROGRAM 13. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	lembaga	1	1	680.901.494	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Tim Jejaring yang difasilitasi	orang	85	85			
	Mediasi Konflik	kali	20	20	273.338.331		
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	1	113.253.755		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
INDIKATOR SDGs :	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.					
	16.9.1.(b)	Percentase anak usia 0- 17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota diProvinsi NTB					
PROGRAM 10. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
Kegiatan 1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan pendaftaran kependudukan dengan baik	Kab/kota		10	10	598.915.000	APBD
Kegiatan 2 Penyelenggaran pendaftaran penduduk	Jumlah kegiatan pendukung penyelenggaran pendaftaran kependudukan	keg		2	2	281.207.000	APBD
PROGRAM 11. PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
Kegiatan 1. Pelayanan Pencatatan sipil	Jumlah jenis dokumen catatan sipil dan pendukungnya	dokumen		1	1	654.257.000	APBD
INDIKATOR SDGs :	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).					
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.					
	16.10.2*						
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.					
PROGRAM 12. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	desa	1	2	224.276.077	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
PROGRAM 13. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	lembaga	1	1	680.901.494	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Tim Jejaring yang difasilitasi	orang	85	85			
	Mediasi Konflik	kali	20	20	273.338.331		
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	1	113.253.755		
INDIKATOR SDGs :	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.					
PROGRAM 14. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	%	80	88,11	7.857.009.750	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan							
INDIKATOR SDGs :	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.					
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB					
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.					
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%		4,48	-0,58	87.857.084	APBD
Kegiatan 2. Koordinasi dan Pengelolaan Pembentahan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	%		62,22	56,2	224.675.000	APBD
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%		9,08	21,13	10.995.645.813	APBD
INDIKATOR SDGs :	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).					
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.					
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.					
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.					
Program 1.							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2022		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
Kegiatan 1.							
Kegiatan 2.							
INDIKATOR SDGs :	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas					
PROGRAM 3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM	5	4	781.344.800	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.					
	17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						
INDIKATOR SDGs :	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.					
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)					
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.					
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).					
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.					
Program 1							
Nama Kegiatan 1	Indikator 1						
	Indikator 2						

Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Non Pemerintah

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realiasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR	1.5.2*	Jumlah Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB								
	1.5.4*	Proporsi Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan startegi daerah pengurangan resiko bencana yang selaras dengan startegi nasional pengurangan resiko bencana								
Nama Program 1 : Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Penurunan Kerentanan Perubahan Iklim Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Melalui Program Terpadu yang Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).										
Sektor 1. Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sub-Sektor: Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan/Ketahanan Pangan										
Kegiatan 1 : Pelatihan/ TOT Prediksi Curah Hujan (PCH)	1.1 <i>Output</i> Kegiatan : 75 orang PPL dilatih penggunaan peta kalender PCH	orang				12,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur
Kegiatan 2 : Penggandaan peta kalender Prediksi Curah Hujan	2.1 <i>Output</i> Kegiatan : 550 eksemplar peta kalender PCH dicetak	eksemplar				123,750,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur
										LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 3 : Sosialisasi Prediksi Curah Hujan ke Masyarakat oleh PPL dan Tim LPSDM	3.1. Output Kegiatan : 3.200 orang masyarakat (desa program) dan 1.800 masyarakat (non desa program) mendapat informasi PCH	orang			87,825,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 4 : Monitoring PPL yang mampu fasilitasi PCH	4.1. Output Kegiatan : 60 orang PPL mampu fasilitasi PCH	orang			6,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 5 : Monitoring masyarakat (lama dan baru) yang mendapat akses PCH telah mengadopsi/ praktik di lahannya dan pendataan hasil panennya	5.1. Output Kegiatan : 2 kali monitoring dan pendataan hasil panen tanaman pangan penerapan PCH pada 2.300 orang masyarakat baru seluas 230 Ha, dan 815 orang lama seluas 59 Ha, serta 1.260 orang di desa non program.	kali			12,675,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 6 : Pelatihan dan praktek teknologi pertanian konservasi	6.1. Output Kegiatan : 500 orang petani baru mengikuti latihan dan praktek pertanian konservasi	orang			15,125,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 7 : Pendampingan adopsi teknologi pertanian konservasi	7.1. Output Kegiatan : 400 orang petani baru yang menerapkan pertanian konservasi pada lahan seluas 2 Ha	orang			15,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 8 : Monitoring dan pengukuran hasil panen jagung teknologi pertanian konservasi dan kontrolnya	8.1. Output Kegiatan : 1 kali pengukuran pertumbuhan dan pengukuran hasil panen jagung pertanian konservasi dan kontrolnya, analisis usahatannya	kali			12,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 9 : Pelatihan dan praktek budidaya tanaman pangan lokal	9.1. Output Kegiatan : 450 petani mengikuti latihan dan praktek budidaya	orang			11,500,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	tanaman pangan lokal									
Kegiatan 10 : Monitoring petani lama dan baru yang menanam tanaman pangan lokal	10.1. <i>Output</i> Kegiatan : 2 kali monitoring pada 370 petani baru yang budidaya tanaman pangan lokal pada luasan 13 ha dan 822 petani lama pada luasan 45,96 ha	kali			8,650,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 11 : Survey ketahanan pangan (Bulan Ketahanan Pangan)	11.1. <i>Output</i> Kegiatan : 3 kali survey hasil panen pangan dan analisis BKP dilakukan bagi 100 KK responden di 5 desa sampel dari 20 desa	kali			1,750,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Sektor 1 : Pertanian dan Ketahanan Pangan, sub-sektor : Meningkatkan Produktivitas Lahan Kritis										
Kegiatan 1 : Pelatihan dan praktek kebun model Agrosilvopastoral	1.1. <i>Output</i> Kegiatan : 425 orang dilatih dan praktek pengelolaan kebun model	orang			12,575,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	agrosilvopastoral									
Kegiatan 2 : Monitoring petani yang membuat kebun agrosilvopastoral	2.1. <i>Output</i> Kegiatan : 325 orang petani baru membuat kebun model agrosilvopastoral seluas 32 Ha, dan 35 petani lama melanjutkan kebun agrosilvopastoral seluas 3,2 Ha; dengan total TUP 25.000 pohon	kali			50,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 3 : Monitoring pertumbuhan Tanaman Usia Panjang di kebun agroforestry yang baru dan lama (tanam, hidup dan mati)	3.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 kali monitoring pertumbuhan TUP di semua kebun agroforestry yang baru dan lama (tanam, hidup dan mati)	kali			2,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 4 : Pelatihan dan praktek konservasi sumber mata air/pantai/rawan longsor	4.1. Output Kegiatan : 3 sumber mata air (SMA) yang baru dikonservasi oleh 150 orang pada lahan seluas 4,5 Ha; 2 sumber mata air lama seluas 5,2 Ha; dengan total TUP 7.000 pohon	kali			22,825,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
	4.2. Output Kegiatan : Ada 2 sumber mata air lama dan 3 sumber mata air baru yang praktek /penyulaman tanaman konservasi	kali			6,750,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 5 : Monitoring perkembangan TUP di lokasi konservasi baik yang baru maupun lama (tanam, hidup dan mati)	5.1. Output Kegiatan : 2 sumber mata air lama dan 3 sumber mata air baru dimonitoring kondisi sumber mata air dan pertumbuhan	kali			2,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	tanaman TUP (tanam, hidup, mati)									
Sektor 2. Sistem Ekonomi dan Pasar, sub-sektor : Pelayanan Keuangan dan Usaha Produktif										
Kegiatan 1 : Pembentukan dan Pelatihan administrasi kelompok UBSP	1.1. <i>Output</i> Kegiatan : 11 Kelompok UBSP baru dibentuk dengan jumlah anggota 170 orang dan dilatih administrasi kelompok	kelompok orang			11,325,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 2 : Pelatihan Pengelolaan keuangan kelompok UBSP (lama dan baru)	2.1. <i>Output</i> Kegiatan : 90 orang anggota UBSP (lama dan baru) dilatih pembukuan, perhitungan SHU, administrasi, dll	orang			4,700,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 3 : Pelatihan dan praktek bisnis bagi anggota kelompok UBSP/UMKM	3.1. <i>Output</i> Kegiatan : 125 orang anggota UBSP/UMKM dilatih bisnis/wirausaha	orang			4,700,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	3.2. 100 orang anggota UBSP/UMKM alumni pelatihan mempunyai bisnis baru									LPSDM
Kegiatan 4 : Monev UBSP lama dan baru serta perkembangan bisnis setiap triwulan	4.1. Output Kegiatan : 19 kelompok UBSP lama dan 11 kelompok UBSP baru dimonitoring perkembangannya dengan tambahan modal Rp 40.401.000 (lama) dan Rp 30.000.000 (baru)	kali			4,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 5 : Survey pendapatan	5.1. Output Kegiatan : 1 kali survey pendapatan baseline di 5 desa sampel (50 responden) dari 20 desa	kali			26,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Sektor 3. Kebijakan dan Praktik Manajemen Risiko, Sub-Sektor: Membangun Kesadaran Masyarakat/Mobilisasi terhadap CBDRR dan PI										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1 : Pelatihan anggota FPRB dan staf BPBD tentang penggunaan peta bencana/ pengelolaan bencana/advokasi kebijakan DRR/PI, CBDRR dan Proklim	1.1. Output Kegiatan : 40 orang anggota FPRB dan staf BPBD dilatih tentang penggunaan peta bencana/ pengelolaan bencana/advokasi kebijakan DRR/PI, CBDRR dan Proklim	orang			4,500,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 2 :Pelatihan bagi masyarakat rentan bencana, KMPB dan Pemdes tentang CBDRR dan PI yang difasilitasi staf pemerintah (FPRB dan BPBD)	2.1. Output Kegiatan : 750 orang masyarakat rentan bencana, KMPB dan Pemdes difasilitasi CBDRR dan PI oleh anggota FPRB dan staf BPBD	orang			44,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 3 : Pendataan staf pemerintah (FPRB dan BPBD) yang mampu fasilitasi CBDRR dan PI untuk masyarakat	3.1. Output Kegiatan : 50 orang staf pemerintah (FPRB dan BPBD) mampu fasilitasi CBDRR dan PI bagi	orang			2,500,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	masyarakat rentan, KMPB dan Pemdes									
Kegiatan 4 : Monitoring masyarakat (lama dan baru) yang mendapat latihan PI dan PRB mengadopsi/ praktik adaptasi dan mitigasi PI dan PRB	4.1. <i>Output</i> Kegiatan : 650 orang masyarakat baru yang mendapat latihan telah mengadopsi/ praktik adaptasi dan mitigasi PI dan PRB	kali			5,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 5 : Pre test dan post test bagi peserta latihan PI dan PRB (post test setelah 2 bulan latihan)	5.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 kali difasilitasi pre test dan post test bagi 375 peserta latihan PI dan PRB (post test setelah 2 bulan latihan)	kali			6,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 6 :Pengembangan desa tangguh (penyusunan Protap Penanggulangan Bencana)	6.1. <i>Output</i> Kegiatan : 20 desa baru melakukan penyusunan Protap Penanggulangan Bencana	desa			52,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 7 : Pengembangan desa tangguh bencana (penyusunan Perdes Penanggulangan Bencana)	7.1. Output Kegiatan : 10 desa baru melakukan penyusunan Perdes Penanggulangan Bencana	desa			26,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 8 : Penilaian desa tangguh bencana dan kapasitas KMPB	8.1. Output Kegiatan : 25 desa dinilai tingkat ketangguhannya dan 25 KMPB dinilai tingkat kapasitasnya	kali			73,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 9 : Pertemuan reguler KMPB	9.1. Output Kegiatan : 25 desa/KMPB melakukan pertemuan regular	kali			60,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 10 : Memfasilitasi KMPB membuat proposal dan loby kepada pihak swasta, OPD	10.1. Output Kegiatan : 3 KMPB mampu membuat proposal untuk diajukan kepada pihak swasta dan/ OPD	proposal			4,500,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 11 : Monitoring perkembangan proposal dan pendataan dukungan pihak swasta dan OPD kepada KMPB	11.1. Output Kegiatan : 3 proposal telah dimonitoring KMPB tentang perkembangan dukungan pihak swasta dan atau OPD, serta pendataan hasil dukungannya	kali			3,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
	11.4. Output Kegiatan : 3 KMPB telah mendapat dukungan dana Rp 75.000.000 dari pihak swasta dan atau OPD	kali			3,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 12 : Fasilitasi pertemuan KMPB dengan Pemdes dalam rangka integrasi rencana aksi PI dan PRB ke dalam RPJMDes	12.1. Output Kegiatan : Ada 5 desa Proklim yang mengadakan pertemuan dengan Pemdes untuk mengintegrasikan rencana aksi PI dan PRB ke dalam RPJMDes/APBD	kali			27,100,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 13 : Monitoring hasil integrasi rencana aksi PI dan PRB dalam RPJMDes/APBDes dan pendataan dana desa untuk PI dan PRB	es	kali			25,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
	13.1. Output Kegiatan : Ada 4 kali monitoring pengintegrasian rencana aksi ke dalam RPJMDes/APBD es dengan pembiayaan dari alokasi dana desa	kali			25,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
	13.4. Output Kegiatan : Ada 202 rencana aksi yang terintegrasi dalam RPJMDes/APBD es telah terealisasi dengan dukungan dana desa Rp 250.000.000	kali								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 14 : Fasilitasi Pertemuan reguler FPRB kabupaten	14.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 kali pertemuan reguler FPRB kabupaten untuk menyusun advokasi anggaran rencana aksi masyarakat dilakukan dengan jumlah peserta 30% dari masyarakat/KMP B	kali			39,250,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 15 : Simulasi bencana di tingkat desa bersama anggota FPRB dan staf BPBD	15.1. <i>Output</i> Kegiatan : 25 desa difasilitasi simulasi oleh anggota FPRB dan staf BPBD sesuai dengan jenis bencana yang berisiko tinggi di setiap desa	desa			101,250,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 16 : Monitoring staf BPBD dan FPRB yang mampu fasilitasi simulasi bencana bersama masyarakat di desa	16.1. <i>Output</i> Kegiatan : 30 orang anggota FPRB dan staf BPBD mampu memfasilitasi simulasi	kali			2,500,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	bencana di tingkat desa									
Kegiatan 17 : Advokasi dan monitoring FPRB dan BPBD untuk melakukan kajian risiko bencana dan pembentukan desa tangguh dengan menggunakan dana Pemda	17.1. Output Kegiatan : 2 kali dilakukan advokasi dan monitoring dukungan dana operasional FPRB dan pembentukan desa tangguh	kali			10,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
	17.2. Output Kegiatan : 1 kali monitoring dukungan dana Pemda Rp 125.000.000 untuk operasional FPRB dan pengembangan 5 desa tangguh bencana	kali			4,500,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 18 : Lobi-lobi kepada Pemda dan Pemdes untuk mendapat dukungan dana serta pendataan dana yg didapatkan untuk PI dan PRB	18.1. Output Kegiatan : 5 kali lobi ke Pemda dan Pemdes untuk mendapat dukungan dana dan pendataan dana yang didapatkan untuk rencana aksi PI dan PRB masyarakat	kali			5,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
	18.2. Output Kegiatan : Ada dukungan dana Pemda sebesar Rp 3.000.000.000 dan Pemdes sebanyak Rp 250.000.000 untuk rencana aksi PI dan PRB yang telah terealisasi untuk masyarakat	kali								

Sektor 4. Kebijakan Manajemen Risiko dan Pratik, Sub-Sektor: Kebijakan dan Perencanaan

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1 : Advokasi penggunaan peta bencana untuk rencana pembangunan daerah (OPD/SKPD)	1.1. Output Kegiatan : 7 instansi konsisten menggunakan peta bencana sebagai dasar perencanaan	kali			6,350,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 2 : Workshop penggunaan peta bencana untuk rencana pembangunan daerah dan penggunaan pemodelan PCH	2.1. Output Kegiatan : 2 kali workshop penggunaan peta bencana untuk rencana pembangunan daerah dan penggunaan pemodelan PCH dengan jumlah peserta 50 orang	kali			15,500,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 3 : Lobi/advokasi dan monitoring alokasi dana Pemda untuk aplikasi PCH, pengurangan kerentanan, adaptasi dan mitigasi PI	3.1. Output Kegiatan : 4 kali lobi/Advokasi dana untuk aplikasi PCH, pengurangan kerentanan adaptasi dan mitigasi PI	kali			9,500,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
3.4. Output Kegiatan : Ada Rp 200.000.000 dukungan dana Pemda untuk aplikasi PCH, pengurangan kerentanan adaptasi dan mitigasi PI									Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 4 : Pendampingan sekolah siaga bencana	4.1. Output Kegiatan : 2 sekolah dilakukan pendampingan siaga bencana	kali			1,200,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
	4.2. Output Kegiatan : 2 sekolah difasilitasi simulasi bencana	kali			1,200,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
	4.3. Output Kegiatan : Ada 2 sekolah dilakukan monitoring perkembangan siaga bencana	kali			1,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
4.4. Output Kegiatan : Ada 1 kali monitoring dilakukan di 2 sekolah siaga bencana	kali				1,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 5 : Penilaian Kabupaten tangguh	5.1. Output Kegiatan : 4 kali penilaian kabupaten tangguh dilakukan	kali			4,050,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 6 : Advokasi kebijakan penanggulangan bencana (Perda/Perbup/aturan kesepakatan) dan dukungan kegiatan penting pengembangan kabupaten tangguh	6.1. Output Kegiatan : 4 kali advokasi kebijakan penanggulangan bencana (perbup/peraturan/ keputusan) penanggulangan bencana dilakukan	kali			15,875,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
	6.2. Output Kegiatan : Ada 1 jenis kebijakan (Perbup/peraturan/ keputusan) penanggulangan bencana dikeluarkan Pemda									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sektor 5. Fasilitasi Penguatan Kebijakan Pemerintah (KLHK), Sub-sektor : Kampung Iklim, Metode Monev Kerentanan Desa dan SIDIK										
Kegiatan 1 : Sosialisasi dan pembentukan kampung iklim	1.1. <i>Output</i> Kegiatan : 5 kampung iklim disepakati untuk dibentuk	kali			5,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 2 : Review/kajian kerentanan di 5 desa calon kampung iklim dan penyusunan rencana aksi	2.1. <i>Output</i> Kegiatan : 5 kampung iklim difasilitasi proses review/ kajian kerentanan dan penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI	kali			7,125,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 3 : Pelatihan/Penguatan kelompok kampung iklim	3.1. <i>Output</i> Kegiatan : 5 kelompok kampung iklim mendapat penguatan kapasitas sebanyak 3 kali	kali			16,125,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 4 : Fasilitasi pelaksanaan rencana aksi kampung iklim	4.1. Output Kegiatan : 5 kampung iklim difasilitasi untuk melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI yang prioritas masing-masing sebanyak 3 kali	kali			37,500,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 5 : Monev dan verifikasi Proklim	5.1. Output Kegiatan : 2 kali monev dan verifikasi kampung Proklim dilakukan oleh DLH dan LPSDM di 5 kampung iklim	kali			10,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 6 : Registrasi kampung iklim dan verifikasi	6.1. Output Kegiatan : 5 kampung iklim teregistrasi di SRN - KLHK	kali			5,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 7 : Pelatihan staf DLH dan SKPD, dan praktek ujicoba metode monev kerentanan API tingkat desa	7.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 kali pelatihan dan praktek ujicoba metode monev kerentanan API tingkat desa bagi 25 staf DLH dan SKPD lainnya	orang			10,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 8 : Penulisan metode dan instrumen monev kerentanan API tk desa	8.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 dokumen metode dan instrumen monev kerentanan API tingkat desa	dokumen			5,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 9 : Pelatihan staf DLH dan SKPD lainnya, serta praktek ujicoba metode monev kerentanan SIDIK tingkat kabupaten	9.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 kali pelatihan dan praktek uji metode monev kerentanan SIDIK tingkat kabupaten bagi 25 staf DLH & SKPD lainnya terlaksana	orang			8,000,000			World Neighbors (WN)	Lombok Timur	LPSDM
Kegiatan 10 : Penulisan metode kerentanan SIDIK tingkat kabupaten	10.1. <i>Output</i> Kegiatan : 1 dokumen metode dan instrument monev	dokumen			5,000,000			LPSDM	Lombok Timur	LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana									
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II												
kerentanan SIDIK tk kabupaten																			
INDIKATOR	1.2.2*	Presentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional																	
	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk katagori kelompok semua anak, pengaguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan																	
Nama Program 2 : Program Pengembangan Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan Miskin dalam Perencanaan dan Pemantauan Program-Program Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan keteraksesan, kesejahteraan dan Pemenuhan Hak-Hak Asasi Perempuan Miskin di Daerah-Daerah Program																			
EOPD 1 : Pemerintah pusat dan daerah menyesuaikan kebijakan dan anggaran mereka untuk meningkatkan layanan bagi perempuan miskin dan kelompok marginal																			
Intermediate Outcome 1.1. Komite pemantau melaksanakan perluasan pemantauan program perlindungan sosial antara lain PKH, KIP, BPNT dan SDGs dengan model AGBK																			
Output 1: Terselenggaranya perluasan pemantauan program perlindungan sosial antara lain PKH, KIP, KIS PBI, Rastra, BPNT dan isu-isu perempuan model AGBK																			
Kegiatan 1 : Pembentukan pos pengaduan untuk program-program perlindungan sosial dan isu-isu perempuan di desa program (3 desa di Lombok Timur dan 4 desa di Lombok Utara) dan replikasi		desa			21,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2 : Sosialisasi pos pengaduan kepada warga melalui kegiatan diskusi publik dan pelayanan konsultasi dan pengaduan di tingkat desa (13 desa di Lombok Timur dan 7 desa di Lombok Utara)	desa				20,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Kegiatan 3 : Workshop dan konsolidasi bagi 35 orang Tim Pemantau Komunitas untuk memperkuat pemahaman Manual Pemantauan melalui Pos Pengaduan.	orang				5,500,000			Cowater	Lombok Timur	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Kegiatan 4 : Pelaksanaan pemantauan melalui pos pengaduan.	kabupaten				24,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Kegiatan 5 : Konsolidasi Forum Multipihak untuk memperkuat dukungan terhadap proses pemantauan dan advokasi hasil.	kabupaten				2,700,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2 : Tersusunnya agenda bersama dari Komite Pemantau dan Forum Multipihak untuk mendukung peningkatan akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial dan tujuan 1-5 SDGs (khusus Lombok Utara ditambah goal 13)										
Kegiatan 1 : Menyelenggarakan diskusi untuk konsolidasi Komite Pemantau dan Forum Multipihak untuk menyusun agenda advokasi bersama.		kali			1,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Kegiatan 2 : Menyelenggarakan pertemuan dengan multipihak untuk pembentukan tim koordinasi SDGs di Kabupaten Lombok Utara.		kali			550,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Output 3: Terselenggaranya kampanye-kampanye publik di tingkat nasional dan daerah.										
Kegiatan 1 : Menyelenggarakan Jambore Daerah Kepimpinan Perempuan, Perlindungan Sosial dan SDGs		kali			30,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2 : Menyelenggarakan kampanye-kampanye untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, akses dan perbaikan terhadap program perlindungan sosial dan SDGs	kali				20,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Intermediate Outcome 1.3. Masyarakat memberi tekanan pada pemerintah untuk mendukung proses pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif										
Output 1: Masyarakat menginisiasi kampanye-kampanye dan aksi bersama tentang pentingnya perbaikan data dan pemantauan program perlindungan sosial yang responsif gender, inklusif dan transformatif										
Kegiatan 1 : Menyelenggarakan diskusi-diskusi dan konsolidasi untuk membahas draft-draft kebijakan dengan menggunakan hasil pemantauan.		kali			4,800,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Kegiatan 2 : Menggalang kerja jaringan untuk melakukan kampanye bersama tentang perbaikan data dan pemantauan perlindungan sosial.		kabupaten			6,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Intermediate Outcome 1.4. Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan Komite Pemantau dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan perlindungan sosial dan pencapaian SDGs										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 1 : Terlibatnya Komite Pemantau dalam penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan perlindungan sosial dan pencapaian SDGs										
Kegiatan 1 : Menyelenggarakan diskusi-diskusi dan konsolidasi penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan perlindungan sosial dan pencapaian SDGs		kali			10,500,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Output 2 : Adanya kebijakan atau tindakan administratif di tingkat nasional dan daerah yang mengintegrasikan pengalaman pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif										
Kegiatan 1 : Menyelenggarakan diskusi-diskusi dan konsolidasi untuk membahas draft-draft usulan kebijakan untuk SDGs		kali			12,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
EOPO 2 : Pemerintah pusat dan daerah mengadopsi sistem pendataan kemiskinan dan model pemantauannya										
Intermediate Outcome 2.1: Resource center Gender Watch di tingkat nasional dan daerah mengembangkan dan menyebarluaskan model pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif dalam rangka memperbaiki konsep perlindungan sosial										
Output 1: Terkuatkannya tata kelola dan sustainability organisasi dari resource centre di tingkat nasional dan lokal untuk menjalankan program Gender Watch (GW) dan mendukung gerakan GW										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1 : Memperkuat konten, metodologi dan strategi program melalui Resource Center:		orang			30,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Intermediate Outcome 2.2: Gerakan Gender Watch mengembangkan diskursus dengan pemerintah dan masyarakat terkait model pemantauan responsif gender, inklusif dan transformatif.										
Output 1: Berkembangnya diskursus di publik tentang pentingnya model pendataan dan pemantauan yang berperspektif gender, inklusif dan transformatif.										
Kegiatan 1 : Pertemuan penyepakatan desain kegiatan Orientasi Mahasiswa Universitas Hamzanwadi di Lombok Timur dengan tema SDGs goal 1-5 dan perlindungan perempuan dari kekerasan.		kali			2,500,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
EPOO 3 : Pemerintah di tingkat desa dan kabupaten di wilayah program telah mengadopsi dan menggunakan masukan dari pemimpin perempuan miskin dan kelompok marginal ke dalam proses pengambilan keputusan.										
Intermediate Outcome 3.1: Perempuan miskin memperkuat dan memperluas Sekolah perempuan sebagai pusat pembelajaran dan penguatan kepemimpinan perempuan, advokasi berbasis data dan sumber penghidupan di wilayah program										
Output 1: Menguatnya kapasitas Sekolah Perempuan sebagai pusat pembelajaran, pengembangan kepemimpinan perempuan, kegiatan advokasi berbasis data, livelihood dan SDGs yang responsive gender, inklusif dan transformatif.										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
Kegiatan 1 : Penguatan kapasitas untuk Leader dan Fasilitator SDGs (terintegrasi dengan pertemuan Sekolah Perempuan dan anggaran Pemda)									Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM	
Output 2: Meluasnya proses fasilitasi Sekolah Perempuan di wilayah replikasi											
Kegiatan 1 : Memfasilitasi anggota Sekolah Perempuan di wilayah replikasi. (terintegrasi dengan pertemuan Sekolah Perempuan dan anggaran Pemda)									Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM	
Intermediate Outcome 3.2: Pemimpin terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan Musrenbangkab di wilayah program.											
Output 1: Meningkatnya kapasitas Tim Pemantau Komunitas dan anggota Sekolah Perempuan untuk berpartisipasi di setiap tahapan Musrenbang dari tingkat desa sampai kabupaten, Musdus, Musdes/Muskel dan forum penyusunan RKPD, RKPDes, Rembuk RW dan lain-lain											
Kegiatan 1 : Memfasilitasi penyusunan usulan yang akan dibawa dalam Musrenbang.		kali				1,950,000			Cowater	Lombok Timur	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Intermediate Outcome 3.3: Perempuan miskin dan kelompok marginal melakukan advokasi kebijakan pembangunan yang pro poor, responsif gender dan inklusif.											
Output 1: Menguatnya kapasitas Tim Pemantau Komunitas dalam melakukan advokasi berbasis data untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan yang pro poor, responsif gender dan inklusif.											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1 : Memfasilitasi peningkatan kapasitas Tim Pemantau Komunitas dalam peningkatan pemahaman dan penggunaan manual pemantauan perlindungan sosial, isu-isu perempuan dan implementasi SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformatif khususnya goal 1 dan 5.	kali				12,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Output 2: Meningkatnya kapasitas Sekolah-sekolah Perempuan dalam mengorganisir kampanye-kampanye publik										
Kegiatan 1 : Memfasilitasi pengembangan media-media kampanye publik: Koran Sekolah Perempuan	kali				4,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2 : Memfasilitasi peningkatan kapasitas 64 orang anggota Sekolah Perempuan melalui Pendidikan Politik Perempuan dalam Pemilu 2019 yang mengintegrasikan agenda kesetaraan gender dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, khususnya tujuan goal 1, 4 dan 5 SDGs.	orang				6,400,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Output 3: Terfasilitasinya pengembangan kegiatan-kegiatan livelihood										
Kegiatan 1 : Memfasilitasi kegiatan-kegiatan livelihood perempuan khususnya di wilayah yang terkena bencana.(Memfasilitasi pengembangan livelihood di 4 desa terkena bencana)		desa			66,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Output 4: Terbentuknya Federasi Sekolah Perempuan (Terlembaganya Sekolah Perempuan)										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1 : Memfasilitasi proses pelembagaan Sekolah Perempuan	kabupaten				13,500,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Output 5 : Terbentuknya Sekolah Perempuan untuk kaum muda di tingkat Desa										
Kegiatan 1 : Memfasilitasi pertemuan-pertemuan pembentukan dan pengesahan Sekolah Perempuan Muda untuk SDGs	kali				4,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
INDIKATOR	1.3.1*	Proporsi Penduduk yang menerima program perlindungan sosial,menurut jenis kelamin, untuk katagori kelompok semua anak,pengangguan, lansia,penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan								
	1.5.2*	Jumlah Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB								
Nama Program 1: ICSR/Tanggap Darurat/COPE (Response COVID-19)										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									
Distribusi Cash/Voucher kepada masyarakat yang terdampak bencana	# orang yang mendapat manfaat	orang	17,831					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Distribusi Cash/Voucher kepada masyarakat yang terdampak COVID-19	# orang yang mendapat manfaat	orang	2,851					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Distribusi Cash/Voucher kepada masyarakat terdampak (segregasi jenis kelamin, usia dan disabilitas)	# orang yang mendapat manfaat	orang	1,746					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Distribusi Cash/Voucher kepada masyarakat rentan (segregasi jenis kelamin, usia dan disabilitas)	# Rumah tangga rentan sadar dan mampu mengakses jaminan sosial	orang	3,281					DFAT	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	YMP, FKGP
INDIKATOR	1.5.2*	Jumlah Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB								
	1.5.4*	Proporsi Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan startegi daerah pengurangan resiko bencana yang selaras dengan startegi nasional pengurangan resiko bencana								
Nama Program 1: ICSR/Tanggap Darurat										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Dukungan Bagi anak selama bencana dan pengurangan resiko bencana	#anak yang mendapatkan dukungan psikososial melalui ruang ramah anak dan perpustakaan keliling	orang	19,864					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Distribusi APD kepada tenaga kesehatan	#paket yang didistribusikan	paket	50					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Rumah tangga rentan dan anak-anak yang terkena dampak COVID-19 telah meningkatkan akses ke perlindungan sosial dan pendidikan yang aman	#guru dan anak sekolah yang mendapatkan PSS	orang	1,008					DFAT	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	YMP, FKGP
Nama Program 1: ICSR/Tanggap Darurat										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Distribusi paket kesehatan kepada masyarakat dan anak pasca bencana	#orang yang mendapat paket kesehatan	orang	10,061					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Penyediaan media dan sarana edukasi pencegahan COVID-19	# KIE	sticker dan flyer	1,667					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Masyarakat rentan memiliki akses ke pesan pencegahan-promotif inklusif gender dan disabilitas tentang COVID-19 untuk memerangi informasi yang salah, mengatasi hambatan, dan meningkatkan penerimaan dan penyerapan vaksin	#orang yang mendapat diseminasi dan divaksinasi	orang	11,661					DFAT	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	YMP, FKGP
Nama Program 1: Fase Tanggap darurat										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Peningkatan akses pendidikan pada anak pasca bencana	#orang yang mendapat paket anak sekolah	orang	10,061					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
INDIKATOR	1.5.2*	Jumlah Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB								
	1.5.4*	Proporsi Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan startegi daerah pengurangan resiko bencana yang selaras dengan startegi nasional pengurangan resiko bencana								
Nama Kegiatan 1: Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak sedang dan rusak berat bagi berbagai layanan publik dengan	1.1 Output Kegiatan: Pembangunan 4 Fasilitas Pendidikan di Lombok Utara	unit	4					KfW (bank pembangunan Jerman) melalui UNDP Indonesia	SMKN 1 Tanjung, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Gangga, SMKN 1 Kayangan	PT. Ervan Prima Abadi JV

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
mempertimbangkan kebutuhan gender dan hal-hal lain terkait gender	1.2 Output Kegiatan: Pembangunan Fasilitas Kesehatan (1 Puskesmas di Lombok Timur, 8 Puskesmas Pembantu di Lombok Utara dan 1 Puskesmas Pembantu Lombok Barat)	unit	10					KfW (bank pembangunan Jerman) melalui UNDP Indonesia	Puskesmas Labuhan Lombok, Pustu Gapuk, Pustu Telaga Wareng, Pustu Gangga, Pustu Loloan, Pustu Tegal Maja, Pustu Rangsot, Pustu Sesait, Pustu Pendua, Pustu Selengan.	PT. Ervan Prima Abadi JV
Nama Kegiatan 2: Rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat untuk meningkatkan penghidupan yang lebih tangguh dan berkelanjutan baik bagi laki-laki dan perempuan	2.1 Output Kegiatan: Pembangunan 8 Infrastruktur Ekonomi Masyarakat (irigasi pertanian, embung pertanian, jembatan tani, waserda dan jaringan air bersih)	unit	8					KfW (bank pembangunan Jerman) melalui UNDP Indonesia	Lombok Timur (Desa Sembalun Bumbung, Desa Sajang dan Desa Sembalun Lawang) dan Lombok Utara (Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang)	PALUMA di Lombok Utara dan WVI di Lombok Timur

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
2.2 Output Kegiatan: Pendampingan penguatan kapasitas pemulihian penghidupan paska bencana gempabumi 2018 (pelatihan teknis, pemasaran, Pengurangan Resiko Bencana, kesiapsiagaan, dll)	Desa	5						KfW (bank pembangunan Jerman) melalui UNDP Indonesia	Lombok Timur (Desa Sembulan Bumbung, Desa Sajang dan Desa Sembulan Lawang) dan Lombok Utara (Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang)	PALUMA di Lombok Utara dan WVI di Lombok Timur
	KK	300						KfW (bank pembangunan Jerman) melalui UNDP Indonesia	Desa Sambik Elen dan Genggelang, Lombok Utara	PSP NTB
	unit	1						KfW (bank pembangunan Jerman) melalui UNDP Indonesia	Desa Genggelang, Lombok Utara	CV. Rasa Abadi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1 : Dukungan psikososial support dan distribusi bantuan korban gempa bagi perempuan dan anak	1.1. Sosialisasi dan dukungan psikososial awal bagi korban gempa 2018 di Pulau Lombok							CSR Perusahaan Dagang Net Malaysia	masing-masing 1 desa di 3 Kab sepulau lombok (Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara	SOBAT NTB
	1.2. Distribusi Bantuan sembako dan kebutuhan personal Perempuan dan Anak							CSR Perusahaan Dagang Net Malaysia	masing-masing 1 desa di 3 Kab sepulau lombok (Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara	SOBAT NTB
Kegiatan 1:Menyediakan dan mendistribusikan perlengkapan kebersihan untuk protocols normal baru (sabun cair dan pembersih tangan)	Jumlah keluarga menerima perlengkapan kebersihan untuk protocol normal baru	Keluarga						Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan	New Zeland Embassy	YASERA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2: Penyediaan dan pendistribusian APD (pelindung wajah, sarung tangan) kepada petugas medis dan puskesmas, CHW, dan staf Yasera	2.1.Jumlah puskesmas menerima APD	Lembaga								
	2.2 Jumlah CHW menerima APD	Kader Desa								
Kegiatan 3: Menyediakan bibit dan peralatan kebun rumah (polibag, dll.) Untuk keluarga, pendeta dan misionaris dari gereja kecil	Jumlah keluarga menerima benih tanaman seperti sawi, kangkong,bayam , cabe dan tomat.	Keluarga								
Kegiatan 4: Kembangkan media visual (poster dan selebaran) untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Covid-19 selama sesi peningkatan kesadaran	Jumlah keluarga menerima peaflet/brosur/poster	Keluarga								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 5:Peningkatan kesadaran melalui penyuluhan	Jumlah keluarga terlibat aktif dalam pertemuan	Keluarga								
Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Pulau Lombok										
Nama Kegiatan 1 : Dukungan psikososial support dan distribusi bantuan korban gempa bagi perempuan dan anak	1.1. Sosialisasi dan dukungan psikososial awal bagi korban gempa 2018 di Pulau Lombok							CSR Perusahaan Dagang Net Malaysia	masing-masing 1 desa di 3 Kab sepulau lombok (Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara	SOBAT NTB
	1.2. Distribusi Bantuan sembako dan kebutuhan personal Perempuan dan Anak				375,000,000			CSR Perusahaan Dagang Net Malaysia	masing-masing 1 desa di 3 Kab sepulau lombok (Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara	SOBAT NTB
Tujuan 2, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan										
Aktifitas 1.1, Memperluas Akses Pembiayaan Agri-Input untuk Petani melalui BISI-YARO di	Output : Petani mudah mengakses pembeayaan agri-input dan	petani	1000		373,000,000 .00			PT Bisi International dan PRISMA	Bima, Dompu, Sbw, KSB, Lotim, Loteng, KLU, Lobar	PT Bisi Internationa l dan PRISMA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
NTB	benih berkualitas										
Aktifitas 2.1, Memperluas Akses Pembiayaan Agri-Input untuk Petani	Output : Petani mudah mengakses pembeayaan agri-input	petani	1000			100,000,000 .00			Bank Sinar Mas, BNI dan PRISMA	Bima, Dompu, Sbw, KSB, Lotim, Loteng, KLU, Lobar	Bank Sinar Mas, BNI dan PRISMA
Aktifitas 3.1, Mempromosikan Pupuk Komersial & Praktik Terbaik Penggunaan Pupuk Berkualitas di Kabupaten Lotim, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima dan Dompu	Output: Petani paham penggunaan pupuk berimbang yang berkualitas	petani	1500			455,000,000 .00			PT Pupuk Kalimantan Timur dan PRISMA	Lotim, Sumbawa, KSB, Bima, Dompu	PT Pupuk Kalimantan Timur dan PRISMA
Aktifitas 4.1, Memperkenalkan Layanan Manajemen Mesin Pertanian di kabupaten Lotim, Lobar, KLU, Sumbawa, KSB, Dompu	Output: Petani mampu memanage dan menggunakan mesin pertanian dengan baik	petani	75			125,000,000 .00			PT Terra Agro Digital dan PRISMA	Lotim, Lobar, KLU, Sbw, KSB, Dompu	PT Terra Agro Digital dan PRISMA
Aktifitas 5.1, Memperkenalkan Pengelolaan Irigasi secara Mandiri di NTB (Masih dibahas)	Output: Petani mampu memanage dan menggunakan irigasi dan air dengan baik	petani							Partner and PRISMA	NTB	Partner and PRISMA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Aktifitas 6.1, Memperkenalkan dan mempermudah informasi melalui teknologi terkait Pertanian (Masih dibahas)	Output: Petani mampu menggunakan fasilitas ICT dengan baik	petani dan aktor di bisnis pertanian						VIAMO and PRISMA	NTB	VIAMO and PRISMA
Aktifitas 7.1, Edukasi dan Memperkenalkan Pakan berkualitas	Output: Produksi ternak besar meningkat dan petani serta pengusaha mampu mengakses pakan berkualitas dengan mudah	peternak dan aktor di bisnis peternakan	5000	1500	300,000,000 .00			PT SREEYA and PRISMA	NTB	PT SREEYA and PRISMA
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L)								DKP Provinsi NTB dan Rumah Zakat	87 Desa se NTB	Desa Berdaya Foundation
Desa Bebas Stunting								Rumah Zakat	2 Desa Lobar dan Loteng	Desa Berdaya Foundation
Bantuan Sumur BOR								Rumah Zakat dan Kitabisacom	Lobar dan Loteng	Desa Berdaya Foundation

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Bank Sampah								Rumah Zakat	Kabupaten Bima	Desa Berdaya Foundation
Lumbung Pangan Masyarakat								DKP Provinsi NTB dan Rumah Zakat	15 Desa se-NTB	Desa Berdaya Foundation
Bantuan Sembako								Tower Bersama Group	10 Desa seNTB	Desa Berdaya Foundation
Kegiatan 1:Mengadakan kelas nutrisi bagi anak balita yang kurang gizi	1.1 Jumlah balita yang mengikuti kelas gizi	Balita	484		160,000,000 .00			MH,TearFun d Australia,	Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan dan Desa Salut Kecamatan Kayangan	YASERA
	1.2 Jumlah balita yang menerima PMT (BGM dan garis kuning)	Balita	122						Kabupaten Lombok Utara.	
Kegiatan 2:Pelatihan ibu dan anak tentang nutrisi dan PHBS	2.1. Jumlah keluarga yang melakukan praktik nutrisi dan PHBS	Keluarga	818		120,000,000 .00					
	2.2. Jumlah Ibu balita dalam pelatihan Nutrisi dan PHBS	Ibu	477							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	2.3 Jumlah anak balita dalam pelatihan Nutrisi dan PHBS	Anak/balita	484							
Kegiatan 3:Pelayanan posyandu berbasis KMS	3.1. Jumlah keluarga yang membawa anak balita ke posyandu	Keluarga	477		20,000,000.00					
	3.2. Jumlah Balita ikut posyandu	Balita	484							
Kegiatan 4: Pelatihan kader untuk manajemen data dan pelayanan kesehatan	4.1. Jumlah kader terlatih	Kader	105		50,000,000.00					
	4.2. Jumlah keluarga yang dikunjungi kader	Keluarga	818							
Kegiatan 1: Pertanian	1.1. Jumlah keluarga yang dilatih pertanian Organik (Kakao, kebun gizi dan kebun komersil).	Keluarga	667		60,000,000.00			MH TearFund Australia	Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Desa Salut Kecamatan Kayangan KLU	YASERA
	1.2. Jumlah keluarga yang menerima bibit dan alat pertanian	Keluarga	667							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	1.3. Pekarangan rumah tangga yang terbentuk	Kebun gizi	667							
	1.4. Jumlah kebun komersil terbentuk	Kebun komersil	402							
Kegiatan 2: Tabungan Untuk Kehidupan (TUK)	2.1. Jumlah kelompok menabung yang terbentuk	Kelompok	25		120,000,000 .00					
	2.2. Jumlah keluarga hadir dalam pertemuan kelompok TUK seminggu sekali	Keluarga	666							
	2.3. Jumlah keluarga dampingan yang dilatih manajemen keuangan	Keluarga	666							
	2.4. Jumlah keluarga yang terlibat dalam pelatihan pengembangan usaha	Keluarga	666							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	2.5. Jumlah keluarga dampingan yang membuat rencana pengembangan usaha kecil	Keluarga	538							
INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.								
Nama Program 1 (11) :Peningkatan akses keluarga terdampak pandemi covid19 di Kota Mataram dan Lombok Barat terhadap makanan yang bergizi dalam hal kecukupan jumlah, kualitas dan keberagaman untuk 2 bulan)	Hunger Prevention for Covid 19 Affected People									
	1.1. 5000 HHs termasuk anak yatim dan kelompok rentan yang terkena dampak pandemi Covid19 menerima bantuan senilai Rp 1,2 juta	KK	5000		9,209,750,6 11.80	5004			Dasan Agung (Mataram), Batu Layar (Lobar), Montong Ajan (Loteng), Selong (Lotim)	Islamic Relief Indonesia, KONSEPSI
Pemulihan produktivitas dan pendapatan UMKM melalui keterlibatan dalam	1.2. 5000 KK menerima KIE tentang menu makanan seimbang	KK	5000			5004		IR UK		

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
penyediaan bahan pangan untuk para pemegang hak	2.1. Output Kegiatan: 500 UMKM terdaftar sebagai vendor untuk penyediaan bahan pangan kepada para pemegang hak terpilih	unit	500			129				
INDIKATOR	2.2.1*	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan								
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat,berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan								
Advocacy Plan Food and Food Security Sector,					350.0 00.00 0			250.000. 000		Konsepsi
INDIKATOR	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan								
Nama Program 2: Dukungan pemulihan penghidupan paska bencana	1. Output: Rekonstruksi jaringan irigasi tersier pertanian	m	400		650,000,000			Jakarta Ambasador Golf Association (JAGA) melalui UNDP Indonesia	Desa Sembulan Bumbung dan Sajang Lombok Timur	PSP NTB
INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan								
Nama Program 1: CWN/Tanggap Darurat										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Mendukung asupan nutrisi bayi dan anak-anak di penampungan sementara	#anak yang mendapat makanan	orang	4,426					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Peningkatan kapasitas kader kesehatan tentang PMBA	#kader kesehatan yang dilatih	orang	234					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Monitoring Anak melalui Posyandu	# anak yang dimonitor	orang	250			44,325,000		Australia	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	Wahana Visi
Peningkatakan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam melakukan monitoring anak	# nakes dan kader posyandu yang dilatih	orang	50					Australia	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	Wahana Visi
INDIKATOR	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Program 2: Dukungan pemulihan penghidupan paska bencana	1. Output: Rekonstruksi jaringan irigasi tersier pertanian	m	400		650,000,000			Jakarta Ambasador Golf Association (JAGA) melalui UNDP Indonesia	Desa Sembulan Bumbung dan Sajang Lombok Timur	PSP NTB
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Nama Kegiatan 2 : Pengelolaan Gizi Burk Terintegrasi (PGBT)	Kegiatan 2.1: Lokakarya konsultasi PGBT bersama stakeholder kunci ditingkat provinsi melibatkan stakeholder kunci dari provinsi NTB dan Provinsi NTT dan kabupaten terkait untuk memastikan koordinasi, berbagi pengalaman baik yang efektif dalam penyediaan layanan rawat				25,259,000			UNICEF	100 peserta: Pemerintah provinsi dan kabupaten, tokoh agama, patner lainnya, Perwakilan Pemerintah NTB dan NTT untuk berbagi pengalaman dan perwakilan Kemenkes dilakukan secara online	SOBAT NTB kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kemnkes

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	jalan dan rawat inap bagi anak gizi buruk.									
	Kegiatan 2.3 Sosialisasi PGBT di Tingkat Provinsi				12,280,000			UNICEF	Di provinsi	SOBAT
	Kegiatan 2.2: Pelatihan PGBT bagi Tenaga Kesehatan dari 5 Kabupaten/Kota terdampak gempa .				145,164,000			UNICEF	27 tenaga kesehatan (Tenaga Gizi, Bidan/Perawat, Dokter dan staf Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten), serta perwakilan dokter spesialis Anak RS yang ada di 5 kabupaten/Kota (Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Tengah)	SOBAT NTB kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Kegiatan 2.3: Pelatihan Gizi Bencana bagi stakeholder kunci.				126,021,000			UNICEF	25 orang peserta yang mewakili unsur, Dinas Kesehatan, Poltekkes, Gizi, Forum PRB, PKK dll	SOBAT NTB
	Kegiatan 2.4 : Join monitoring/ suportif superfisi Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, Bappeda, PKK & DPMPD.				23,654,000			UNICEF	Pewrakilan Bppeda, PKK Dinas Kesehatan ,PKK dan Tim Gizi Puskesmas Model PGBT di tingkat Provinsi dan 5 Kab/Kota sepulau Lombok	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Kegiatan 2.5 : Mobilisasi masyarakat di 5 Puskesmas di 5 Kabupaten/Kota.				62,750,000			UNICEF	Melibatkan semua stakholder di tingkat desa, mulai dari kader, PKK, Pemdes, Tenga Kesehatan, Babinsa, pendidik dll di 5 desa 5 kabu/kota sepulau lombok	SOBAT NTB
	Kegiatan 2.6 : Mendorong adanya Kebijakan di Tingkat Provinsi terkait dengan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) di NTB				26,291,500			UNICEF	2 Dokumen Kebijakan di Tingkat Provinsi untuk dapat di tindaklanjuti di 10 Kab/Kota dalam bentuk SE Bupati/Wali Kota	SOBAT NTB dan Dinas Kesehatan Propinsi
	Kegiatan 2.7 : Webinar Ayah ASI				16,675,000			UNICEF	Di tingkat Provinsi dan 5 kab/kota sepulau lombok	SOBAT NTB dan Dinas Kesehatan Propinsi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realiasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 3 : Pendampingan dan Konseling bagiorangtua/ Pengasuh Balita melalui Tele Monitoring sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) konteks COVID-19	3. 1 Ujicoba Tele Monitoring PGBT di 3 Kab/Kota Model (Kota Mataram, KLB & KLU) kerjasama Poltekkes Mataram	aplikasi Google Form model Pendampingan PGBT	1 aplikasi Google Form model Pendampingan PGBT		9,349,000			UNICEF	Online workshop uji coba aplikasi melalui Online di Provinsi	SOBAT
	3.2 Sosialisasi Pita Lila Bagi Stakeholder	Alat Deteksi dini Gizi Burk dan Gizi Kurang	1 Alat Deteksi dini Gizi Burk dan Gizi Kurang		5,505,000			UNICEF	Di Provinsi secara online	SOBAT
	3.3 Sosialisasi Pita Lila Bagi orang Tua Balita	Alat Deteksi dini Gizi Burk dan Gizi Kurang	1		13,500,000			UNICEF	di 3 Puskesmas Model Tele Monitoring (Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara)	SOBAT
	3.4 Workshop secara onine Pendampingan Tele Monitoring	aplikasi Google Form model Pendampingan PGBT	1		4,901,000			UNICEF	Online di Tingkat Provinsi	SOBAT

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	3.5 Uji Coba Aplikasi Tele Monitoring	aplikasi Google Form model Pendampingan PGBT	1		5,206,000			UNICEF	di 3 desa willyah Puskesmas ModelTele Monitoring (Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara)	SOBAT
	3.6 Pembuatan Banner PGBT	Eksemplar	25		3,969,700			UNICEF	masing-masing 5 Puskesmas di 5 Kab/Kota sepuлau Lombok	SOBAT
	3.7 Pembuatan Tool Tele Monitoring	aplikasi Google Form model Pendampingan PGBT	1		13,500,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
Nama Kegiatan 4 : Memperkuat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam percepatan penurunan Stunting	Kegiatan 4.1 : Pelatihan Online PMBA	Latihan Jarak Jauh TOT			13,965,000			UNICEF	Di Provinsi secara online	Kemenkes RI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 5 : Memperkuat kapasitas Pemerintah provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan Pengelolaan gizi buruk terintegrasi (PGBT) melalui penguatan SOP dan inovasi dimasa pandemi.	Kegiatan 5.1 : Pertemuan Multipihak dalam memperkuat pelaksanaan PGBT	kali	3		5,480,500			UNICEF	Di Provinsi secara online	SOBAT
	Kegiatan 5.2 : Petemuan bersama stakholder dalam memperkuat Regulasi PGBT di tingkat kabupaten Model	kali	3		11,256,000			UNICEF	di Kabupaten Lombok Utara	SOBAT
	Kegiatan 5.3 : Pertemuan bersama Dinas Kesehatan di tingkat Kab/kota dan Provinsi dalam penyusunan Road Map PGBT	kali	1		2,250,000			UNICEF	Di Provinsi	Dikes Propinsi dan SOBAT
	Kegiatan 5.4 : Pelatihan PGBT Online	kab/koat	10		8,175,000			UNICEF	Di Provinsi	Dikes Propinsi dan SOBAT
	Kegiatan 5.5 : Petemuan penguatan Lila Keluarg teintegrasi dalam kebijakan	kali	1		3,075,000			UNICEF	Di Provinsi	Dikes Propinsi dan SOBAT

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Guburnur terkait Posyandu Keluarga										
	Kali	1			3,220,500			UNICEF	Di Provinsi	Dikes Propinsi dan SOBAT
	kali	1			7,070,000			UNICEF	Di Kota Mataram	Dikes Kota Mataram dan SOBAT
	kali	1			8,862,500			UNICEF	10 Kab/Kota	SOBAT
	kali	14			28,272,200			UNICEF	di Lombok Utara dan Lombok Tengah	SOBAT
	kali	1			54,416,100			UNICEF	di 8 kab/kota (kecuali Lombok Tengah dn Lombok Barat)	SOBAT
	kali	1			52,700,400			UNICEF	Di Provinsi	Dikes Provinsi dan SOBAT

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 6 : Memperkuat Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program gizi ibu dan pengintegrasian pendidikan gizi dan perubahan perilaku sosial ke dalam program Sekolah/Madrasah Sehat.	Kegiatan 6.1 : Pertemuan Koordinasi Gizi Ibu	kali	1		6,325,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
	Kegiatan 6.2: Orientasi Sekolah/Madras ah Sehat	kali	1		15,751,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
	Kegiatan 6.3 : Koordinasi Sekolah /Madrasah Sehat 10 Kab/Kota	kali	2		2,652,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
	Kegiatan 6.4 : Orientasi Sekolah/Madras ah Sehat	kali	1		132,464,000			UNICEF	di 8 Kab/Kota (Mataram. Lombok Tengah Lombok Utara, Lombok Timur, KSB,Sumbawa, Bima dan Dompu	SOBAT, Dikes, Kesra dan Kemenag 7 kab/kota
	Kegiatan 6.5 : Monitoring Bersama Pelaksanaan Sekolah/Madras ah Sehat	kali	1		29,420,000			UNICEF	di 5 Kab/Kota (Mataram. Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa)	SOBAT, Dikes, Kesra dan Kemenag 5 kab/kota

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Kegiatan 6.6 : Pertemuan Koordinasi Gizi Ibu Hamil	kali	1		16,915,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT dan Dikes Provinsi
Nama Kegiatan 7 : Meningkatkan kapasitas Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan intervensi gizi dalam situasi darurat.	Kegiatan 7.1 : Orientasi Gizi Bencana	kali	1		11,585,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
	Kegiatan 7.2 : Pertemuan 1 bersama Stakeholder (Penyusunan rencana kontigensi intervensi gizi pada situasi bencana)	kali	1		28,646,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
	Kegiatan 7.3 : Pertemuan 2 bersama Stakeholder di tingkat Provinsi dn 1 kabupaten	kali	1		19,280,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT
	Kegiatan 7.4 : Petemuan pembahasan draft Rekon di tingkt Provinsi dan Kb Lombok Utara	kali	3		8,205,000			UNICEF	Di Provinsi	SOBAT

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
Nama Kegiatan 8 Bantuan bagi masyarakat yang terdmpak COVID-19 di Kota Mataram	Kegiatan 8.1 : Sosialisasi dan edukasi Program dan pencegahan malasah Gizi Balita Pasa Covid	Kelurahan / Lingkungan	2 kelurahhn 17 lingkungan			37,500,000			IR-Konsepsi	Kota Mataram	SOBAT
	Kegiatan 8.2 Distribusi Bntuan	KK	7500						IR-Konsepsi	Kota Mataram	IR-Konsepsi
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas											
Program											
Kegiatan											
Tujuan 5.Kesetaraan Gender											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : Persentase Penduduk Miskin											
Nama Program 1 : <i>Indonesian Women In Leadership (I WIL)</i>											
Nama Kegiatan 1 :Penanganan kasus GBV	1.1.Output Kegiatan:Perem puan dan anak korban kekerasan mendapatkan keadilan dan perlindungan	Kasus			40	1,500,000,0 00			Oxfam Australia	Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah	Konsorsium Adara NTB yang terdiri dari dua Lembaga, yakni Gema Alam NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 2: Pemberdayaan ekonomi perempuan	2.1.Output Kegiatan Terbentuknya kelompok usaha	Kelompok			9					sebagai coordinator konsorsium dan LBH Apik NTB sebagai anggota Konsorsium
	2.2. Output Kegiatan :Terbentuknya ekosistem bisnis	Pilot projek bisnis inklusif			2					
Nama Kegiatan 3:Partisipasi perempuan dalam akses dan control pembangunan desa	3.1. Output Kegiatan: Keterlibatan perempuan dalam forum desa dan pemerintahan desa	orang			300					
INDIKATOR		5.4.1	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial							
Program Memperkuat Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Tenologi Informasi di 2 Kecamatan dan 16 Desa di Kab. Lotim					475.000.000			Oxfam Australia		Konsepsi
INDIKATOR		5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Masyarakat miskin dengan minimal 30% kelompok perempuan yang terkena dampak perubahan iklim di wilayah sasaran akan mengalami peningkatan pendapatan, pengurangan paparan terhadap bahaya iklim, dan pengurangan kasus kekerasan berbasis gender yang diuntungkan dari program NTB dan Zero Waste yang inklusif dari pemerintah pada Desember 2023	300.000 pohon ditanam dan tumbuh di hutan tandus dan lahan kritis	phn	300,000.00		5,284,094,241.00			IR Canada	Desa Tegal Maja KEc Tanjung KLU,	Islamic Relief Indonesia
	150 rumah tangga miskin mendapatkan pelatihan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis Komunitas dan Gender di sektor kehutanan	kk	150							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
150 rumah tangga miskin menerima keuangan mikro untuk menjalankan agrobisnis dalam menjaga penghijauan hutan dan lahan	kk	150								
150 rumah tangga miskin menerima pelatihan dan praktik ekonomi sirkular berbasis gender dari Sektor Persampahan	kk	150							Desa Montong Ajan Lombok Barat	
150 rumah tangga menerima Keuangan Mikro untuk menjalankan ekonomi sirkular dari sampah	kk	150								
Perusahaan sosial berbasis gender didirikan secara legal dan dijalankan secara resmi	unit	1								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kebijakan dan program pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim yang pro-kaum miskin dan peka gender di Provinsi NTB secara efektif berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial yang inklusif, dan perlindungan lingkungan pada Oktober 2023'	Kelompok kerja perubahan iklim multipihak (MCCWG) untuk pembangunan rendah karbon inklusif dan ketahanan iklim secara resmi dibentuk dan berfungsi	klp	1							
	Staf pemerintah daerah dan OMS diberikan pemahaman tentang strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim yang inklusif		50							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Rancangan kebijakan pembangunan rendah karbon inklusif dan strategi ketahanan iklim dalam program NTB Hijau dan Zero Waste telah disetujui Gubernur		1								
Staf Pemerintah dan CSO diberikan pemahaman tentang MRV (Monitoring, Reporting, and Validation) emisi GRK di Sektor Kehutanan dan Persampahan		50								
Dua proposal dalam mengakses anggaran nasional dan internasional untuk perubahan iklim yang dihasilkan oleh MWG termasuk		2								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	untuk offset/perdagangan karbon										
INDIKATOR		5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin								
		5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 tahun terakhir								
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh orang lain dalam 12 tahun terakhir								
		5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan Reproduksi								
Nama Program 2 : Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Perspektif GEDSI dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik melalui Strategi Penguatan Kepemimpinan Perempuan.											
End Of Program Outcome (EOPO) 1 : Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk memastikan perspektif GEDSI dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan pembangunan bidang sosial budaya, ekonomi dan politik melalui Strategi Penguatan Kepemimpinan Perempuan											
Prioritas I : Akses Identitas hukum bagi kelompok terpinggirkan											
Intermediate Outcome : Data pilah gender tentang demografi, dampak pandemi COVID-19 terhadap kelompok marginal di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan potensi wilayah intervensi											
Immediate Outcome : Tersedianya data pilah gender tentang demografi, dampak pandemi COVID-19 terhadap kelompok marginal di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan potensi wilayah intervensi											
Pelaksanaan pengumpulan data		kali	2			79,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSTM
Pengolahan, analisis data dan penyusunan rekomendasi hasil pendataan		kabupaten	2			16,500,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSTM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana						
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II									
Intermediate Outcome (Int.O): Dukungan Para Pemangku Kepentingan dalam melakukan advokasi berbasis data																
Immediate Outcome (Im.O) : Terlaksana penggalangan dukungan Para Pemangku Kepentingan untuk mengadvokasi data pilah gender kepada pemerintah desa, pemerintah lokal dan nasional																
Pertemuan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah lokal dan para pemangku kepentingan		kali	3		2,700,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM						
Workshop Penyusunan bersama langkah-langkah dan agenda advokasi dengan para pihak (offline)		kali	1		30,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM						
Immediate Outcome : Terlaksana pertemuan-pertemuan dengan pemerintah lokal untuk advokasi hasil pendataan																
Pertemuan-pertemuan dengan pemerintah lokal untuk advokasi hasil pendataan (Audensi)		kali	6		6,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM						
Intermediate Outcome (Int.O): Mengaktifkan "Pos Pengaduan Sekolah Perempuan" di desa untuk layanan dalam mengakses identitas hukum kelompok marginal.																
Immediate Outcome : Akses kelompok marginal terutama perempuan untuk mendapatkan identitas hukum.																
Pendampingan intensif di desa Piloting		kali	2		29,800,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM						

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realiasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Advokasi ke dinas terkait dan DUKCAPIL (Kab Lombok Timur dan Lombok Utara)		kali	1		4,200,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM
Memantau perolehan kartu identitas hukum kepada kelompok marginal (Desa Montong Betok dan Desa Sukadana)		kali	3		6,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM
Prioritas II : Akses terhadap jaminan sosial, pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan bagi kelompok terpinggirkan (Desa Montong Betok dan Desa Sukadana)										
Intermediate Outcome : Mengaktifkan “Pos Pengaduan Sekolah Perempuan” di desa untuk mendapatkan akses jaminan sosial, pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan bagi kelompok terpinggirkan										
Immediate Outcome : Edukasi dan advokasi agar kelompok marginal terutama perempuan mendapatkan akses jaminan sosial, pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan										
Edukasi untuk kader perempuan terpilih di 22 desa rintisan (Kab.Lombok Timur dan Lombok Utara)		kali	1		52,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM
Pendampingan intensif di 2 desa piloting		kali	4		39,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Melakukan pertemuan-pertemuan di 2 desa Piloting untuk mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial kreatif tentang vaksin, kesehatan COVID-19, termasuk kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan.		kali	4		18,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Pemantauan secara berkala layanan vaksin, kesehatan COVID-19, kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan di 2 desa piloting		kali	2		4,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Immediate Outcome : Terbangun kolaborasi dengan sistem rujukan pengaduan yang menjadi tanggungjawab pemerintah (UPTD) di tingkat nasional dan lokal										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Advokasi untuk mendapatkan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak di tingkat lokal dan nasional (Audiensi dengan Pemerintah Lokal - Kab.Lombok Timur dan Lombok Utara)		kali	2		2,600,000				Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Melakukan komitmen bersama dengan UPTD PPA dan Dinas PPA untuk penanganan kasus kekerasan dan perkawinan anak (Kab.Lombok Timur dan Lombok Utara)		kali	1		15,800,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Immediate Outcome : Terlaksananya monitoring proses penanganan kasus oleh pemerintah bersama Para Pemangku Kepentingan										
Monitoring proses penanganan kasus secara berkala.		kali	4		12,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Pendokumentasian hasil monitoring (Kab.Lombok Timur dan Lombok Utara)		kali	1		2,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana						
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II									
Prioritas III : Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas																
Intermediate Outcome : Menguatnya jaringan dan substansi untuk advokasi RUU kolaborasi dan dukungan untuk memperkuat Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang berpihak pada korban																
Edukasi tentang substansi RUU TPKS di tingkat desa (2 desa piloting) dan kabupaten melalui penguatan kapasitas organisasi SubMitra dan kelompok marginal untuk mendukung jaringan dan advokasi RUU TPKS		kali	3		6,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM						
Melakukan edukasi publik melalui siaran Radio Komunitas Sekolah Perempuan dan Jaringan (JRKI)		radio	1		18,900,000			Cowater	Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM						
Sosialisasi, penggalangan dukungan dan kampanye RUU TPKS di 22 desa rintisan		kali	1		16,500,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM						
Prioritas IV: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan Anak termasuk regulasi, sistem dan proses yang dibutuhkan (penghapusan perkawinan anak)																
Intermediate Outcome : Menguatnya kesadaran publik dan komitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perkawinan No. 16/ Tahun 2019, Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak, Tujuan 5 SDGs dalam Rencana Aksi Nasional/Daerah SDGs dan kebijakan pemerintah lokal																

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Immediate Outcome : Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No.16/2019, Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak, Tujuan 5 SDGs dalam Rencana Aksi Nasional/Daerah dan kebijakan pemerintah lokal										
Melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan peraturan lokal terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di desa, publik, pemerintah lokal dan lembaga-lembaga masyarakat di 22 desa rintisan	kali	1			22,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Melakukan edukasi publik melalui siaran Radio Komunitas Sekolah Perempuan dan Jaringan (JRKI)	radio	1			18,000,000			Cowater	Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Prioritas V : Pemulihan ekonomi (mata pencarian) bagi usaha mikro dan usaha kecil yang dimiliki oleh kelompok terpinggirkan (Desa Montong Betok dan Desa Sukadana)										
Intermediate Outcome : Terlaksananya pendampingan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan usaha kolektif										
Immediate Outcome : Terlaksananya pendampingan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan usaha kolektif										
Pendampingan intensif di komunitas 2 desa piloting	kali	2			25,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Immediate Outcome : Terlaksananya piloting pengembangan usaha ekonomi kolektif kelompok marginal di desa terpilih										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pendampingan kelompok ekonomi kolektif untuk pengembangan usaha, digitalisasi dan akses jaringan bisnis, termasuk bantuan stimulasi (modal) pengembangan usaha/ livelihood di 2 desa piloting	kali	2			74,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Melakukan monitoring hasil piloting pengembangan ekonomi di 2 desa piloting	kali	2			4,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Prioritas VI : Partisipasi kelompok terpinggirkan sebagai warganegara, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintah										
Intermediate Outcome : Penguatan kapasitas kepemimpinan kelompok marginal terutama perempuan untuk mendesakkan agenda GEDSI melalui pengambilan keputusan										
Immediate Outcome : Kader dari kelompok marginal terutama perempuan mampu menyusun agenda GEDSI yang akan didesakkan melalui Musyawarah Desa dan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pertemuan-pertemuan kelompok marginal terutama perempuan untuk membangun perspektif GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di 2 desa piloting.		kali	2		24,600,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM
Immediate Outcome : Kader dari kelompok marginal terutama perempuan mampu menyusun agenda GEDSI yang akan didesakkan melalui Musyawarah Desa dan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten										
Pendampingan kader dari kelompok marginal terutama pemimpin perempuan akar rumput dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang serta mengawal usulan-usulan yang sudah didesakkan di 2 desa piloting.		kali	2		12,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPDSM
Advokasi SDGs Lokal										
Intermediate Outcome : Program AIPTIS KAPAL Perempuan masuk dalam Dokumen Rencana Aksi Nasional/ Daerah SDGs dan terlaksananya kolaborasi dengan KPP PA dan Kemendesa										
Immediate Outcome : Terlaksananya kolaborasi dengan KPP PA dan Kemendesa										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, kolaborasi dengan KPP PA dan Kemendesa di Lombok, NTB		kali	1		85,558,700			Cowater	NTB	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Penguatan jaringan, kolaborasi dan kampanye publik terhadap urgensi isu GEDSI dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik										
Intermediate Outcome : Kesadaran publik dan multi pihak terhadap urgensi isu GEDSI dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik										
Immediate Outcome : Terlaksana kampanye yang mendapatkan dukungan publik untuk urgensi isu GEDSI dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik										
Melakukan kampanye untuk menggalang dukungan publik melalui media cetak, online dan elektronik. (Melakukan kampanye media sosial dan Radio Komunitas kepada masyarakat desa, publik, pemerintah lokal dan lembaga-lembaga masyarakat)		radio	1		10,500,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
Terlibat aktif dalam jaringan lokal (Kab.Lombok Timur dan Lombok Utara)		kali	12		24,000,000			Cowater	Lombok Timur Lombok Utara	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
A.2. Design/Planning and Project Evaluation										
Finalisasi design dan planning dengan organisasi sub mitra (pertemuan offline)		kali	1		28,500,000			Cowater	NTB	Institut KAPAL Perempuan & LPSDM
INDIKATOR	5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin								
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan Reproduksi								
Nama Program 1: ICSR/Fase Pemulihan										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									
Training dan pelibatan perempuan dan orang dengan disabilitas dalam manajemen bisnis	#orang yang mendapat diseminasi dan divaksinasi	orang	1.416		45,745,000			DFAT	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	YMP, FKGP
Training financial literacy dan kelompok tabungan	# orang yang dilatih tentang keuangan dan terlibat dalam kelompok menabung	orang	1.263		41,095,000			DFAT	Sembalun dan Pringgabaya di Lombok Timur	YMP, FKGP
Sosialisasi dan training Sistem Perlindungan anak	# yang ditraining dan mendapatkan sosialisasi	KPA/orang	15 /450		N/A			Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana				
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II							
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak														
INDIKATOR		6.1.1*	persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dekelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun											
Output 1 : Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk mempercepat pencapaian penerapan sanitasi yang dikelola secara aman di wilayahnya.														
Workshop Jumlah pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan/strategi dan regulasi untuk mendukung sektor Safely Managed Sanitation (SMS) termasuk penyediaan layanannya.									Kabupaten Lombok Timur					
(1) Workshop 10 Kabupaten/Kota	Paket													
(2) Advokasi kebijakan Kab. Lotim dan Kabupaten Sumbawa Barat terkait sanitasi Aman	Paket													
Survey pendataan untuk mengembangkan konsep Kerjasama Pemerintah Badaan Usaha (KPBU) untuk Safely Managed Sanitation (SMS) di pasar umum di kota/kabupaten terpilih (Lotim & KSB)														
(1) Pelatihan Enumerator KSB dan Lotim (Hybrid)	Paket													
(2) Pelaksanaan Survey Pasar	Paket													

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
(3)	Verifikasi data Hasil Survey	Paket									
(4)	Sharing & diskusi (lokakarya)	Paket									
Mengembangkan produk blended finance											
Twinning program sanitasi AMAN, Jumlah kota/kabupaten yang menerapkan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada sanitasi yang dikelola secara aman											
(1)	Twinning program sanitasi AMAN KSB - Lombok Timur	Paket									
(2)	Twinning kelembagaan (Lotim-Pinrang/Hybrid)	Paket									
(3)	Pendokumentasi an praktik baik dari proses pasar sanitasi dan Pasar sehat	Paket									
Survey Banyaknya pengusaha sanitasi yang tertarik mengakses kredit mikro untuk mengembangkan usahanya											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
(1)	Pemetaan Pemangku Kepentingan FGD dan dimasukkan masing-masing dalam Sanitasi Aman	Paket									
(2)	Pelatihan Enumerator	Paket									
(3)	Survey	Paket									
(4)	Mapping Pembiayaan	Paket									
Survey Banyaknya pengusaha sanitasi yang tertarik mengakses kredit mikro untuk mengembangkan usahanya											
(1)	Orientasi sanitasi aman kepada vendor	Paket									
(2)	Pembuatan produk pinjaman	Paket									
(3)	Pelatihan promoter	Paket									
(4)	Pelatihan penjualan bagi produsen & penyedia jasa	Paket									
'Output 2 : Pemerintah NTB dan kabupaten-kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk memfasilitasi implementasi WASH dan MKM di lembaga-lembaga untuk mempercepat dan mempertahankan ODF di wilayahnya.											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Workshop pentingnya Managemen Kesehatan Kebersihan Menstruasi (MKKM) dan sanitasi sekolah										
Kampanye tentang Managemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dan OKY App										
Workshop pengembangan RAD ODF diKabupaten Lombok Timur dan Sumbawa Barat menggunakan pedoman BAZNAS dan Pedoman blanded pendaan										
Tersedianya dokumen best practice implementasi WASH di lembaga, MKM dan di Sekolah Sanitasi										
(1) Desk Review ODF	Paket									
(2) Workshop Penulisan Best Practise WASH di Lembaga, sanitation Sekolah dan MKM	Paket									
(3) Pengembangan video pendek best practice pelaksanaan ODF dan WASH di lembaga dan layanan sanitasi	Paket									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
yang dikelola secara aman.										
Rapat Koordinasi POKJA PPAS Propinsi (STBM 5 Pilar, Sanitasi sekolah, Wash di lembaga)										
'Output 3 : Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk menerapkan WASH dalam Ketahanan Iklim										
Pendampingan Rencana Aksi Pilot penerapan menerapkan Iklim Wash berketahanan di Lotim dan KSB										
INDIKATOR	6.1.1*	persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dekelola secara aman								
	6.2.1*	persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dekelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun								
Nama Program 1: Tanggap Darurat/COPE (Response COVID-19)										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									
Peningkatan akses ke air dan sanitasi	#masyarakat, mitra dan anak-anak yang dapat mengakses air dan sarana sanitasi	Toilet Orang	1,278 79,766					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Peningkatan akses ke air dan sanitasi	#tangki air yang dibangun	tangki air	611					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Distribusi paket kebersihan kepada masyarakat dan anak pasca bencana	#orang yang mendapat paket kebersihan	orang	10,061					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Peningkatan sarana cuci tangan untuk pencegahan COVID 19	#fasilitas yang dibangun	orang	30					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih	#fasilitas yang dibangun	orang	6					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Tujuan 7.Energi Bersih dan Terjangkau										
Prgram 1.										
Kegiatan 1.										
Tujuan 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR		8.2.1*	laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun							
		8.3.1*	Proporsi Lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Program 1: Fase Pemulihan										
Nama Kegiatan	Output Kegiatan									
Mendukung pemulihan mata pencaharian termasuk adaptasi iklim	Training irigasi tetes dan energi terbarukan	orang	60					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Mendukung pemulihan mata pencaharian termasuk adaptasi iklim	Membangung demoplot irigasi tetes	lahan	6					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Mendukung pemulihan mata pencaharian termasuk adaptasi iklim	Membangun panel surya	panel	12					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi
Mendukung pemulihan mata pencaharian termasuk adaptasi iklim	Mendukung mata pencaharian	spot foto dan cafetaria	3					Multi Donor	Tanjung, Kayangan di KLU, Sembalun, Sembelie dan lainnya di Lotim	Wahana Visi

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR		8.3.1. (a)	Percentase akses UMKM (usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan							
Nama Program 3: Dukungan Pemulihan penghidupan paska Covid-19	1. Output: Penguatan UKM	Kelompok	31		425,000,000			JSB (Japan Support Budget) melalui UNDP Indonesia	Desa Sambik Elen, Lombok Utara	PALUMA
INDIKATOR		8.3.1. (a)	percentase akses UMKM (usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan							
Proram Pengembangan UMKM Tangguh di Kota Mataram (lanjutan)					45.000.000			OXFAM Indonesia		
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : Percentase Penduduk Miskin										
Nama Program 3 : Pemberdayaan masyarakat miskin										
Nama Kegiatan 1 :Simpan pinjam pola syariah	1.1. Output Kegiatan:Masyarakat mudah mengakses modal dan tidak menggunakan bunga	Orang	15		700,000,000			Global Micro Initiative Jerman	15 desa di Kabupaten Lombok Timur	Gema Alam NTB
Nama Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas masyarakat	2.1. Output Kegiatan:Nasabah memiliki kapasitas memajukan usahanya	Kapasita	Jiwa wirausaha							
Tujuan 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program 1.										
Kegiatan 1.										
Tujuan 10.Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR		10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik							
		10.7.2 (a)	Jumlah Dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan							
		10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
		10.c.1	Proporsi biaya remitasi dari jumlah yang dikirimkan							
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs (10) : 1,2,3,4,5,8,10,13,17										
Nama Program 1 :	Memperkuat Komunitas Perempuan Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh manfaat yang adil, aman, produktif dari pekerjaan dan penghidupan di Era Pemulihian Ekonomi Indonesia pada masa Pandemi COVID - 10				395.043.820 ,- (April - Des 2022)			Kemitraan Australia - Indonesia (INKLUSI)	Kabupaten Lombok Tengah (Kelurahan Gerung, Desa gemel, Nyerot, Pringgarata Darek)	Migrant Care NTB
OUTPUT KEGIATAN : 1. Adanya Laporan Kondisi Ekonomi Komunitas Purna Migran di masa Pandemi	Kegiatan : Pelatihan Metode Pengumpulan data terkait dengan kondisi ekonomi komunitas purna migran									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Kegiatan : Pendataan dan analisis kondisi ekonomi komunitas purna migran									
OUTPUT KEGIATAN : 2 Adanya kebijakan afirmasi yang mendukung pelembagaan dan pembentukan usaha ekonomi komunitas purna migran	Keg : Lobby dan Advokasi									
OUTPUT KEGIATAN : 3. Meningkatnya Kualitas Produk dan Manajemen Usaha Ekonomi Produktif	Keg 1 : Pelatihan peningkatan kualitas produk usaha mikro Komunitas Perempuan Purna Migran									
	Keg 2 : Pelatihan Mngemen Usaha dan motivasi usahaa bagi UMKM Purna Migran									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
OUTPUT KEGIATAN 4 Meningkatnya Akses komunitas ekonomi prdouktif Purna Migran pada lembaga pembiayaan usaha kecil dan mikro	Keg 1 :Pelatihan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan									
OUTPUT KEGIATAN 5 Pembentukan kelembagaan ekonomi (pra-koperasi) untuk usaha ekonomi Purna Migran	Keg 1 : Workshop Pembentukan Kelembagaan Ekonomi									
OUTPUT KEGIATAN 6 Adanya Laporan tentang data mobilitas dan akses pekerja migran pada skema perlindungan sosial di Komunitas Pekerja Migran pada masa pandemi	Keg 1 : Pelatihan Metode Pengumpulan data terkait dengan akses jaminan dan akses kesehatan									
	Keg 2 : Pendataan dan analisa mobilitas & aksesibilitas jaminan sosial & akses kesehatan Komunitas Pekerja Migran									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
OUTPUT KEGIATAN 7 Komunitas Pekerja Migran mendapatkan akses keadilan, akses perlindungan sosial dan akses kesehatandi masa pandemi	Keg 1 : Penanganan Kasus Pekerja Migran bermasalah di masa pandemi									
	Keg 2 : Pendampingan vaksinasi dan monitoring pasca vaksinasi									
INDIKATOR	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik								
	10.7.2 (a)	Jumlah Dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan								
	10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi								
Nama Program 1 (11) : Membangun Sistem Perlindungan PMI Berkelanjutan melalui Struktur Sosial di Tingkat Desa dan Kecamatan di Lombok Utara										
Penyusunan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) tentang Pemberlakuan Peraturan Desa (PERDES) tentang	Memperkuat kebijakan dan program yang memfasilitasi migrasi yang aman dan anti perdagangan				Rp 173,585,000			AWO International Jerman	Kabupaten Lombok Utara (Medana, Teniga, Tegal Maja, Rempek, Sambik	PERKUMP ULAN PANCA KARSA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Perlindungan TKI	manusia di tingkat desa dan kabupaten								Bangkol)	
Workshop kebijakan anggaran yang responsif terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga di tingkat kabupaten & desa										
Lokakarya MSC (Most Significant Change) tentang migrasi aman										
Perayaan dan kampanye dalam rangka memperingati Hari Migran Sedunia (Migrant Day)										
Pertemuan dalam rangka mengintegrasikan Data Mobilitas PMI ke dalam SID Desa										
Dialog Publik untuk mendorong Perda Perlindungan PMI di Kabupaten Lombok Utara										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sosialisasi Rancangan Draft Peraturan Daerah KLU tentang Perlindungan PMI & Keluarga										
Pelatihan Jurnalistik untuk Jaringan PMI, Kader dan Kelompok PMI	Meningkatkan struktur sosial dan kolaborasi pemangku kepentingan terkait tentang migrasi yang aman dan anti perdagangan manusia				Rp 237,315,000			AWO International Jerman	Kabupaten Lombok Utara (Medana, Teniga, Tegal Maja, Rempek, Sambik Bangkol)	PERKUMP ULAN PANCA KARSA
Pelatihan Advokasi dan Penanganan Kasus PMI untuk Jaringan PMI Tingkat Kabupaten										
Pelatihan Advokasi Kebijakan Anggaran pada Musrenbangn tingkat Desa dan Kabupaten										
Pertemuan Konsolidasi Jaringan PMI tingkat Kabupaten										
Diskusi Tematik Jaringan PMI Tingkat Desa										
Penanganan Kasus PMI										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender	Penguatan Pengelolaan usaha sebagai sumber penghidupan				Rp 106,225,000			AWO International Jerman	Kabupaten Lombok Utara (Medana, Teniga, Tegal Maja, Rempek, Sambik Bangkol)	PERKUMP ULAN PANCA KARSA
Pelatihan Manajemen usaha dan Pemasaran										
Pertemuan dengan perwakilan PLUT/Pusat Layana Usaha Terpadu kabupaten untuk membantu kelompok migran mengembangkan pasar melalui e-commerce										
Pertemuan dengan perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk memfasilitasi kelompok migran untuk mengakses layanan keuangan dan bantuan teknis (BUMDES)										
Memfasilitasi usaha kelompok PMI untuk memperoleh sertifikat usaha berdasarkan skala usaha mereka										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tujuan 11.Kota dan Pemukiman Berkelanjutan										
Program 1.										
Kegiatan 2.										
Tujuan 12.Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										
Program 1.										
Kegiatan 2.										
Tujuan 13.Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR			Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang.							
			Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.							
			Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana-strategi nasional penanggulangan bencana.							
Nama Program 1 (11): Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
1.1.1 Sistem pemantauan implementasi SPM-Sub Urusan Bencana (SUB) yang inklusif dengan mekanisme umpan balik yang bermuara kepada sistem pemantauan yang disusun Kemendagri dan BNPB telah dikembangkan dan diuji	1.1.1.10 Sistem pemantauan implementasi SPM-SUB yang inklusif dengan mekanisme umpan balik yang bermuara kepada sistem pemantauan yang disusun Kemendagri dan BNPB telah dikembangkan dan diuji	Dokumen	1	0	1	400,000,000	245,670,000	134,680,000	DFAT (Australian Government)	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
Nama Program 2 (11): Pengembangan Strategi PB											
2.1.1 Dukungan teknis pelaksanaan peta jalan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah dan pengembangan dokumen Rencana	2.1.1.05 Pengembangan pedoman pengarusutamaan GEDSI untuk implementasi penanggulangan bencana daerah	Dokumen	1	0	0	100,000,000	32,260,000	35,810,000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
	2.1.1.06	Dokumen	1	0	1	100,000,000	34,840,0	98,020,0	DFAT	Lombok Utara	PALLADIUM

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Penanggulangan Bencana daerah yang inklusif dan responsif gender	Dokumen RPB yang dimutakhirkan dan disahkan yang memasukkan prinsip-prinsip GEDSI ditingkat provinsi dan kabupaten sasaran terpilih termasuk kawasan prioritas strategis nasional					00	00			M - SIAP SIAGA
Nama Program 3 (11): Pemetaaan dan Evaluasi Risiko Bencana										
3.1.1 Dukungan teknis, pengawalan, dan perkuatan pelaksanaan pemetaan risiko bencana yang standar, efektif, dan inklusif untuk mendukung implementasi SPM-SUB didaerah	3.1.1.03 Kajian Risiko Bencana Daerah yang dimutakhirkan dan disahkan dengan pelibatan multisektor dan inklusif	Dokumen	2	0	1	200,000,000	65,040,000	111,980,000	DFAT	Lombok Tengah dan Provinsi NTB
Nama Program 4 (11): Layanan Data dan Informasi dan komunikasi kebencanaan										
4.1.2 Dukungan	4.1.2.01 Strategi	Dokumen	1	0	1	300,000,000	43,140,0	207,870,	DFAT	NTB
										PALLADIU
										M - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
teknis, fasilitasi, dan pengawalan untuk penguatan proses integrasi data dan manajemen informasi kebencanaan kedalam satu regional data ditingkat daerah	dan katalog data untuk integrasi data kebencanaan telah disusun dan disahkan untuk implementasi					00	000			M - SIAP SIAGA	
Nama Program 5 (11): Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Kesiapsiagaan											
5.1.1 Dukungan teknis, fasilitasi, dan pengawalan untuk peningkatan peran dan kemitraan multi-sektor dalam penanggulangan bencana yang efektif dan inklusif ditingkat Nasional dan Daerah	5.1.1.02 Platform koordinasi dan kemitraan multi-sektor (minimal melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media) untuk penguatan penanggulangan bencana terbentuk dengan dasar kebijakan (peraturan) yang jelas dan berfungsi di seluruh provinsi dan kabupaten sasaran	Dokumen	1	0	1	175,000,000	82,240,00	73,820,00	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
5.1.1.03 Kerangka kerja dan rencana strategis berkelanjutan (sustainability) dari platform multi-sektor untuk mendukung penguatan sistem PB telah disusun dan diaplikasikan	Dokumen	1	0	1	50,000,000			DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
5.2.1 Pengembangan model Desa Tangguh Bencana berbasis kesejahteraan yang aplikabel dengan konteks lokal di Daerah dan mendukung strategi percepatan ketangguhan desa yang inklusif dan	5.2.1.08 Pengetahuan dan kapasitas pemerintah daerah mengenai SNI Desa Tangguh telah diperkuat di provinsi dan kabupaten sasaran	Dokumen	1	0	1	50,000,000	94,590,00	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
berdasarkan SNI Desa Tangguh	5.2.1.09 Rencana percepatan ketangguhan yang inklusif ditingkat desa dan berlandaskan kearifan lokal yang berdasar pada SNI Desa Tangguh telah disusun untuk disahkan sebagai bagian perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	0	1	100,000,000		68,000,000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
	5.2.1.10 Aplikasi uji coba rencana percepatan ketangguhan desa yang inklusif dilakukan di desa sasaran prioritas pemerintah utamanya di desa wisata dan dokumentasi uji coba dipakai untuk penguatan rencana	dokumen	1	0	1	100,000,000	13,440,000	14,680,000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	percepatan									
	5.2.1.11 Kerangka manajemen pengetahuan termasuk pengumpulan pembelajaran dan praktik baik untuk ketangguhan desa telah disusun dan diaplikasikan	dokumen	3	0	1	50,000,000	39,570,000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
5.2.2 Dukungan teknis, fasilitasi, dan pengawalan proses penyusunan dan pengesahan Rencana Penanggulangan Kedururan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontinjensi untuk Provinsi dan Kabupaten prioritas SIAP SIAGA	5.2.2.01 Pengembangan RPKB di tingkat provinsi yang memasukkan prinsip-prinsip GEDSI	dokumen	1	0	1	50,000,000	136,300,000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (10):										
Nama Program 1 (11): Pulih Bersama										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
KONSEPSI - MITRA SAMYA : Memperkuat Kembali Ketangguhan Inklusif sebagai Strategi Pemulihan Penghidupan Komunitas Pasca Pandemi Covid-19	1. Masyarakat rentan pedesaan telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitasnya dalam manajemen risiko bencana adaptif Covid-19 yang selaras dan integratif 2. Rumah tangga terpilih terdampak Covid-19 telah memiliki ketahanan penghidupan baru yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tekanan dan guncangan 3. Sistem dan praktik management risiko bencana adaptif Covid-19	Desa / Kawasan	4	2	2	2,533,150,00	1,266,575,000	DFAT/ SIAP SIAGA	Desa Malaka, Desa Pemenang Barat (Lombok Utara) Desa Selong Belanak, Desa Tumpak (Lombok Tengah)	KONSEPSI & MITRA SAMYA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasai Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
menjadi tangguh dan inklusif serta tanggap terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
ADBMI-LGBS : Peningkatan Ketahanan Ekonomi Komunitas Pekerja Migrant Yang Terdampak Covid-19 Di Daerah Asal Melalui Inkubasi Bisnis Yang Responsif Gender	1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan ekonomi Ekonomi Rumah Tangga pekerja migrant terdampak covid 19 menjadi lebih efisien & adil genderf 2. Komunitas Pekerja Migrant terdampak Pandemi Covid 19 menginisiasi Bisnis Skala Kecil yang responsive gender sebagai sumber pendapatan alternatif dan adaptif terhadap dampak pandemi COVID19 ataupun resiko bencana lainnya dengan secara disiplin menerapkan protocol kesehatan standar	Rumah Tangga (HH)	300	0	300	2,417,487,5 00	805,829, 167	1,208,74 3,750	DFAT/ SIAP SIAGA	Desa Kuta, Desa Sengkol dan Desa Tanak Awu (Lombok Tengah)	Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) - Lembaga Generasi Bintang Sejahtera (LGBS)

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Program 1 : Perempuan dan Pengelolaan sumber daya alam										
Nama Kegiatan 1 :Pengadaan lahan untuk penanaman serat dan pewarna alam untuk tenun	1.1.Output Kegiatan:Adanya lahan public maupun pribadi yang digunakan untuk menanam serat dan tumbuhan pewarna alam yang akan berkontribusi pada produksi tenun dan lingkungan	Lahan			Lahan pribadi	1,100,000,00,000			Ford Foundation	Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara
Nama Kegiatan 2: Pemberdayaan ekonomi penenun	2.1.Output Kegiatan Terbentuknya kelompok tenun yang sistematis	Kelompok bisnis yang sistematis			3					Konsorsium Yayasan Pikul NTT dan Gema Alam NTB
	2.2. Output Kegiatan :Terbangunnya ekowisata tenun yang akan menjalankan ekonomi dengan perspektif lingkungan.	Pilot projek ekowisat tenun			3					

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
Nama Kegiatan 3:Membangun jejaring	3.1. Output Kegiatan: Kelompok tenun terhubung dengan ekosistem bisnis secara lebih luas	Unsur			Pemerintah, desainer, seniman, penulis, BUMD, jejaring wasatra nusantara						
INDIKATOR			Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta monitoring, dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications								
Memperkuat Ketangguhan Menghadapi Perubahan Iklim dan Penciptaan Lifelihood					850.000.000			Islamic Relief			
Program Konservasi Kawasan dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Perspektif Kehidupan Berkelanjutan dan Climate Economic,					1.100.000.00			LWR			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Konsultansi, Survey,Fasilitator, Nara Sumber dll.					50.000.000			Non-Funding		
INDIKATOR		13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan startegi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana							
		13.3.1 (a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga/Komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup							
Nama Program 1 (11) :										
Nama Kegiatan 1 : PENINGKATAN KETAHANAN MELALUI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI NUSA TENGGARA	Tujuan 1: Pada tahun 2024, masyarakat rentan di kabupaten sasaran secara efektif mempersiapkan dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan bencana melalui praktik pertanian yang lebih baik		4440		90,000,000.00			WN dan PSP-NTB	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Banyu Urip, Batu mekar, Giri Tembesi, Saribaye, Kuripan Selatan	PSP-NTB
	Output 2: Penyuluhan dan LSM/CBO dilatih dalam teknologi pertanian cerdas iklim dan praktik pertanian berkelanjutan		48		96,000,000.00			WN dan PSP-NTB	Lombok Barat Dinas Pertanian	

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 2: Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Penurunan Kerentanan Perubahan Iklim bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Melalui Program Terpadu yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB 2018 - 2021	Sektor 1. Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sub- Sektor: Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan/Ketahanan Pangan	3200			36,000,000			WN dan PSP-NTB	Desa Pelangan, Desa Cendi Manik, Desa Taman Baru, Desa Mareje, Desa Mareje Timur, Eyat Mayang, Desa Sekotong Timur, Desa Jembatan Gantung, Desa Gapuk, Desa Taman Ayu, Kebon Ayu, Kelurahan Gerung Utara, Gerung Selatan, Banyu Urip, Tempos, Babusalam, Kuripan, Giri Sasak, Kuripan Selatan, Jagaraga, Pusuk Lestari, Sandik, Meniting= dan Batu Layar Bararat.	180

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sektor 2 : Sistem Ekonomi dan Pasar, sub-sektor : Pelayanan Keuangan dan Usaha Produktif		175			23,000,000			WN dan PSP-NTB	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Banyu Urip, Kuripan Selatan	
		40			10,000,000			WN dan PSP-NTB	OPD Terkait, BPBD, DLH, Dinas Sosial, PU, Dinas Perataian	
		5			20,000,000			WN dan PSP-NTB	Bappeda Lombok Barat	

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sektor 5. Fasilitasi Penguanan Kebijakan Pemerintah (KLHK), Sub-sektor : Kampung Iklim, Metode Monev Kerentanan Desa dan SIDIK		5			123,000,000			WN dan PSP-NTB	5 Kampung Iklim (Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Banyu Urip, Kuripan Selatan)	
INDIKATOR		13.13*	Percentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.							
20 komunitas sasaran di Kabupaten Dompu dan Bima (kota dan kabupaten) akan lebih siap menghadapi, mengatasi, dan membangun kembali dengan lebih baik setelah guncangan yang disebabkan oleh keadaan darurat akibat iklim pada September 2023	2.1 Penilaian kerentanan dan kapasitas partisipatif dibuat, direncanakan aksi, dan ditetapkan oleh kantor desa	desa	20		14,014,601, 455.00			IR USA	Dompu : Kec Woja (Rababaka, Saneo); Kec Saneo(Woja); Kec Dompu(Karamabura, Manggeasi, Mangge Na'e); Kec Pajo(Woko); Kec Hu'u(Adu,Cempa Jaya, Sawe, Daha Kab Bima: Desa Maria, Teta, Kaowa	Islamic Relief Indonesia, LP2DPM (Dompu), LP2DER (Bima) Islamic Relief Indonesia, LP2DPM (Dompu), LP2DER (Bima)
	2.2 Tim kesiapsiagaan dan respons desa dibentuk dan dilatih tentang		20							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	kesiapsiagaan dan mitigasi bencana terkait iklim								Kota Bima: Kel Ntobo, Kendo, Nungga, Jatibaru, Jatibaru Timur, Ule, Kolo	
	2.3 Pusat pembibitan pohon tahunan dan porang didirikan dan dipelihara	unit	20							
	2.4 Masyarakat desa melaksanakan rencana aksi untuk memulihkan lahan dan hutan yang tandus dan gersang	desa	20							
	2.5 Peraturan desa tentang larangan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat	desa	20							
	2.6 Polisi hutan berbasis masyarakat dan ahli konservasi lahan dibentuk, dilatih dan	klp	20							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	didukung.										
INDIKATOR		13.1.3*	Percentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.								
		13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Para pemegang hak dan CSO dapat secara efektif terlibat dengan pemerintah untuk secara konsisten memantau, mengadvokasi, dan memfasilitasi dalam menghasilkan dan melaksanakan pembangunan rendah karbon dan rencana ketahanan iklim untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim.	Pemetaan dan analisis kerentanan perubahan iklim yang berfokus pada pertanian tada hujan yang sangat terpengaruh oleh perubahan iklim		200 rain-fed farmers (30% women), 8 staff from 2 CSOs, 8 province and districts government staff from four agencies, 10 members of CBO's, 75 participants (village officers, social, religious, youth, and women leaders)		2,644,762,948.00			IR Swedia	Desa Pandanwangi, Pemongkong, Paremas Kec Jerowaru Lotim Pokja API Lotim, Pokja API NTB	slamic Relief Indonesia, KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1.2. Pembentukan dan lokakarya tentang proyeksi perubahan iklim untuk 30 tahun ke depan danprediksi dampaknya terhadap penghidupan masyarakat di Provinsi NTB		60 : CSO: samanta, santai, annisa, koslata, mitra samya, transform, panca karsa, Walhi, YSLPP, SP Dinas: Pertanian, LHK, Kesehatan, Dinasa kelautan dan Perikanan, BMKG, Dinas Ketahanan Pangan,Bapeda (11), BPBD, DP3AKB, PUPR, BTNGR, LIPI, Dinas Sosial, - Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan, Anisa, YSLPP, TP PKK (Kab, Prov), Fatayat NU, Aisyah Muhammadiyah, Muslimat NW, GOWA???? - 5 staff desa -10 perwakilan RH								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1.3. Pelatihan Fasilitator Tingkat Lanjut tentang sekolah iklim berbasis gender (SALT, kesetaraan gender dan Perlindungan anak, manajemen pengendalian hama, konservasi tanah dan air, penanaman mangrove, geo- membran, dan pengukuran suhu air laut, dll) untuk strategi adaptasi yang lebih baik		20: CSO : 3, BMKG: 3 Dinas : 6 staff desa: 5								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1.4. Melaksanakan proyek percontohan adaptasi perubahan iklim untuk pertanian tada hujan, nelayan, dan petambak garam – sekolah iklim berbasis gender termasuk SALT, geo-membrane, rehabilitasi mangrove, pertanian mikro, pemberian makan lobster		320 : - SLI : 300 (150 Perempuan, 150 Laki Laki) - NGO : 6 - Gov: 6 - BMKG: 3 -Desa : 5								
Kegiatan 1.5. Lokakarya pengarusutamaan pengurangan kemiskinan dan kesetaraan gender dalam pembangunan rendah karbon dan strategi ketahanan iklim yang akan diproduksi oleh pemerintah		45 : CSO : 5 SLI : 10 Gov: 20 DPRD: 5 Universitas: 5								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1.6. Peningkatan kapasitas OMS untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengadvokasi integrasi Rencana Aksi Sub-Nasional untuk CCA ke dalam pembangunan rendah karbon dan rencana ketahanan iklim		58: CSO : 40 CBO: 10 Gov : 5 Academic : 3								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pengembangan tugas dapat secara efektif menghasilkan/menginisiasi rencana aksi adaptasi perubahan iklim subnasional ke dalam rencana pembangunan rendah karbon dan rencana ketahanan iklim serta meningkatkan komitmen mereka untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim	Kegiatan 2.1. Penilaian anggaran untuk program NTB hijau di tingkat provinsi dan kabupaten melalui realisasi anggaran untuk integrasi perencanaan perspektif pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim		50 : bapeda: 4 Dinas terkait: 19 Donor : 3 Universitas: 3 CSO : 10 Perwakilan Komunitas: 5 DPRD Prov dan Kab: 4 media 2							
	Kegiatan 2.2. Peningkatan kapasitas pembentukan/peningkatan Forum Mitigasi/Adaptasi Perubahan Iklim lintas sektor pemerintahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten		50 : anggota pokja							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.3. Lokakarya penyempurnaan modul pelatihan, teknik fasilitasi, dan modul formulasi untuk Sekolah Iklim berbasis gender yang diintegrasikan ke dalam program dusun iklim yang dipimpin perempuan		16 : BMKG: 3 Dinas : 9 Universitas:1 NGO : 3								
Kegiatan 2.4. Seminar dan lokakarya tentang hasil dan efektivitas sekolah iklim berbasis gender		180 : Kementrian kehutanan : 1 Gubernur : 1 Bupati:4 Bapeda: 22 Dinas terkait: 50 donor: 2 Universitas: 20 CSO: 30 Komunitas: 60								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.5. Pertemuan untuk menghasilkan dan melegalkan pembangunan rendah karbon dan rencana ketahanan iklim dan untuk mengadvokasi dimasukkannya respon perubahan iklim dalam rencana aksi pembangunan tahunan (kabupaten dan provinsi) dan dalam penganggaran tahunan pemerintah		62: Gubernur NTB :1 DPRD : 5 Bupati Lotim : 1 KaDInas terkait: 5 Pokja API : 50								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Organisasi masyarakat sipil (kelompok kerja perubahan iklim, LSM, Organisasi Hak Perempuan, akademisi, HIMASPI) dapat secara efektif mempromosikan dan mengadvokasi kesetaraan gender dalam tindakan terkait perubahan iklim	Pemetaan dan analisis gender dalam konteks pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim		13 NGO:10 Dinas : 10 (3 dinas perikanan, pertanian perindag, ketahanan pangan, Kehutanan dan lingkungan) CBO: 10 Staff desa : 3 peserta : 150 (30% perempuan,							
	Kegiatan 3.2. Lokakarya perumusan rencana aksi yang dipimpin perempuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim		50							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 3.3. Lobi dan advokasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengadopsi rencana pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim yang dipimpin perempuan dalam program anggaran tahunan		100								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 3.4. Pertemuan seri dan FGD tentang penyulingan modul (Kesetaraan gender dan perlindungan anak) untuk sekolah iklim berbasis masyarakat		25: Dinas: 11 (DP3AKB, Dinas Pertanian, DKP, Dinas Perindustrian, DLHK, lainnya) Universitas: 2 (pusat kajian perempuan dan anak UNRAM, UIN) CSO : 12 (??)								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 3.5. Kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, kampanye, dll) untuk kelompok CCA yang dipimpin perempuan dan OMS terkait lainnya termasuk menyiapkan mekanisme tanggapan pengaduan berbasis gender untuk mencegah dan menangani pernikahan anak usia dini		50 CSO: PKK, WALHI, Samanta, Koslata, Transform, SP, LPA,) Himaspi:								
Pengembangan tugas dapat secara efektif mengintegrasikan isu-isu berbasis gender ke dalam kebijakan dan implementasi perubahan iklim provinsi dan kabupaten (program dan anggaran)	Kegiatan 4.1. Seri sesi peningkatan kapasitas dan kesadaran tentang perspektif gender dalam pembangunan rendah karbon dan isu-isu ketahanan iklim	120 Pokja CCA Provinsi: 60 Pokja CCA Kab Lotim: 60								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 4.2. Lokakarya tentang integrasi kesetaraan gender dalam pembangunan rendah karbon dan strategi ketahanan iklim		100 National: KLHK, Bappenas Provinsi: Gubernur, Bappeda (2)Dinas terkait CSO: Donor: Universitas: Komunitas: Kabupaten: 4 Bupati/walikota , @2 orang 10 Bappeda Kab/Kota								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 4.3. Lokakarya review atau evaluasi implementasi dan anggaran kesetaraan gender dalam program terkait perubahan iklim di instansi provinsi dan kabupaten		100								
Tujuan 14.Ekosistem Lautan										
Program 1.										
Kegiatan 1.										
Tujuan 15.Ekosistem Daratan										
INDIKATOR	15.1.1*	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Peningkatan kapasitas 20 masyarakat di Kabupaten Dompu dan Bima (Kabupaten dan Kota) dalam mengelola hutan tandus, lahan gersang dan pekarangan tidak produktif	1.1 Laki-laki dan perempuan yang ditargetkan menyelesaikan pelatihan gender, teknik SALT/agroforestri berkelanjutan untuk hutan tandus, lahan kering berlereng	Orang	1000		14,014,601,455.00			IR USA	Dompu : Kec Woja (Rababaka, Saneo); Kec Saneo(Woja); Kec Dompu(Kara mabura, Manggeasi, Mangge Na'e); Kec Pajo(Woko); Kec Hu'u(Adu,Cempi Jaya, Sawe, Daha	Islamic Relief Indonesia, LP2DPM (Dompu), LP2DER (Bima)
	1.2 Kelompok masyarakat laki-laki yang ditargetkan dibentuk dan dilatih untuk mempromosikan kesetaraan gender.	Desa	20							
	1.3 Wanita yang ditargetkan menyelesaikan pelatihan tentang bisnis pekarangan bernilai tinggi, desa ramah iklim, dan gender.	KK	300							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
1.4Kegiatan SALT berbasis gender, agroforestri berkelanjutan, model bisnis pekarangan sedang berjalan	desa	20								
1.5Keluarga mengakses keuangan mikro untuk mengembangkan teknik SALT berbasis gender mereka sendiri atau wanatani berkelanjutan	KK	600								
1.6Pusat pembibitan untuk tanaman bernilai tinggi didirikan dan dipelihara.	unit	3								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	1.7Perempuan dapat mengakses keuangan mikro untuk mengembangkan bisnis pekarangan rumah yang menguntungkan dan ramah lingkungan: porang, madu, jamur, dll.	kk	300							
	1.8Pelatihan pengembangan produk dan pemasaran serta pembukuan dilakukan		20							
	1.9Perusahaan sosial didirikan dan dijalankan untuk mendukung bisnis masyarakat	unit	2							
Tujuan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh										
INDIKATOR		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
140 Perlindungan Anak Paling Rentan dan Hak atas pendidikan dan kesehatan di satu desa baru di Kabupaten Lombok Barat dan 2 desa sebelumnya di Kabupaten Lombok Utara, NTB Prov. ditingkatkan pada akhir 2022	20 Anak di satu desa baru dan 20 anak di 2 desa sebelumnya akan mendapatkan kartu jaminan kesehatan nasional	anak	20			1,284,000,00.00			IR Malaysia	Islamic relief
	10 anak putus sekolah di satu desa baru dan 15 anak putus sekolah di 2 desa sebelumnya didaftarkan kembali untuk melanjutkan pendidikan di sekolah formal	anak	10							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	15 anak dalam kondisi sakit berat dan/atau cacat di satu desa baru dan 2 desa sebelumnya difasilitasi untuk dirawat melalui sistem dan jaringan rujukan kesehatan yang ada	anak	15							
	100 Pengasuh anak paling rentan berpartisipasi aktif dalam kegiatan FGD rutin dua mingguan KSM tentang kesadaran dan pemahaman tentang Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Pendidikan Anak	pengasuh	100							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	7 Kelompok Anak yang mencakup lebih dari 200 anak di satu desa baru di wilayah Lombok Barat telah dibentuk	klpk	7							
	Sedikitnya 200 anak dari 7 kelompok anak yang telah terbentuk aktif melakukan kegiatan psikososial/pendidikan kreatif	anak	200							
	Sedikitnya 200 anak dari 7 kelompok anak yang berpartisipasi dalam pertemuan kelompok anak reguler/ FGD tentang perlindungan anak, pendidikan, dan pesan-pesan positif kesehatan mengarah pada	anak	200							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
peningkatan praktik sehari-hari dan perubahan perilaku										
Pendapatan harian 275 keluarga paling rentan yang mengasuh anak-anak paling rentan di satu desa baru di Lombok Barat dan 2 desa sebelumnya di Lombok Utara ditingkatkan melalui inisiatif sosial ekonomi partisipatif inklusif masyarakat dengan implementasi metodologi Keuangan Mikro Syariah	7 Kelompok Swadaya yang mencakup 100 keluarga paling rentan didirikan di satu desa baru di Lombok Barat untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif mata pencaharian melalui keuangan mikro masyarakat kegiatan Syariah	kpk	7							
	7 Kelompok Swadaya yang akan dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai peningkatan kapasitas mata pencaharian dan proses	kpk	7							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	berdasarkan metodologi Keuangan Mikro Syariah.									
	100 keluarga paling rentan yang tergabung dalam 7 SHG mampu melanjutkan atau mendirikan usaha kecil baru mereka yang didukung oleh metodologi keuangan mikro Syariah dimana setidaknya 80% dari mereka mampu meningkatkan pendapatan mereka setidaknya Rp 1,5 M per bulan (100 \$)	kk	100							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
1 Badan Platform Desa di Lombok Barat dibentuk untuk lebih mengimplementasikan dan menjalankan inisiatif MFS di antara 100 keluarga paling rentan yang dikelompokkan dalam 7 KSM	unit	1								
Satu produk madu trigona dan bee pollen sebagai produk turunannya mampu dikembangkan dan dipasarkan oleh 11 KSM dan VPB-nya di 2 desa di Kabupaten Lombok Utara	unit	2								
INDIKATOR	16.2.1 (b)*	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya								
	16.3.1 (a)*	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	16.3.1 (b)*	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan non litigas								
	16.3.1 (c)*	Persentaseorang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara								
Program Inisiasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Bentek, Lombok Utara, Gegerung Lombok Barat dan Kota Mataram	1. Inisiasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Bentek, Lombok Utara, Gegerung Lombok Barat dan Kota Mataram	Forum Anak	2		896,325,000			THE ASIA FOUNDATION (TAF) – AUSTRALIA INDONESIA FATHNERS HIP FOR JUSTICE (AIPJ) 2	Lombok Untara Lombok Barat Kota Mataram	LPA NTB
	2. Penguatan Forum Anak Kota Mataram	orang	25							
	3. Penyusunan Modul Moderasi Beragama di sekolah	dokumen modul	1							
	4. pelatihan moderasi beragama bagi duru di Kota Mataram	orang	30							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program 4: TRAINING PARALEGAL DISABILITAS	1. Training paralegal Difabel lombok (kerjasama sigab jogja dengan lpa ntb)	orang	15		30,000,000			SASANA INKLUSI DAN GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB) INDONESIA	Kota Mataram	LPA NTB
	2. Pertemuan Paralegal lombok (kerjasama sigab jogja dengan lpa ntb)	orang	20							
	3. workshop jaringan antar sektor (kerjasama sigab jogja dengan lpa ntb)	orang	20							
Program 5: Program Kesejahteraasn Sosial Anak - bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Bantuan sosial bagi anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	orang	30		30,000,000			KEMENTERIAN SOSIAL RI	Pulau Lombok	LPA NTB
	Temu Penguatan Kapsitas Anak dan Keluarga	orang	60							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program 6: PROGRAM BANTUAN HUKUM - OBH (Organisasi Bantuan Hukum)	Pendampingan Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu, dukungan Kemenkum HAM RI dan Provinsi NTB	orang	10		50,000,000			KANWIL KEMENKUM HAM RI	se NTB	LPA NTB
Program : 7 PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak	orang	250		194,000,000			APBD PROV. NTB melalui DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELAURAG A BERENCANA (DP3AP2KB) PROVINSI NTB	se NTB	LPA NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Kegiatan Respon Kasus mencakup penanganan kasus dari berbagai macam kasus anak yang termasuk kedalam lima Master yang ada di wilayah NTB.	kasus	40							
1. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)	1.1 Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi dengan mendorong pembentukan Peraturan Kepala Daerah, SK Tim, dan SOP PKSAI.	perbup PKSAI	5		3,335,800,00			UNICEF	Lombok utara Lombok Barat Lombok Tengah	LPA NTB
	1.2 Peningkatan kapasitas Multi Stakeholder PKSAI dan Tenaga Penanganan Kasus (Pekos, TKSK dan Kader Desa).	anak rentan	5,089							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
1.3 Pelatihan Pengelolaan Data melalui Pelatihan Primero dan Pelatihan Alur Managemen Kasus	kasus	4,366								
1.4 Workshop Advokasi Anggaran Penyelengraan Perlindungan Anak dan Workshop Strategi Penganggaran Kebutuhan PKSAI	orang	250								
Pencegahan perkawinan anak di Lombok Utara	Optimalisasi kapasitas dan partisipasi anak	orang anak	338							
	Penguatan kapasitas keluarga melalui implementasi TEPAK dan DIALOG WARGA	orang	790							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Advokasi regulasi dan jaringan pemangku kepentingan strategis	perdes pencegahan perkawinan anak	10							
Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Pulau Lombok (Dampak Gempa)	Koordinasi dan fasilitasi pemenuhan akta kelahiran anak di 4 lembaga layanan	pokja adminduk desa	43							
	Koordinasi dan fasilitasi pemenuhan akta kelahiran anak di 4 lembaga layanan	kepemilik an akta kelahiran	95%							
	Penguatan kapasitas pokja adminduk Kabupaten dan desa	orang	300							
	advokasi kebijakan dan alokasi anggaran untuk akta kelahiran	orang	200							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Peningkatan kapasitas frontliners dengan coaching sessions, pelatihan pengarusutamaan gender dan rakor.	orang	249							
	Peningkatan kapasitas tenaga layanan dengan coaching session	orang	50							
	Peningkatan kapasitas fasilitator (PFA dan Pemetaan kerentanan)	orang	98							
	Layanan konseling dan sistem rujukan pendamping serta promosi lewat media	orang	57							
Program 2 : PROGRAM Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Masyarakat	Penyusunan Pedoman Pengembangan Restorative Justice di Lombok Utara dan Kota Mataram	2 dokumen pedoman RJ	2		400,000,000			Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) 2 - The Asia Foundation (TAF)	Lombok Utara dan Kota Mataram	LPA NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Penguatan Kapasitas Majelis Krama Desa di Lombok Utara	60 orang	60							
	Penguatan Kapasitas Bale Mediasi Kota Mataram	61 orang	61							
Program 3: PROGRAM BANTUAN HUKUM - OBH (Organisasi Bantuan Hukum)	Pendampingan Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu, dukungan Kemenkum HAM RI dan Provinsi NTB	62 orang	62		25,000,000			Kemenkumham RI dan Wilayah NTB	Se NTB	LPA NTB
Program 1 : Pelembagaan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD)	1. penyusunan regulasi tingkat kabupaten dan desa yang mendukung pelaksanaan LABKD di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima,	63 orang	63		555,412,000			KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat untuk Pelayanan Akses Kesejahteraan	Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima	LPA NTB
	2. Tersusun dan terimplementasinya SOP dan standar pelayanan	64 orang	64							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	LABKD di desa									
	3. Keterlibatan / peran aktif kelompok masyarakat (Pokja Adminduk Desa), PRD/PPKD, TPPKK Desa & BPD untuk pendataan dan pengambilan keputusan desa yang mendukung perbaikan sistem layanan adminduk di desa	65 orang	65							
	4. Advokasi anggaran desa untuk pelayanan adminduk di desa	perempuan	115							
Program 2: PROGRAM BANTUAN HUKUM - OBH (Organisasi Bantuan Hukum)	Pendampingan Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu, dukungan	kasus	20			25,000,000		Kemenkumham RI dan Wilayah NTB	Se NTB	LPA NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Kemenkum HAM RI dan Provinsi NTB									
Program 3 : PROGRAM Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Masyarakat	Kebijakan lokal untuk implementasi Restorative Justice di tingkat kabupaten dan desa	dokumen MoU implementasi RJ	2		35,000,000			Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) 2 - The Asia Foundation (TAF)	Lombok Utara dan Kota Mataram	LPA NTB
Program 4 : Replikasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa	Penyusunan kebijakan di daerah untuk replikasi implementasi LABKD	Final draf Perbup LABKD, 12 perdes	4		300,000,000			KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat untuk Pelayanan Akses Kesejahteraan) dan PUSKAPA UI	Kabupaten Dompu, KSB, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan KLU	LPA NTB
Tersedianya rancangan peraturan gubernur/provinsi untuk mendukung efektifitas dan keberlanjutan pelayanan kesejahteraan dan	• Review Perbup/Perwal PKSAI di 5 kabupaten / kota sepuлau Lombok • Harmonisasi kebijakan layanan integrasi	Pergub perbup (review)	* 1 * 2		1,490,000,000			UNICEF	Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Lombok Barat Lombok Tengah Kabupaten Sumbawa	LPA NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
perlindungan anak terpadu	dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten									
	• Penyusunan dan pengesahan draf perbup layanan terpadu (integrasi layanan) perlindungan anak di dua kabupaten Sumbawa	draft perbup	1							
Jumlah kabupaten sasaran melakukan minimal 3 rapat koordinasi antar lembaga untuk memperkuat integrasi layanan perlindungan anak	Pertemuan koordinasi sistem layanan terpadu									
Jumlah kabupaten yang mengembangkan SOP penyediaan layanan yang disesuaikan dengan standar layanan baru oleh Kementerian PPPA dan dalam konteks pandemi COVID 19	• Review SOP PKSAI dan UPTD PPA di 5 kabupaten / kota sepuлau Lombok • Penyusunan SOP layanan terpadu (integrasi layanan) perlindungan	SOP	* 3							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	anak di 5 kabupaten									
Jumlah staf (manajer dan pekerja garis depan) yang dilatih untuk meningkatkan penyediaan layanan menggunakan prosedur operasi standar yang direvisi	Pelatihan managemen kasus berdasarkan SOP yang disesuaikan	orang	15							
Desa-desa terpilih di kabupaten/kota sasaran telah memformalkan mekanisme untuk mengidentifikasi, memberikan dukungan, dan merujuk anak-anak dan keluarga/pengasuh yang rentan										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sejumlah desa telah menguji mekanisme formal untuk mengidentifikasi, memberikan dukungan, dan merujuk anak dan keluarga rentan ke layanan kesejahteraan dan perlindungan anak terpadu	• Penyusunan dan pengesahan perdes sistem perlindungan anak terpadu • Bimbingan teknis implementasi SOP / mekanisme untuk mengidentifikasi, memberikan dukungan, dan merujuk anak dan keluarga rentan ke layanan kesejahteraan dan perlindungan anak terpadu	15 desa (75 orang)	15 desa (75 orang)							
Jumlah fasilitator masyarakat yang dilatih untuk memahami kerentanan dan identifikasi anak dan keluarga rentan, fokus tema : pertolongan pertama psikologis (PFA), pencegahan	TOT Fasilitator Perlindungan anak desa (menggunakan modul yang ada)									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
pernikahan anak, dan pencatatan sipil										
Jumlah desa yang melakukan kegiatan untuk mempromosikan koneksi desa dengan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak terpadu Kabupaten/Kota dan sebaliknya	• Identifikasi dan verifikasi data kerentanan di desa • Kegiatan “Gawe Gubuk” Layanan integrasi yang menjangkau lebih banyak anak rentan.	3.384 anak rentan	3.384 anak rentan							
	Update jumlah layanan Gawe Gubuk di Desa Maanggala KLU	1 desa dan Update tindalanjut Gawe Gubuk	1 desa dan Update tindalanjut Gawe Gubuk							
Kabupaten/kota terpilih di NTB telah memperkuat mekanisme rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak berkonflik dengan hukum yang dikaitkan dengan mekanisme berbasis masyarakat.										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Jumlah desa dengan anggota masyarakat paling sedikit 10 orang yang mampu melaksanakan praktik restorative justice dan mendukung proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum.	desa / kelurahan	8								
Jumlah orang (anggota kelompok masyarakat dan personel jaringan rujukan) yang dilatih mekanisme koordinasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum di 2 kabupaten/kota.	• Pelatihan bagi kader desa dan Bale Mediasi tentang penanganan / pendampingan ABH berbasis Restorative Justice . • Workshop penguatan SPPA dan kebijakan implementasi Restorative Justice									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Jumlah kabupaten yang menyelenggarakan rapat koordinasi fungsi antara desa dan penyelenggara pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum minimal sebulan sekali.	• Sinkronisasi SOP Polda NTB dengan lembaga jejaring terkait rehabilitasi sosial dan reintegrsi ABH • Workshop implementasi SOP rehabilitasi sosial dan reintegrasi ABH yang telah disesuaikan	kabupaten	2							
Orang tua/pengasuh di kabupaten/kota sasaran telah meningkatkan kapasitas dalam praktik pengasuhan yang baik dan melindungi anak										
Jumlah set materi informasi tercetak tentang perlindungan anak untuk orang tua/pengasuh	Pencetakan dan retribusi infografis tentang pengasuhan yang baik dan perlindungan anak	lbr	2,000							
Jumlah orang tua/pengasuh yang	• TOT 15 orang fasilitator desa	orang	17							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
menghadiri sesi parenting education dengan topik perlindungan anak (Persentase orang tua/pengasuh yang menghadiri sesi parenting education yang menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang topik perlindungan anak)	• Sesi parenting bulanan (PUSPAGA dan Posyandu Keluarga) menggunakan modul yang ada dengan fokus tema : pengasuhan yang baik, pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak.	orang	1,512							
Forum/organisasi anak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk dalam mencegah dan mendukung anak korban perkawinan anak.										
Jumlah fasilitator anak/remaja yang dilatih sebagai pendidik sebaya (PFA, mempromosikan perilaku sehat, peka gender, cara melaporkan dan akses layanan)	TOT 25 fasilitator anak/remaja	orang anak	25							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Jumlah forum/organisasi anak desa yang dibentuk dan diperkuat	• Pembentukan forum anak • Optimalisasi peran forum anak sebagai pelapor dan pelopor	orang anak (anggota Forum anak)	681							
	• Musrenbangdes Khusus Anak	orang anak	150							
Jumlah anak mengalami peningkatan pengetahuan tentang praktik perilaku protektif	• Sosialisasi berkala oleh Fasilitator dan Forum Anak kepada minimal 50 anak/remaja per desa	orang peserta	964							
Program 2: PROGRAM BANTUAN HUKUM - OBH (Organisasi Bantuan Hukum)	Pendampingan Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu, dukungan Kemenkum HAM RI dan Provinsi NTB	kasus	28		30,000,000			Kemenkumham RI dan Wilayah NTB	Se NTB	LPA NTB
Nama Program 1 (11) : PROGRAM SAFE4C NTB (Strengthening Safe and Friendly Environment for Children in Nusa	Pencegahan Perkawinan Anak				2,500,000,00			UNICEF	Lombok Utara Lombok Barat Kota Mataram Lombok Tengah Lombok Timur	LPA NTB
	Layanan Integrasi di Sekolah									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realiasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tenggara Barat)	Partisipasi Anak								Kab. Sumbawa	
	Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum									
	Sistem Perlindungan Anak Berbasis Desa									
INDIKATOR		16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur							
		16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan rendah							
		16.9.1 (b)	pesentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun							

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realiasasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1 : Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Pulau Lombok (Dampak Gempa)	1.1. Fasilitasi pelayanan akta kelahiran dan adminduk di tingkat desa	12.785 kutipan akta kelahiran anak			7,235,900,00			UNICEF	20 Desa di Kabaupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara	LPA NTB
	1.2. Fasilitasi pembentukan Pokja dminduk tingkat desa dan tingkat kabupaten	18 Pokja Adminkuk tingkat desa								
	1.3. Advokasi Kebijakan lokal	5 kebijakan lokal								
Tujuan 17.Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
Prgram 1.										
Kegiatan 1.										